



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA BPKAD KABUPATEN BOGOR)**

Skripsi

Dibuat oleh:

Dini Dwiyani
022117252

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS PAKUAN
BOGOR**

JULI 2021



**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA BPKAD KABUPATEN BOGOR)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat dalam mencapai gelar Sarjana Akuntansi
Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan
Bogor

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., MM., CA)

Ketua Program Studi Akuntansi
(Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA,
CMA, CCSA, CA, CSEP, QIA)

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
(STUDI EMPIRIS PADA BPKAD KABUPATEN BOGOR)**

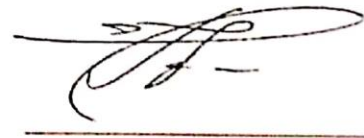
Skripsi

Telah disidangkan dan dinyatakan lulus
Pada hari Kamis, tanggal 1 Juli 2021

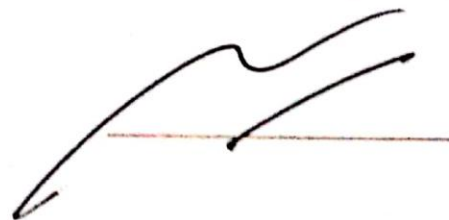
Dini Dwiyani
022117252

Disetujui

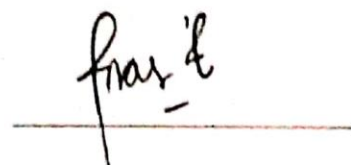
Ketua Penguji Sidang
(Monang Situmorang, Drs., Ak., M.M., CA)



Ketua Komisi Pembimbing
(Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA)



Anggota Komisi Pembimbing
(Tiara Timuriana, S.E., M.M)



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Dwiyani
NPM : 022117252
Judul Skripsi : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor)

Dengan ini saya menyatakan bahwa Paten dan Hak Cipta dari produk skripsi di atas adalah benar karya saya dengan arahan dari komisi pembimbing dan belum diajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi manapun.

Sumber informasi yang berasal atau dikutip dari karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan dari penulisan lain telah disebutkan dalam teks dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian akhir skripsi ini.

Dengan ini saya melimpahkan Paten, Hak Cipta dari karya tulis saya Kepada Universitas Pakuan.

Bogor, Juli 2021

MATERAI Rp6000.-

Dini Dwiyani
022117252

**© Hak Cipta milik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan, tahun
2021**

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumbernya. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik, atau tinjauan suatu masalah, dan pengutipan tersebut tidak merugikan kepentingan yang wajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

Dilarang mengumumkan dan atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis dalam bentuk apapun tanpa seizin Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.

ABSTRAK

DINI DWIYANI. 022117252. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Bogor). Di bawah bimbingan: HENDRO SASONGKO dan TIARA TIMURIANA. 2021.

Kualitas LKPD merupakan suatu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan yang dapat disusun dengan baik, dapat dipahami, sesuai dengan prinsip akuntansi, dan dapat memenuhi kebutuhan pemakainya dalam hal pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, terhindar dari kesalahan material serta dapat diandalkan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh (1) Penerapan SAKD sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas LKPD (2) Penerapan SAP sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas LKPD (3) Pemanfaatan TI sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas LKPD (4) SPI sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas LKPD (5) Penerapan SAKD, Penerapan SAP, Pemanfaatan TI, dan SPI secara simultan terhadap Kualitas LKPD pada BPKAD Kabupaten Bogor.

Penelitian ini dilakukan pada BPKAD Kabupaten Bogor. Sampel yang digunakan pada penelitian ini sebanyak 4 Bidang yang terdiri dari 52 responden. Sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner dengan melalui *link google form* kepada para responden. Penelitian ini menggunakan SPSS versi 25 dengan menggunakan uji kualitas data, uji statistika deskriptif, uji asumsi klasik, uji regresi linear berganda dan uji hipotesis.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa penerapan SAKD, penerapan SAP, pemanfaatan TI dan SPI sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD masing-masing berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan bahwa penerapan SAKD, penerapan SAP, Pemanfaatan TI, dan SPI secara simultan berpengaruh terhadap kualitas LKPD Kabupaten Bogor.

Kata kunci: Penerapan SAKD, Penerapan SAP, Pemanfaatan TI, SPI, dan Kualitas LKPD

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala karunia-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor)”. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar (S1) Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna baik dari segi teknis maupun dari segi ilmiahnya, semua itu disebabkan dari keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak sehingga dapat dijadikan masukan yang bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan penulis agar lebih baik lagi.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah mendapatkan bimbingan, dukungan serta bantuan dari berbagai pihak atas bantuan, do’a, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat kesehatan kepada penulis selama menyusun skripsi.
2. Kedua orang tuaku yang telah memberikan dukungan dan doanya yang tak terhingga serta bantuan moral dan materil dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
4. Bapak Dr. Chaidir, M.M. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
5. Ibu Dr. Retno Martanti Endah Lestari, S.E., M.Si., CMA., CAPM. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
6. Bapak Dr. Arief Tri Hardiyanto, Ak., MBA., CMA., CCSA., C.A., CSEP., QIA., CFE. Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
7. Bapak Agung Fajar Ilmiyono, S.E., M.Ak., AWP., CTCP., CFA. Selaku Asisten Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan.
8. Bapak Dr. Hendro Sasongko, Ak., M.M., CA. Selaku Ketua Komisi Pembimbing Penulis yang telah memberikan banyak bimbingan serta pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
9. Ibu Tiara Timuriana, S.E., M.M. Selaku Anggota Komisi Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

10. Seluruh Dosen, Staff Tata Usaha dan Karyawan Perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pakuan Bogor.
11. Kepada seluruh teman-teman kelas G Akuntansi 2017 yang telah memberikan warna selama perkuliahan, semangat, keceriaan, dan bantuan ketika penulis sedang kesulitan.
12. Kepada teman-teman kelas konsentrasi Akuntansi Sektor Publik 2017 yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Kepada sahabat-sahabat Alda, Dania, Demi, Fitri, Rindayu, Resma, Eneng Febri yang selalu memberikan banyak perhatian, semangat, motivasi dan banyak kata yang tak bisa penulis utarakan melalui kalimat ini.
14. Kepada semua pihak yang telah membantu yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan, bimbingan, do'a, dukungan, dan semangat yang telah diberikan kepada Penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan dapat menjadi pijakan bagi penulis untuk dapat berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang.

Bogor, Juni 2021

Penulis,

DAFTAR ISI

JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
LEMBAR PENGESAHAN & PERNYATAAN TELAH DISIDANGKAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PELIMPAHAN HAK CIPTA	iv
HAK CIPTA	v
ABSTRAK.....	vi
PRAKATA	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah	7
1.2.1 Identifikasi Masalah	7
1.2.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian	8
1.3.1 Maksud Penelitian	8
1.3.2 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	9
1.4.1 Kegunaan Praktis	9
1.4.2 Kegunaan Akademis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik	10
2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik	10
2.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.....	11
2.2.1 Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	11
2.2.2 Prosedur Penerapan Akuntansi Keuangan Daerah	12
2.2.3 Mekanisme Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	14
2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	14
2.3.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	14
2.3.2 Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan	14
2.3.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintaha	15
2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi	17
2.4.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi	17

2.4.2 Tujuan Teknologi Informasi	18
2.4.3 Komponen Teknologi Informasi	18
2.5 Sistem Pengendalian Internal	19
2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal	19
2.5.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal	19
2.5.3 Elemen Sistem Pengendalian Internal	20
2.5.4 Pengawasan Intern	22
2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	23
2.6.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.6.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
2.6.4 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	26
2.6.5 Entitas Pelaporan Keuangan	27
2.6.6 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	27
2.6.7 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas LKPD	30
2.7 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran	32
2.7.1 Penelitian Terdahulu.....	32
2.7.2 Kerangka Pemikiran	41
2.8 Hipotesis Penelitian	46

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	47
3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian	47
3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian	47
3.4 Oprasionalisasi Variabel	48
3.5 Metode Penarikan Sampel	51
3.6 Metode Pengumpulan Data	51
3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data	52
3.7.1 Uji Kualitas Data	53
3.7.2 Statistika Deskriptif	54
3.7.3 Uji Asumsi Klasik	54
3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda	55
3.7.5 Uji Hipotesis	56

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	57
4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bogor	57
4.1.2 Kegiatan BPKAD Kabupaten Bogor	57
4.1.3 Struktur Organisasi BPKAD Kabupaten Bogor	58
4.1.4 Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Bogor	58
4.2 Hasil Pengumpulan Data	65
4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden	65

4.2.2 Deskripsi Data Variabel	69
4.3 Analisis Data	105
4.3.1 Hasil Uji Kualitas Data	105
4.3.2 Hasil Uji Statistika Deskriptif	108
4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik	109
4.3.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	112
4.3.5 Hasil Uji Hipotesis	113
4.4 Pembahasan	116
4.4.1 Penerapan SAKD sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	116
4.4.2 Penerapan SAP sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	117
4.4.3 Pemanfaatan TI sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	118
4.4.4 SPI sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	119
4.4.5 Penerapan SAKD, Penerapan SPI, Pemanfaatan TI, dan SPI secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	120
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	
5.1 Simpulan	122
5.2 Saran	123
DAFTAR PUSTAKA	125
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	128
LAMPIRAN	130

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	32
Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel	48
Tabel 4.1 Data Kuesioner Penelitian	65
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	65
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia	66
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan	66
Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Latar Belakang	67
Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Lama Bekerja	67
Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Bagian di BPKAD	68
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAKD ..	105
Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP	105
Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan TI	106
Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel SPI	106
Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas LKPD	107
Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas	108
Tabel 4.14 Hasil Uji Statistika Deskriptif.....	108
Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Data	110
Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas Data	110
Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda	112
Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (uji t)	113
Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (uji F)	115
Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)	115

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	45
Gambar 4.1 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Penerpan SAKD	69
Gambar 4.2 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Penerpan SAKD	70
Gambar 4.3 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Penerpan SAKD	70
Gambar 4.4 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Penerpan SAKD	71
Gambar 4.5 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Penerpan SAKD	71
Gambar 4.6 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Penerpan SAKD	72
Gambar 4.7 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Penerpan SAKD	72
Gambar 4.8 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Penerpan SAKD	73
Gambar 4.9 Deskripsi Pernyataan Variabel Penerpan SAKD	74
Gambar 4.10 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Penerpan SAKD	75
Gambar 4.11 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Penerpan SAKD	75
Gambar 4.12 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Penerpan SAKD	76
Gambar 4.13 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Penerpan SAKD	76
Gambar 4.14 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Penerpan SAKD	77
Gambar 4.15 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Penerpan SAKD	77
Gambar 4.16 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Penerpan SAKD	78
Gambar 4.17 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Penerpan SAKD	78
Gambar 4.18 Deskripsi Pernyataan 9 Variabel Penerpan SAKD	79
Gambar 4.19 Deskripsi Pernyataan 10 Variabel Penerpan SAKD	79
Gambar 4.20 Deskripsi Pernyataan 11 Variabel Penerpan SAKD	80
Gambar 4.21 Deskripsi Pernyataan 12 Variabel Penerpan SAKD	80
Gambar 4.22 Deskripsi Pernyataan 13 Variabel Penerpan SAKD	81
Gambar 4.23 Deskripsi Pernyataan 14 Variabel Penerpan SAKD	81
Gambar 4.24 Deskripsi Pernyataan Variabel Penerpan SAKD	83
Gambar 4.25 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Penerpan SAKD	84
Gambar 4.26 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Penerpan SAKD	84
Gambar 4.27 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Penerpan SAKD	85
Gambar 4.28 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Penerpan SAKD	85
Gambar 4.29 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Penerpan SAKD	86
Gambar 4.30 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Penerpan SAKD	86
Gambar 4.31 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Penerpan SAKD	87
Gambar 4.32 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Penerpan SAKD	87
Gambar 4.33 Deskripsi Pernyataan Variabel Penerpan SAKD	88
Gambar 4.34 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Penerpan SAKD	89
Gambar 4.35 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Penerpan SAKD	89
Gambar 4.36 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Penerpan SAKD	90
Gambar 4.37 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Penerpan SAKD	90
Gambar 4.38 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Penerpan SAKD	91
Gambar 4.39 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Penerpan SAKD	91

Gambar 4.40 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Penerpan SAKD	92
Gambar 4.41 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Penerpan SAKD	92
Gambar 4.42 Deskripsi Pernyataan 9 Variabel Penerpan SAKD	93
Gambar 4.43 Deskripsi Pernyataan 10 Variabel Penerpan SAKD	93
Gambar 4.44 Deskripsi Pernyataan 11 Variabel Penerpan SAKD	94
Gambar 4.45 Deskripsi Pernyataan 12 Variabel Penerpan SAKD	94
Gambar 4.46 Deskripsi Pernyataan 13 Variabel Penerpan SAKD	95
Gambar 4.47 Deskripsi Pernyataan Variabel Penerpan SAKD	97
Gambar 4.48 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Penerpan SAKD	98
Gambar 4.49 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Penerpan SAKD	98
Gambar 4.50 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Penerpan SAKD	99
Gambar 4.51 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Penerpan SAKD	99
Gambar 4.52 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Penerpan SAKD	100
Gambar 4.53 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Penerpan SAKD	100
Gambar 4.54 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Penerpan SAKD	101
Gambar 4.55 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Penerpan SAKD	101
Gambar 4.56 Deskripsi Pernyataan 9 Variabel Penerpan SAKD	102
Gambar 4.57 Deskripsi Pernyataan 10 Variabel Penerpan SAKD	102
Gambar 4.58 Deskripsi Pernyataan 11 Variabel Penerpan SAKD	103
Gambar 4.59 Deskripsi Pernyataan Variabel Penerpan SAKD	104
Gambar 4.6 Diagram <i>Scatterplot</i>	111

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kuesioner	130
Lampiran 2	Hasil Kuesioner	138
Lampiran 3	Struktur Organisasi dan Data Pegawai	144
Lampiran 4	Surat Pernyataan	145

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pada saat ini perkembangan Akuntansi Sektor Publik (ASP) di Indonesia sangat bertumbuh dengan cepat setelah masa reformasi. Perkembangan ini dipengaruhi oleh meningkatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga baik pusat maupun daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala keseluruhan aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak yang memberi amanah yang mempunyai hak dan kewenangan dalam meminta pertanggungjawaban pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Mardiasmo (2009).

Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai sistem pemerintahannya. Dengan menerapkan sistem pemerintahan tersebut masing-masing daerah memiliki wewenang dalam mewujudkan desentralisasi yang sesungguhnya, serta dengan maksud dapat mempercepat kelangsungan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan diberlakukannya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah, secara langsung kewenangan akan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah otonom. Pemberian kewenangan tersebut untuk dapat mengatur serta mengawasi pengelolaan keuangan yang baik dan tepercaya, sehingga laporan atas pengelolaan keuangan daerah tersebut dapat bersifat transparan dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel diharapkan dapat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah ini sebagaimana merupakan bagian dari sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*).

Berdasarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, bahwa upaya dalam mempertanggungjawabkan atas wewenang yang telah diberikan yaitu dengan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) ini dapat dipergunakan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, agar dapat mengetahui pengelolaan keuangan yang telah dilakukan apakah dikerjakan dengan sangat baik atau tidak. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus sesuai dengan kriteria karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu dengan relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami. Dengan diterapkannya kriteria tersebut dalam laporan keuangan yang disajikan berarti pemerintah daerah dapat mewujudkan transparansi dan

akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerahnya. Manfaat dari laporan keuangan pemerintah adalah dapat memberikan informasi mengenai pengelolaan laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan dalam pengambilan keputusan pada pemangku kepentingan, sehingga laporan keuangan dapat disajikan secara berkualitas.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang berkualitas dapat tercermin dari hasil pemeriksaan audit berupa pendapat atau opini atas kewajaran informasi keuangan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Di dalam pemberian opini tersebut terdapat beberapa tahapan dari yang tertinggi sampai dengan tahapan yang terendah untuk penilaian laporan keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Tahapan-tahapan opini tersebut yaitu:

1. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang diterbitkan apabila laporan keuangan dianggap dapat memberikan hasil informasi yang terbebas dari salah saji material. Apabila laporan keuangan diberikan opini wajar tanpa pengecualian itu artinya pemerintah telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.
2. Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) adalah opini audit yang diterbitkan apabila sebagian besar informasi yang dihasilkan dalam laporan keuangan bebas dari salah saji material, kecuali pada item-item tertentu yang menjadi pengecualian. Pendapat tersebut dapat menunjukkan adanya ketidakwajaran untuk item-item tertentu, tetapi tidak mempengaruhi kewajaran dari laporan keuangan secara keseluruhan.
3. Opini Tidak Wajar (TW) adalah opini audit yang diterbitkan apabila laporan keuangan mengandung salah saji yang material. Jika laporan keuangan diberikan opini tersebut, artinya laporan keuangan pemerintah diragukan kebenarannya yang dapat menyesatkan dalam pengambilan keputusan.
4. Opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) untuk opini tersebut dapat diberikan apabila auditor tidak dapat meyakini apakah laporan keuangan wajar atau tidak.

Selain tercermin dari hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Laporan Keuangan yang berkualitas dapat dilihat pula dari telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 disusun dengan melalui sistem akuntansi pemerintah daerah, serta hasil dari informasi keuangan tidak terdapat penyimpangan dari peraturan perundang-undangan, dan dapat disajikan secara tepat waktu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

Fenomena umum mengenai kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia saat ini menarik untuk dikaji lebih dalam lagi. Badan Pemeriksa Keuangan telah melakukan audit atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) selama 5 tahun, dari tahun 2015-2019. Hasil pemeriksaan Keuangan Daerah yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan tahun 2020 atas 541 (100%) laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan hasil yang baik pada setiap tahunnya, hal ini didukung oleh data dari Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa persentase Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dari tahun 2015-2019 mendapat peningkatan atas opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Sedangkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) mengalami penurunan dari tahun ketahun. Hal tersebut dapat dilihat dari Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Perkembangan Opini LKPD Tahun 2015-2019

Tahun	OPINI								Jumlah
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
2015	313	58	194	36	4	1	31	5	542
2016	378	70	141	26	0	0	23	4	542
2017	411	76	113	21	0	0	18	3	542
2018	443	82	86	16	0	0	13	2	542
2019	485	90	50	9	0	0	6	1	541
Rataan	406	75.2	116.8	21.6	0.8	0.2	18.2	3	541.8

Sumber: bpk.go.id (2020)

Meskipun terdapat kenaikan proporsi opini WTP dan diikuti dengan penurunan proporsi opini WDP, TW, dan TMP. Dari data tersebut pemerintah daerah masih perlu untuk meningkatkan kompetensi dalam penyajian laporan keuangan dengan benar-benar mencerminkan karakteristik kualitatif yang dapat ditandai dengan penerbitan opini WTP dalam persentase yang tinggi. Penyajian suatu laporan keuangan yang wajar yaitu merupakan gambaran dari hasil pertanggungjawaban atas laporan keuangan yang lebih baik.

Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa penyebab dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang belum memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) disebabkan karena masih terdapat kelemahan dari penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum sesuai, seperti terdapat kelemahan dari Sistem Pengendalian Internal (SPI), dan kelemahan pelaporan keuangan yang disebabkan dari ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah masih kurang optimal dan seluruhnya masih belum memenuhi kriteria andal dan relevan. Untuk dapat tercapai opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah dengan keterbukaan dalam menyajikan dan mengungkapkan seluruh transaksi keuangan

yang dilakukan, juga seluruh kekayaan yang dikuasai oleh pemerintah daerah. Keterbukaan tersebut perlu di dukung dengan adanya bukti-bukti yang relevan dan *valid* agar dapat ditelusuri dengan dilakukan pengujian oleh badan pemeriksa keuangan.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dari pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah yang relevan, andal, dapat dibandingkan, juga dapat dipahami, serta diperolehnya opini wajar tanpa pengecualian. Entitas pemerintah harus menerapkan faktor-faktor yang berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Mahmudi (2016) Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan sebagai proksi dari faktor yang berperan penting dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dan dapat dipercaya atau dapat dikatakan berkualitas. Dengan menerapkan sistem akuntansi keuangan daerah tersebut dengan baik, maka kualitas dari laporan keuangan akan semakin baik pula. Begitupun sebaliknya apabila penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah lemah maka akan menyebabkan hasil dari laporan keuangan menjadi tidak andal dan tidak relevan dalam pengambilan keputusan. Karena sistem akuntansi keuangan daerah, pada dasarnya merupakan satu kesatuan apabila tidak diterapkan akan sulit dalam memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Hal lain yang mendukung teori di atas adalah sejalan dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 6 Ayat 2 yang menjelaskan bahwa dalam meningkatkan Keandalan suatu Laporan Keuangan akan selalu berhubungan erat dengan keandalan dari Penerapan Sistem Akuntansi keuangan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah yang bersangkutan. Sistem Akuntansi Keuangan perlu dikembangkan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta mempertimbangkan kondisi pendukung yang diperlukan, terutama personil, dukungan pemanfaatan teknologi informasi, prosedur dan tata kerja, bagan perkiraan standar, dan lembaga atau organisasi pendukung. Penerapan Sistem Akuntansi keuangan tersebut harus selalu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan serta sesuai dengan tingkat kompleksitas kegiatan bidang keuangan ataupun pada bidang teknis. Sistem Akuntansi Pemerintah untuk tingkat Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan. Sedangkan untuk tingkat Pemerintah Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota yang mengacu pada peraturan daerah tentang pengelolaan keuangan daerah dan berpedoman pada peraturan pemerintah mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun teori tersebut tidak sejalan dengan kenyataan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan menurut

Mokoginta, Lambey, dan Pontoh (2017) bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dari ketidak sejalan tersebut memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Dalam upaya mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik adalah dengan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang dapat disusun dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai proksi dari faktor yang dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Menurut Mahmudi (2016) dan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan adalah salah satu aspek penting yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintahan. Serta menjadi persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan yaitu dengan memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang harus selalu diterapkan dalam memperoleh hasil laporan keuangan yang berkualitas. Penjelasan tersebut berbeda dengan kenyataan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmala dan Salisa (2017) bahwa standar akuntansi pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan menurut Yanti, Made, dan Wahyu (2020) bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Maka dari itu, peneliti harus meneliti lebih dalam lagi mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 6 Ayat 2, faktor lain yang berperan penting terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah faktor Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dengan adanya pemanfaatan dari teknologi informasi tersebut dapat membantu dalam mendukung keberhasilan dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah agar dapat bekerja secara optimal dalam meningkatkan keandalannya. Maka dari itu, pemanfaatan teknologi informasi dapat meningkatkan pula kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah. Penjelasan tersebut berbeda dengan kenyataan dari hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harnoni (2016) bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan menurut Alifa (2017) bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Faktor terakhir yang berperan sebagai proksi dalam mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Pengendalian Internal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Pasal 33 Ayat 1 yang menjelaskan bahwa untuk meningkatkan Keandalan Laporan Keuangan pemerintah dan Kinerja pemerintah sebagaimana telah diatur dalam peraturan tersebut. Maka untuk setiap entitas pelaporan dan akuntansi wajib menyelenggarakan Sistem Pengendalian Internal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait. Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai mengenai pencapaian dari tujuan pemerintah daerah yang dapat tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program serta kegiatan, juga dengan terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila sistem pengendalian internal lemah atau tidak andal, maka akan sulit dalam mendeteksi segala kecurangan proses akuntansi yang nantinya dapat menyebabkan bukti audit yang diterima dari data akuntansi tersebut menjadi tidak relevan. Sebab fakta dilapangan menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal menjadi prioritas yang utama bagi pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan ataupun oleh lembaga-lembaga yang lainnya. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sedangkan menurut Mene, Karamoy, dan Warongan (2018) bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut mengakibatkan adanya ketidak sejalan antara peraturan dengan perbedaan kenyataan dari hasil penelitian terdahulu yang memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai Sistem Pengendalian Internal.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor menunjukkan bahwa selama 5 tahun berturut-turut yaitu tahun 2015-2019 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bogor selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dengan diperolehnya opini WTP maka dapat dikatakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dapat dikatakan berkualitas selama 5 tahun tersebut. Konsistensi yang dimilikinya merupakan suatu pencapaian yang sangat baik yang diterima oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hal tersebut membuktikan adanya keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah, dan menjadi cerminan bagi Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini WTP. Mengingat masih ada Pemerintah Daerah yang belum memperoleh opini WTP dengan begitu laporan keuangan yang dihasilkan dapat dikatakan belum berkualitas. Beberapa Pemerintah Daerah yang lain justru masih memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan bahkan ada yang memperoleh opini Tidak Menyatakan

Pendapat (TMP) untuk laporan keuangannya. Tentunya seluruh Pemerintah Daerah pasti ingin setiap Laporan Keuangan yang diterbitkannya dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan memperoleh opini WTP agar dapat dipertanggungjawabkan dihadapan publik.

Dari uraian di atas, memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk menelisik lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang diduga mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal. Mengingat kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah dengan diperolehnya opini WTP sangat penting bagi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor).”**

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah terdapat ketidak konsistenan antara teori ataupun peraturan pemerintah yang berlaku saat ini dengan kenyataan perbedaan dari hasil penelitian terdahulu. Teori dan Peraturan Pemerintah tersebut menjelaskan untuk dapat menghasilkan dan meningkatkan laporan keuangan yang berkualitas, maka pemerintah daerah harus menerapkan suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal yang sangat andal dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Namun hal tersebut tidak sejalan dengan kenyataan dari hasil penelitian terdahulu, yang menyatakan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah akan tetapi ada juga yang menyatakan hasilnya berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Adanya ketidak sejalan antara teori dengan kenyataan dari hasil penelitian terdahulu memberikan ketertarikan bagi peneliti untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah, khusus nya Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Mengingat Kabupaten Bogor selalu memperoleh opini WTP selama 5 tahun berturut-turut terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah nya. Hal tersebut membuktikan adanya keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah dan menjadi

cerminan bagi Pemerintah Daerah yang laporan keuangannya belum berkualitas dan belum memperoleh opini WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor?
2. Bagaimana pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor?
3. Bagaimana pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor?
4. Bagaimana pengaruh Sistem Pengendalian Internal sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor?
5. Bagaimana pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk menganalisis dan memberikan penjelasan mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.
2. Untuk menganalisis pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.

3. Untuk menganalisis pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.
4. Untuk menganalisis pengaruh Sistem Pengendalian Internal sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.
5. Untuk menganalisis Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadikan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi pihak instansi agar lebih dapat mengetahui seberapa besar Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.

1.4.2 Kegunaan Akademis

Secara akademis di harapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, mengenai Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor.

2. Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan atau akademik, dan dapat dijadikan referensi ataupun tambahan data bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti dengan topik yang sama serta dapat meningkatkan kemajuan di bidang akuntansi umumnya, serta di bidang akuntansi pemerintahan pada khususnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Akuntansi Sektor Publik

2.1.1 Pengertian Akuntansi Sektor Publik

Menurut Bastian (2010) Akuntansi Sektor Publik yaitu merupakan sebuah mekanisme teknik serta analisis akuntansi yang baik untuk dijalankan dalam mengelola dana masyarakat. Pengelolaan tersebut dilaksanakan pada lembaga tinggi negara, pada departemen dibawahnya, pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan yayasan sosial. Laporan keuangan sektor publik merupakan bagian yang sangat penting dari suatu proses akuntabilitas publik.

Sedangkan menurut Mahmudi (2016) Akuntansi Sektor Publik memiliki suatu peran yang tidak kecil dalam melakukan pengelolaan keuangan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik, pemeriksaan, dan perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*). Dengan memiliki dampak yang baik pada sektor yang lain seperti sektor swasta dan sektor sosial.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi sektor publik yaitu merupakan sebuah teknik dan analisis akuntansi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam melakukan pengelolaan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan sektor publik serta pemeriksaan dan perwujudan mengenai tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik lagi, menerapkan serta memperlakukan akuntansi pada suatu wilayah publik. Akuntansi sektor publik lebih berfokus pada kesejahteraan publik bukan berfokus untuk mencari suatu keuntungan, maka dari itu organisasi sektor publik sangat berbeda dengan sektor organisasi yang lainnya.

2.1.2 Tujuan Akuntansi Sektor Publik

Menurut Mardiasmo (2009) tujuan utama dari akuntansi sektor publik adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Manajemen (*Management Control*)

Sebagai pengendalian manajemen, akuntansi untuk sektor publik memberikan suatu informasi yang dibutuhkan oleh lembaga publik dalam pengelolaan secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Akuntansi sektor publik juga selalu memberikan informasi dalam penggunaan sumber daya yang sudah dianggarkan dalam lembaga publik.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Sebagai akuntabilitas, akuntansi untuk sektor publik ini dapat memberikan suatu informasi penting yang dibutuhkan oleh manajer lembaga publik. Dengan adanya informasi ini nantinya dapat digunakan manajer sebagai laporan pertanggungjawaban untuk seluruh bidang di bawah kewenangannya. Dalam informasi ini dapat digunakan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja yang telah dilakukan oleh lembaga pemerintah. Maka dari itu, publik dapat melihat transparansi penggunaan anggaran publik oleh lembaga pemerintahan.

2.2 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

2.2.1 Pengertian Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Akuntansi merupakan suatu alat ukur dalam memberikan informasi yang kuantitatif yang bersifat keuangan, maka dari itu *output* akuntansi adalah informasi keuangan. Informasi keuangan sendiri lebih dikenal dalam bentuk laporan keuangan. Pada sektor publik informasi keuangan akuntansi daerah digunakan oleh Pemerintah Daerah sendiri sebagai pihak internal dan pihak diluar Pemerintah Daerah sebagai pihak eksternal seperti, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat serta Masyarakat dalam pengambilan keputusan. Untuk pengelolaan keuangan daerah pemerintah sangat memerlukan sistem akuntansi keuangan dalam pengelolaan dana dan juga transaksi ekonomi yang semakin beragam.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pasal 232, menyatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah merupakan suatu rangkaian proses yang harus dilakukan dengan diawali pengumpulan data, dilanjutkan dengan pencatatan, pengikhtisaran, serta sampai dengan dilakukannya pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dapat dipergunakan secara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi komputer.

Penjelasan lain berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menjelaskan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah adalah suatu proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi dan pelaporan transaksi ekonomi seperti keuangan dari suatu daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi sebuah informasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan dilaksanakan dalam prinsip akuntansi yang berterima umum.

Penerapan dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah suatu proses atau cara menerapkan, melaksanakan sesuatu yang telah ditetapkan. Maka dari itu, berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas apabila dikaitkan dengan penerapan dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yaitu merupakan suatu sistem akuntansi yang terdiri dari beberapa rangkaian prosedur atau proses pelaksanaan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 sebagai pedoman dari Pemerintah Daerah mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan yang nantinya dapat menghasilkan suatu laporan yang relevan, andal, dan tepat waktu serta dapat menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan yang dapat dipergunakan oleh pihak internal pemerintah daerah maupun pihak eksternal pemerintah daerah dalam rangka pengambilan keputusan.

2.2.2 Prosedur Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dengan ditetapkannya suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi di dalam suatu sistem akuntansi pemerintah, yang menyelenggarakan entitas pelaporan maupun entitas akuntansi tersebut adalah sistem akuntansi pemerintah daerah.

Menurut Mahmudi (2016) Sistem akuntansi pemerintah daerah setidaknya meliputi sistem dan prosedur akuntansi penerimaan kas, prosedur akuntansi pengeluaran kas, prosedur akuntansi aset tetap, dan prosedur akuntansi selain kas.

1. Prosedur akuntansi penerimaan kas

Prosedur akuntansi pada penerimaan kas yaitu meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan keuangan dalam hal proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan dengan suatu penerimaan kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat dilakukan secara manual atau dapat juga dengan menggunakan aplikasi komputer.

Sistem dan Prosedur penatausahaan Penerimaan Kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yaitu terdiri dari:

- a. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan (BP).
- b. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi daerah melalui Bendahara Penerimaan Pembantu (BPP).
- c. Sistem dan prosedur penatausahaan penerimaan kas dari pajak dan retribusi daerah melalui badan, lembaga keuangan, dan Kantor pos yang ditunjuk oleh pemerintah daerah.

2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas

Prosedur akuntansi pada pengeluaran kas yaitu meliputi pencatatan, penggolongan, peringkasan dan pelaporan keuangan dalam hal proses mempertanggungjawabkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berkaitan dengan suatu pengeluaran kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat dilakukan secara manual atau dapat juga dengan menggunakan aplikasi komputer.

Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas yaitu dilakukan dengan mekanisme:

- a. Penerbitan SP2D Langsung (LS)
- b. Penerbitan SP2D Uang Persediaan (US)
- c. Penerbitan SP2D Ganti Uang (GU)
- d. Penerbitan SP2D Tambahan Uang Persediaan (TU)

Dalam mekanisme penerbitan tersebut harus didahului dengan proses penatausahaan di tingkat SKPD berupa pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) oleh Bendahara Pengeluaran.

3. Prosedur akuntansi aset tetap atau barang milik daerah

Prosedur akuntansi pada aset tetap yaitu meliputi pencatatan, pelaporan akuntansi atas perolehan, penggolongan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset yang dikuasai atau yang digunakan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) secara manual atau komputerisasi.

Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap atau Barang Milik Daerah (BMD) terdiri atas beberapa bagian, antara lain:

- a. Sistem dan Prosedur Pengadaan Aset Tetap
- b. Sistem dan Prosedur Penyimpanan dan Penyaluran
- c. Sistem dan Prosedur Pemanfaatan
- d. Sistem dan Prosedur Pemeliharaan
- e. Sistem dan Prosedur tuntutan Perbendaharaan dan Ganti Rugi
- f. Sistem dan Prosedur Perubahan Status Hukum

4. Prosedur akuntansi selain kas

Prosedur akuntansi selain kas yaitu meliputi serangkaian proses yang dimulai dari pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang dapat dilakukan secara manual ataupun dapat juga dengan menggunakan aplikasi komputer.

2.2.3 Mekanisme Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2016) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 pasal 232 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah meliputi:

1. Pencatatan atau penggolongan yaitu kegiatan pengidentifikasian dan pengukuran dalam bentuk dokumen atau bukti transaksi dan bukti pencatatan. Kegiatan pencatatan tersebut dilakukan dalam buku jurnal. Dari buku jurnal tersebut kemudian dikelompokkan berdasarkan jenisnya ke dalam akun buku besar.
2. Pengikhtisaran atau peringkasan yaitu dengan penyusunan neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi, pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo, dan pembuatan ayat jurnal pembalik.
3. Pelaporan yaitu proses selesai dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan entitas pelaporan menyusun laporan keuangan.

2.3 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

2.3.1 Pengertian Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menjelaskan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian pada laporan keuangan pemerintah, dalam bentuk Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) dan disusun sesuai dengan acuan pada kerangka konseptual akuntansi pemerintah.

Sedangkan menurut Mahmudi (2016) Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan aspek yang sangat dibutuhkan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pelaporan keuangan pemerintah, yang di dalamnya berisikan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan suatu laporan keuangan kepada organisasi pemerintahan.

Dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut sangat diperlukan suatu pemahaman yang baik dari setiap aparatur-aparatur yang menyusun serta menyajikan suatu laporan keuangan baik di pemerintahan pusat maupun di pemerintahan daerah beserta instansi-instansi terkait. Untuk setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah wajib untuk dilaksanakan, tetapi dalam menerapkan kebijakan tersebut terlebih dahulu perlu untuk dipahami beberapa dasar pemikiran yang penting yang nantinya diharapkan dapat membantu penerapan standar akuntansi pemerintahan.

2.3.2 Manfaat Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Terdapat 5 manfaat dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan adalah:

- “1. Standar akuntansi pemerintahan dapat digunakan oleh seorang akuntan keuangan di pemerintahan sebagai pedoman dalam melakukan penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintahan
2. Standar akuntansi digunakan oleh seorang auditor sebagai kriteria audit dalam menentukan apakah laporan keuangan yang disajikan tersebut telah sesuai dengan standar akuntansi yang mengaturnya
3. Standar akuntansi dapat digunakan oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan dan menghindari kesalahan dalam menginterpretasikan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan
4. Standar skuntansi dapat diperlukan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan meningkatkan konsistensi, daya banding, keterpahaman, relevansi, dan keandalan dari laporan keuangan
5. Standar akuntansi dapat menjadi acuan dalam penyusunan dari sistem akuntansi, dikarenakan sistem akuntansi harus sesuai dengan standar akuntansi.” Mahmudi (2016)

2.3.3 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Standar Akuntansi Pemerintahan memuat 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan bagi pemerintah, yaitu:

1. PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Dengan penyajian laporan keuangan yang baik dan benar maka informasi yang disediakan dapat menjadi informasi yang relevan mengenai posisi keuangan serta seluruh transaksi yang dilakukan suatu entitas selama satu periode pelaporan. Hal yang paling utama dalam menyajikan suatu laporan keuangan adalah untuk mengetahui nilai suatu sumber daya ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional, menilai suatu kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi pada suatu entitas, dan dapat membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Informasi dari suatu laporan keuangan bertujuan untuk memenuhi segala kebutuhan informasi pengguna dalam penilaian akuntabilitas serta dalam pembuatan keputusan.

2. PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Pada laporan realisasi anggaran berbasis kas informasi yang disediakan di dalamnya yaitu mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi yang disediakan oleh laporan realisasi anggaran dapat berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang diterima dalam mendanai segala kegiatan pemerintah pada periode mendatang.

3. PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas

Laporan arus kas yaitu merupakan bagian dari suatu laporan keuangan yang dapat menyajikan suatu informasi penerimaan dan informasi pengeluaran kas selama periode tertentu yang dapat diklasifikasikan sesuai dengan aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan,

4. PSAP 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan tersebut yaitu dimaksudkan agar dapat dipahami secara luas dan mudah oleh pembaca, tidak hanya terbatas bagi pembaca tertentu ataupun hanya untuk manajemen entitas pelapor saja. Penyajian dalam catatan atas laporan keuangan tersebut harus secara sistematis dan di dalamnya harus meliputi penjelasan atau analisis atas nilai-nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas.

5. PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan

Akuntansi persediaan yaitu persediaan diakui pada saat potensi dari manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah serta mempunyai nilai yang dapat diukur dengan andal. Pengakuan persediaan yaitu pada saat diterima atau hak dari kepemilikannya berpindah.

6. PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi

Akuntansi investasi yaitu merupakan suatu pengeluaran dari kas atau aktiva yang dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria yang ditetapkan.

7. PSAP 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Akuntansi aset tetap diklasifikasikan seperti aset tetap tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan dan konstruksi dalam pengerjaan. Pengakuan pada aset tetap yaitu pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilai nya dapat diukur secara andal. Agar dapat diakui sebagai aset tetap harus dapat memenuhi kriteria berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan atau 1 tahun, biaya perolehan dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual melainkan untuk digunakan.

8. PSAP 08 tentang Akuntansi Konstruksi dalam Pengerjaan

Pada akuntansi konstruksi dalam pengerjaan yaitu mencakup tanah, peralatan, mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap yang lainnya dengan proses memperolehnya membutuhkan waktu yang cukup lama.

9. PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Akuntansi kewajiban dapat diakui untuk sebagian besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan atau telah dilakukan untuk dapat menyelesaikan kewajiban yang ada sampai dengan saat ini, dan dari perubahan atas kewajiban tersebut memiliki nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan begitu andal.

10. PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan

Koreksi kesalahan yaitu koreksi yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya. Kas dapat mempengaruhi posisi pada kas ataupun tidak, dan dilakukan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

11. PSAP 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian yaitu terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

12. PSAP 12 tentang Laporan Operasional

Laporan operasional yaitu yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang dapat menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat ataupun daerah dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur-unsur yang mencakup dalam laporan operasional adalah pendapatan laporan operasional, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

2.4 Pemanfaatan Teknologi Informasi

2.4.1 Pengertian Pemanfaatan Teknologi Informasi

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam pasal 1 menjelaskan Teknologi Informasi merupakan suatu teknik untuk dapat mengumpulkan data, menyimpan data, memproses data, mengumumkan, menganalisis data, dan yang terakhir untuk menyebarkan suatu informasi.

Pendapat lain menurut Sutabri (2014) bahwa teknologi informasi yaitu merupakan suatu teknologi yang dapat digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan berbagai cara agar dapat menghasilkan informasi yang berkualitas, informasi yang berkualitas yaitu informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, serta pemerintahan dan merupakan sebuah informasi yang strategis dalam hal pengambilan keputusan. Bahwa dengan adanya pemanfaatan dari teknologi informasi yaitu diharapkan untuk dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan yang nantinya dapat menghasilkan suatu laporan keuangan yang andal dan tepat waktu. Kewajiban dari pemerintah daerah yaitu untuk mengembangkan serta memanfaatkan kemajuan suatu teknologi informasi dalam hal meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerahnya kepada pelayanan publik. Pemanfaatan dari komponen teknologi informasi yang berbasis komputer yaitu terdiri dari, perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer.

Berdasarkan dari beberapa pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yaitu dapat dikatakan sebagai teknik untuk dapat membantu proses pelaporan keuangan. Karena teknologi informasi

merupakan gabungan dari teknologi komunikasi dan teknologi komputer yang berbentuk sistem perangkat lunak dan perangkat keras yang dapat digunakan untuk mengolah, memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, dan memanipulasi data dengan segala macam cara yang dilakukan agar mendapatkan suatu informasi yang berkualitas. Dengan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu, yang nantinya dari suatu teknologi informasi tersebut dapat memberikan hasil informasi yang strategis untuk pengambilan suatu keputusan.

2.4.2 Tujuan Teknologi Informasi

Dilihat dari beberapa definisi mengenai teknologi informasi di atas, bahwa teknologi informasi mempunyai tujuan umum yaitu untuk dapat memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam hal melakukan pekerjaannya. Dan teknologi informasi bertujuan untuk membantu mempercepat proses, mengurangi tingkat kesalahan, mengolah data dan akhirnya menghasilkan suatu informasi yang dapat mendukung dalam pengambilan suatu keputusan. Hal-hal tersebut menjadi penyebab dari diciptakannya teknologi informasi dan dengan adanya teknologi informasi tersebut memberikan dampak bagi manusia yang menjadikan pekerjaan manusia menjadi lebih mudah lagi dan efisien.

2.4.3 Komponen-komponen Teknologi Informasi

Menurut Kadir dan Triwahyuni (2013) bahwa teknologi informasi memiliki beberapa komponen, komponen tersebut yaitu meliputi Perangkat Keras (*Hardware*), Perangkat Lunak (*Software*), dan Orang (*Brainware*). Penjelasan untuk komponen-komponen Teknologi Informasi di atas adalah:

1. Perangkat Keras (*Hardware*) yaitu merupakan kumpulan peralatan fisik yang dipakai dalam sistem teknologi informasi seperti *processor*, *monitor*, *keyboard*, dan *printer* yang mampu untuk menerima data dan informasi, memproses dan menampilkan data tersebut. Perangkat keras juga merupakan indikator dalam menggambarkan suatu kelengkapan yang dapat mendukung untuk terlaksananya penggunaan teknologi informasi, selain perangkat keras (*hardware*) hal lain yang dapat meliputi yaitu sistem jaringan.
2. Perangkat Lunak (*Software*) yaitu merupakan kumpulan dari program-program komputer yang digunakan untuk mengendalikan komputer sehingga dapat melakukan tindakan yang dikehendaki pembuatnya. Serta di dalamnya dapat membuat suatu Pengelolaan Data Keuangan yang merupakan indikator dalam menggambarkan suatu pemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan pengelolaan data keuangan secara sistematis dan juga dengan secara menyeluruh.
3. Orang (*Brainware*) yaitu merupakan suatu elemen yang paling penting di dalam teknologi informasi tersebut, komponen *brainware* dapat berupa

pemakai, perawatan atau pemelihara, dan pembuat sistem. Perawatan tersebut merupakan suatu indikator dalam menggambarkan adanya jadwal untuk pemeliharaan peralatan dengan secara teratur terhadap perangkat suatu teknologi informasi guna untuk mendukung dalam kelancaran pekerjaan.

2.5 Sistem Pengendalian Internal

2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bahwa definisi dari sistem pengendalian internal pemerintah yaitu merupakan suatu proses yang integral pada suatu tindakan serta kegiatan yang dapat dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pimpinan dan seluruh pegawai untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi dengan melalui beberapa kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset negara, dan ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sistem pengendalian internal pemerintah dapat diselenggarakan secara menyeluruh pada lingkungan pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Mahmudi (2016) bahwa sistem pengendalian internal merupakan bagian yang integral dari sistem akuntansi pemerintahan dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik. Sistem pengendalian internal juga merupakan tanggungjawab manajemen dan seluruh pegawai dengan melaksanakannya secara konsisten dan berkesinambungan. Suatu instansi pemerintah harus memiliki dan meningkatkan sistem pengendalian internal yang baik. Dengan begitu dapat meminimalisir terjadinya korupsi, penyelewengan keuangan negara, dan pemborosan anggaran.

Berdasarkan dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah yaitu bukan merupakan hasil akhir melainkan merupakan suatu proses yang terus menerus sehingga sistem pengendalian internal harus selalu direviu, diuji, dan diperbaiki. Sistem pengendalian internal dapat dilakukan oleh seluruh pegawai dari tingkatan yang tertinggi sampai dengan yang terbawah pada lingkungan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah agar dapat memberikan suatu keyakinan yang memadai atas tercapainya segala tujuan secara efektivitas dan efisiensi operasi serta dalam pelaporan keuangan.

2.5.2 Tujuan Sistem Pengendalian Internal

Apabila dilihat dari pengertian sistem pengendalian internal pemerintah, bahwa pemerintah mempunyai tujuan umum dalam tercapainya operasi organisasi secara efektivitas dan efisiensi. Namun, sebenarnya tujuan tersebut hanyalah salah satu dari tujuan umum sistem pengendalian internal pemerintah sebab sistem pengendalian internal pemerintah memiliki 6 macam tujuan adalah:

- “1 Melindungi aset negara baik aset fisik maupun data
- 2 Memelihara catatan dan dokumen secara rinci dan akurat
- 3 Menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
- 4 Memberikan jaminan yang memadai bahwa laporan keuangan pemerintah telah disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintahan)
- 5 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasi organisasi
- 6 Menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Mahmudi (2016)

Dari tujuan-tujuan di atas dapat memberikan suatu isyarat bahwa apabila sistem pengendalian internal pemerintah dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka sistem pengendalian internal akan memberikan jaminan bahwa seluruh penyelenggara negara akan melaksanakan segala tugasnya dengan jujur dan taat kepada seluruh peraturan, yang nantinya tidak akan terjadi penyelewengan yang akan berdampak pada kerugian suatu negara. Hal tersebut dapat dibuktikan dari laporan keuangan pemerintah yang andal yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian dari BPK.

2.5.3 Elemen Sistem Pengendalian Internal

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di dalamnya telah dijabarkan bahwa elemen atau unsur-unsur dari sistem pengendalian internal pemerintah terdiri dari 5 unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*)

Seorang pimpinan dari suatu instansi dan seluruh pegawai instansi diwajibkan untuk selalu menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian di dalam organisasinya secara menyeluruh yang nantinya menimbulkan perilaku yang positif serta kondusif dan sangat mendukung bagi penerapan sistem pengendalian internal yang sehat dalam lingkungan pekerjaannya, dengan melalui beberapa faktor-faktor yang dapat membentuk lingkungan pengendalian pada suatu entitas. Faktor-faktor tersebut yaitu:

- a. Penegakan integritas dan nilai suatu etika
- b. Komitmen terhadap kompetensi
- c. Kepemimpinan yang kondusif
- d. Pembentukan struktur organisasi sesuai dengan kebutuhan
- e. Pendelegasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat dan benar
- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan kepemimpinan Sumber Daya Manusia (SDM) yang tepat atau benar
- g. Perwujudan dalam peranan aparat pengawasan intern pemerintah yang sangat efektif
- h. Hubungan kerja yang baik dengan Instansi Pemerintahan yang terkait

2. Penilaian Risiko (*Risk Assessment*)

Tujuan dari pelaporan suatu keuangan yaitu untuk proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang terkait dengan entitas dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berterima umum. Maka dari itu, seorang pimpinan instansi pemerintah sangat wajib untuk melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko tersebut yaitu meliputi:

a. Identifikasi Risiko

Dalam mengidentifikasi risiko sekurang-kurangnya dapat dilaksanakan dengan menggunakan suatu metodologi yang sesuai dengan tujuan suatu instansi pemerintahan serta sesuai dengan tujuan untuk meningkatkan segala kegiatan secara komprehensif, dengan menggunakan mekanisme yang mendukung dalam mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal serta penilaian dari faktor yang lain untuk dapat meningkatkan risiko.

b. Analisis Risiko

Analisis risiko tersebut dapat dilaksanakan untuk menentukan dampak dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap suatu pencapaian dari tujuan instansi pemerintah. Dalam menentukan suatu tingkat risiko yang dapat diterima oleh seorang pimpinan instansi pemerintah yaitu harus dengan menerapkan prinsip kehati-hatian.

3. Kegiatan Pengendalian

Seorang pimpinan suatu instansi pemerintah wajib dalam menyelenggarakan suatu kegiatan pengendalian yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, juga sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian tersebut yaitu meliputi:

- a. Reviu atas kinerja instan pemerintah yang bersangkutan
- b. Pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM)
- c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
- d. Pengendalian fisik atas aset
- e. Penetapan dan reviu atas indikator serta ukuran suatu kinerja
- f. Pemisahan suatu fungsi
- g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang sangat penting
- h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian
- i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
- j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
- k. Dokumentasi yang baik dalam sistem pengendalian internal serta transaksi dan kejadian penting

4. Informasi dan Komunikasi

Informasi merupakan suatu data yang telah diolah yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk penyelenggaraan tugas serta fungsi dari

instansi pemerintah. Sedangkan komunikasi yaitu merupakan suatu proses dalam penyampaian pesan ataupun informasi dengan menggunakan suatu simbol tertentu secara langsung ataupun tidak langsung dalam mendapatkan umpan balik. Oleh sebab itu, seorang pimpinan instansi pemerintah sangat wajib untuk mengidentifikasi, mencatat, dan mengomunikasikan suatu informasi yang wajib untuk diselenggarakan secara efektif atau dalam bentuk dan waktu yang sangat tepat. Dalam menyelenggarakan komunikasi yang efektif tersebut pimpinan instansi pemerintah harus menyelenggarakan dengan cara sebagai berikut:

- a. Menyediakan serta memanfaatkan berbagai bentuk mengenai sarana komunikasi
- b. Mengelola, mengembangkan, dan juga memperbarui suatu sistem informasi secara terus menerus

5. Pemantauan Pengendalian Internal

Pemantauan pengendalian internal yaitu merupakan suatu proses dalam penilaian mutu kinerja pada sistem pengendalian internal serta suatu proses yang memberikan keyakinan terhadap temuan audit dan evaluasi yang lainnya agar segera ditindak lanjut. Oleh sebab itu, seorang pimpinan instansi pemerintah sangat wajib dalam melakukan pemantauan sistem pengendalian internal. Pemantauan atas sistem pengendalian internal dapat dilaksanakan dengan melalui pemantauan yang berkelanjutan, evaluasi yang terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil dari audit dan reviu yang lainnya.

Pondasi dari keseluruhan komponen-komponen tersebut yaitu komponen lingkungan pengendalian. Sedangkan untuk komponen informasi dan komunikasi yaitu merupakan saluran terhadap ketiga komponen pengendalian yang lainnya.

2.5.4 Pengawasan Intern atas Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Instansi Pemerintah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang di dalamnya menyatakan bahwa pengawasan internal dapat dilakukan oleh aparat pengawasan internal pemerintah. Aparat pengawasan internal pemerintah tersebut dapat melaksanakan pengawasan internal dengan melalui beberapa tahapan yaitu sebagai berikut:

1. Audit

Audit tersebut dimaksudkan merupakan suatu proses identifikasi suatu masalah analisis dan evaluasi terhadap bukti yang dapat dilakukan secara independen, objektif, dan *professional* dengan berdasarkan standar audit yang telah ada, dalam menilai suatu kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada instansi pemerintah.

2. **Reviu**
Reviu disini dapat dimaksudkan berupa penelaahan ulang yang didapat dari bukti-bukti atas suatu kegiatan yang telah dilakukan dalam memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan beberapa ketentuan standar, rencana, dan Norma yang telah ditetapkan sebelumnya.
3. **Evaluasi**
Evaluasi tersebut dimaksudkan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang membandingkan suatu hasil atau suatu prestasi dalam kegiatan dengan standar, rencana serta Norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor-faktor yang telah mempengaruhi seluruh keberhasilan atau bahkan seluruh kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai segala tujuannya.
4. **Pemantauan**
Pemantauan tersebut dimaksudkan suatu proses penilaian dalam kemajuan suatu program ataupun kegiatan dalam mencapai segala tujuan yang telah ditetapkannya.
5. **Kegiatan Pengawasan yang Lainnya**
Kegiatan pengawasan yang lainnya tersebut dimaksudkan berupa sosialisasi dengan melalui beberapa tahapan seperti pengawasan, pendidikan dan pelatihan dalam pengawasan, pembimbingan dan konsultasi, pengelolaan hasil pengawasan, dan pemaparan hasil dari pengawasan.

2.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.6.1 Pengertian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menyatakan bahwa Laporan Keuangan yaitu merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dikerjakan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporannya. Laporan keuangan dapat digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang telah dimanfaatkan dalam melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, dengan menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu dalam menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Mahmudi (2016) Laporan Keuangan yaitu merupakan instrument yang sangat penting bagi pemerintah dalam menunjukkan transparansi dan akuntabilitas. Laporan keuangan juga merupakan alat pengendalian dan bentuk pertanggungjawaban manajemen kepada pihak internal maupun pihak eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Sedangkan menurut Mardiasmo (2009) Laporan keuangan organisasi sektor publik merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam terciptanya akuntabilitas sektor publik. Dengan adanya tuntutan yang semakin tinggi terhadap pelaksanaan akuntabilitas publik, hal tersebut dapat menimbulkan

implikasi bagi manajemen sektor publik untuk memberikan informasi kepada publik. Informasi tersebut adalah berupa laporan keuangan.

Berdasarkan dari beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa suatu Laporan Keuangan Pemerintah merupakan komponen instrument yang sangat penting untuk dapat disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku pada saat ini. Laporan keuangan juga dapat menunjukkan akuntabilitas dan transparansi terhadap hasil dari segala proses dalam pencatatan akuntansi dengan berupa data keuangan dan aktivitas dari pemerintah. Laporan Keuangan menyediakan suatu catatan mengenai informasi dari suatu entitas pada suatu periode akuntansi dan harus disajikan dengan memenuhi segala karakteristik kualitatif dari laporan keuangan pemerintah daerah.

2.6.2 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dilihat dari definisi laporan keuangan pemerintah daerah bahwa suatu laporan keuangan harus menyajikan informasi untuk laporan keuangan pemerintah daerahnya secara berkualitas. Laporan keuangan pemerintah daerah yang berkualitas harus memenuhi karakteristik kualitatif dari laporan keuangan pemerintah daerah. Karakteristik kualitatif tersebut yaitu merupakan suatu ukuran normatif yang harus di wujudkan dalam informasi akuntansi agar dapat memenuhi seluruh tujuannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif tersebut adalah:

1. Relevan

Laporan Keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalam laporan keuangan tersebut dapat mempengaruhi suatu keputusan pengguna dalam hal mengevaluasi peristiwa pada masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau bahkan mengoreksi hasil evaluasi mereka dimasa lalu. Karakteristik informasi yang relevan yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan manfaat umpan balik. Laporan keuangan yang berkualitas yaitu apabila dapat memberikan manfaat dalam mengevaluasi kinerja pada masa lalu dan memperbaiki kinerjanya dimasa yang datang.
- b. Memberikan manfaat prediktif. Informasi dalam laporan keuangan dapat memberikan manfaat bagi para pengguna dalam memprediksi dimasa yang datang dengan berdasarkan hasil pada masa lalu dan kejadian pada masa kini. Laporan keuangan yang berkualitas juga dapat memberikan suatu manfaat dalam memprediksi kondisi keuangan, memprediksi kebutuhan keuangan, dan memprediksi kinerja pada masa yang datang.

- c. Disajikan tepat waktu. Informasi dapat disajikan secara tepat waktu maka nantinya dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan suatu keputusan.
- d. Lengkap. Apabila informasi akuntansi keuangan pemerintah dapat disajikan dengan secara lengkap dan mencakup seluruh informasi akuntansi, maka dapat mempengaruhi dalam pengambilan suatu keputusan dengan memperhatikan kendala-kendala yang ada.

2. Andal

Suatu laporan keuangan apabila ingin dikatakan andal yaitu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut harus dapat terbebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan secara material, dan menyajikan secara fakta atau jujur, serta dapat diverifikasi. Suatu informasi laporan keuangan mungkin dapat dikatakan relevan, namun jika hakikatnya tidak dapat diandalkan maka untuk penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat dikatakan menyesatkan. Karakteristik bagi informasi yang andal yaitu meliputi:

- a. Penyajian jujur, suatu informasi menggambarkan dengan jujur transaksi ataupun peristiwa lainnya yang seharusnya dapat disajikan atau secara wajar diharapkan dapat disajikan, karena laporan keuangan yang dapat dikatakan berkualitas yaitu dapat terbebas dari yang namanya salah saji material dan tidak ditemukan adanya manipulasi atas laporan keuangan.
- b. Dapat diverifikasi, suatu informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diverifikasi, apabila pengujiannya dapat dilakukan lebih dari satu kali, hal tersebut dilakukan agar menunjukkan kesimpulan dengan perbedaan yang tidak terlalu jauh. Laporan keuangan yang berkualitas apabila dapat diverifikasi atas kebenarannya dengan melalui proses audit independen.
- c. Netralitas, suatu informasi dapat dikatakan netral apabila diarahkan pada kebutuhan yang umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu saja. Laporan keuangan disajikan tidak boleh bersifat bias terhadap suatu kepentingan kelompok tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Suatu informasi dalam laporan keuangan dapat lebih berguna lagi apabila dapat dibandingkan dengan laporan keuangan pada periode sebelumnya atau dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas pelaporan yang lainnya. Perbandingan tersebut dapat dilakukan dengan perbandingan secara internal maupun perbandingan dengan secara eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan apabila suatu entitas yang diperbandingkan dapat menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang selaras untuk tahun ke tahunnya. Sedangkan, perbandingan secara eksternal dapat dilakukan apabila suatu entitas yang diperbandingkan tersebut dapat menerapkan kebijakan akuntansi yang selaras dari tahun ke tahun.

4. Dapat dipahami

Suatu informasi yang tersaji di dalam suatu laporan keuangan dapat dipahami, apabila bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batasan pemahaman dapat mempelajari informasi yang dimaksud.

2.6.3 Tujuan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut, suatu laporan keuangan pemerintah daerah secara umum memiliki tujuan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerahnya yaitu untuk menyajikan dan menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang dapat bermanfaat bagi para penggunanya juga dapat berguna dalam pengambilan suatu keputusan serta dapat menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya. Namun, sebenarnya tujuan tersebut hanyalah bentuk inti dari tujuan umum laporan keuangan pemerintah sebab laporan keuangan pemerintah memiliki 6 macam tujuan yang meliputi:

1. Dapat menyediakan suatu informasi mengenai posisi dari sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
2. Dapat menyediakan suatu informasi atas perubahan posisi dari sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah
3. Dapat menyediakan suatu informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi
4. Dapat menyediakan suatu informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi segala kebutuhan kasnya
5. Dapat menyediakan suatu informasi mengenai potensi pemerintah dalam membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah
6. Dapat menyediakan suatu informasi yang dapat berguna dalam mengevaluasi suatu kemampuan entitas pelaporan dalam hal pendanaan untuk segala aktivitasnya.

2.6.4 Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pengguna laporan keuangan pemerintah yaitu pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu laporan pemerintah, maka dari itu pengguna laporan keuangan pemerintah dapat didefinisikan dengan melalui penelusuran bahwa siapa saja pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pemerintahan tersebut.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah yang di dalamnya memberitahukan bahwa terdapat beberapa kelompok atau pihak-pihak yang utama dalam penggunaan laporan keuangan pemerintah walaupun tidak terbatas, kelompok-kelompok atau pihak-pihak tersebut yaitu meliputi:

1. Masyarakat
2. Wakil rakyat, lembaga pengawasan, dan lembaga pemeriksa
3. Pihak berperan langsung dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman
4. Dan yang terakhir yaitu Pemerintah

2.6.5 Entitas Pelaporan Keuangan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang menjelaskan bahwa Entitas Pelaporan yaitu suatu unit pemerintah daerah yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan setiap upaya yang telah dilakukannya serta suatu hasil yang akan dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingannya. Kepentingan-kepentingan tersebut yaitu antara lain:

1. Akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan atas kebijakan yang telah dipercayakan kepada suatu entitas pelaporan untuk mencapai segala tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya secara periodik.
2. Manajemen merupakan seorang yang dapat membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam suatu periode pelaporan tertentu, sehingga dapat memudahkan suatu fungsi dari perencanaan, pengendalian aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah untuk kepentingan seluruh publik.
3. Transparansi dapat berguna untuk memberikan suatu informasi keuangan yang terbuka serta jujur kepada publik atau masyarakat berdasarkan dengan pertimbangan, bahwa masyarakat mempunyai hak dalam mengetahui secara terbuka dan secara menyeluruh atas pertanggungjawaban suatu pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakannya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Keseimbangan antar generasi yaitu dapat membantu bagi para pengguna untuk mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah untuk periode pelaporannya dalam membiayai seluruh pengeluaran yang telah dialokasikan.
5. Evaluasi kinerja digunakan dalam hal mengevaluasi kinerja pada suatu entitas pelaporan, terutama mengevaluasi dalam hal penggunaan sumber daya ekonomi yang telah dikelola oleh pemerintah untuk mencapai suatu kinerja yang telah direncanakan sebelumnya.

2.6.6 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa laporan suatu keuangan yaitu terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Realisasi Anggaran yaitu merupakan gambaran dari perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan serta

mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah daerah yang dapat menunjukkan ketaatannya terhadap APBD. Unsur-unsur yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan dari laporan realisasi anggaran yaitu merupakan semua bentuk penerimaan yang berasal dari rekening kas umum negara ataupun rekening kas umum daerah yang dapat menambah saldo anggaran lebih pada tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu untuk dibayarkan kembali oleh pemerintah.
- b. Belanja yaitu merupakan semua pengeluaran yang berasal dari rekening kas umum Negara atau daerah yang dapat mengurangi pada saldo anggaran lebih pada periode tahun anggaran yang bersangkutan serta tidak dapat diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah.
- c. Transfer yaitu merupakan segala penerimaan atas pengeluaran dari satu entitas pelaporan kepada entitas pelaporan yang lainnya, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Surplus atau Defisit laporan realisasi anggaran yaitu merupakan selisih lebih atau selisih kurang antara pendapatan serta belanja yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran selama satu periode.
- e. Pembiayaan yaitu merupakan suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dalam mendukung suatu investasi yang telah direncanakan pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- f. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran yaitu merupakan selisih lebih atau selisih kurang antara realisasi pendapatan-LRA dengan belanja serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBN ataupun APBD selama satu periode pelaporan.

2. Laporan Perubahan SAL (Saldo Anggaran Lebih)

Dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yaitu merupakan suatu laporan yang dapat menyajikan suatu informasi kenaikan saldo serta penurunan untuk saldo anggaran lebih dan harus disajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya. Unsur-unsur yang disajikan dalam laporan perubahan saldo anggaran lebih yaitu sebagai berikut:

- a. Saldo Anggaran Lebih
- b. Penggunaan Saldo Anggaran Lebih
- c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran pada tahun berjalan
- d. Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya
- e. Lain-lain; dan
- f. Saldo Anggaran Lebih Akhir

3. Neraca

Neraca yaitu merupakan suatu laporan yang dapat menyajikan informasi pada posisi keuangan suatu entitas pelaporan meliputi aset, utang atau kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Unsur-unsur yang disajikan dalam neraca yaitu sebagai berikut:

- a. Aset yaitu merupakan suatu sumber daya ekonomi yang dapat dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah pada peristiwa atau kejadian pada masa lalu, dan darimana manfaat ekonomi, sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh. Aset tersebut di klasifikasikan kedalam dua jenis yang pertama yaitu aset lancar dan yang kedua yaitu aset tidak lancar.
- b. Kewajiban, yaitu merupakan suatu utang yang harus dibayar dan timbul dari sebuah peristiwa pada masa lalu dan dalam penyelesaiannya menimbulkan aliran keluar atau dana keluar dari pemerintah daerah. Kewajiban tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu terdapat kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek.
- c. Ekuitas, dapat dihasilkan yaitu dari selisih antara aset dengan kewajiban pada tanggal laporan, yang merupakan suatu kekayaan bersih pemerintah.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yaitu merupakan suatu laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan dari operasionalisasi keuangan pada entitas pelaporan yang dapat tercermin di dalam suatu pendapatan operasional, beban operasional, surplus atau defisit non operasional, pos luar biasa, dan surplus atau defisit laporan operasional. Masing-masing penjelasan dari operasional keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Laporan Operasional yaitu merupakan suatu hak dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah yang boleh untuk diakui sebagai dari penambah ekuitas di dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu untuk dibayarkan kembali.
- b. Beban Operasional yaitu merupakan suatu penurunan yang dapat terjadi dari manfaat ekonomi atau dari potensi jasa dalam suatu periode pelaporan tersebut yang dapat menurunkan ekuitas dengan berupa pengeluaran, konsumsi aset, atau dengan timbulnya suatu kewajiban.
- c. Surplus atau Defisit sebelum pos luar biasa yaitu merupakan penjumlahan atau pengurangan dengan kegiatan non operasional.
- d. Pos Luar Biasa yaitu merupakan pendapatan atau beban luar biasa yang dapat terjadi karena kejadian atau operasi yang tidak biasa, tidak diharapkan untuk sering terjadi, dan berada diluar kendali atau dari pengaruh entitas yang bersangkutan.
- e. Surplus atau Defisit Laporan Operasional yaitu merupakan suatu selisih dari pendapatan laporan operasional dengan beban selama satu periode pelaporan dan setelah diperhitungkan dengan surplus atau defisit dari kegiatan non operasional serta dari pos luar biasa.

5. Pelaporan Arus Kas

Laporan Arus Kas yaitu merupakan suatu laporan yang dapat menyajikan hasil informasi dari laporan arus kas mengenai sumber penggunaan, perubahan kas, setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Arus kas dibagi menjadi dua ada arus kas masuk dan arus kas keluar juga dapat diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan aktivitas pendanaan. Untuk masing-masing penjelasan dari aktivitas tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Aktivitas Operasi yaitu merupakan suatu aktivitas dari penerimaan dan pengeluaran kas yang dapat ditujukan dalam kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.
- b. Aktivitas Investasi yaitu merupakan aktivitas dari penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi yang lainnya yang tidak termasuk kedalam setara kas.
- c. Aktivitas Pendanaan yaitu merupakan aktivitas dari penerimaan kas yang perlu untuk dibayar kembali dan pengeluaran kas yang dapat diterima kembali yang mengakibatkan adanya perubahan, baik dalam jumlah ataupun komposisi utang serta piutang jangka panjang.

6. Laporan Perubahan Ekuitas

Dalam laporan tersebut dapat menyajikan suatu informasi mengenai perubahan ekuitas yang meliputi:

- a. Ekuitas Awal
- b. Surplus atau Defisit Laporan Operasional pada periode yang bersangkutan
- c. Suatu koreksi terjadi diakibatkan oleh penambahan ataupun pengurangan dari ekuitas, yang disebabkan dari dampak kumulatif dan diakibatkan dari perubahan kebijakan akuntansi serta beberapa koreksi kesalahan mendasar yaitu, koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode yang sebelumnya, koreksi pada perubahan nilai aset tetap karena adanya revaluasi aset tetap.

7. Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan tersebut yaitu merupakan laporan yang menyajikan suatu informasi dari penjelasan atau daftar terinci atas suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas dalam rangka untuk pengungkapan yang memadai.

2.6.7 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah:

- a. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Suatu informasi keuangan daerah yang disajikan sangat membutuhkan suatu sistem untuk penyusunannya. Sistem tersebut yaitu sistem akuntansi keuangan daerah yang merupakan serangkaian prosedur pelaporan keuangan mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dalam proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang nantinya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

b. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam penerapan standar akuntansi pemerintah yang sesuai dengan pemenuhan atas kewajiban pelaporan pertanggungjawaban keuangan daerah yaitu merupakan penentu dari kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Salah satu aspek terpenting dalam peningkatan kualitas tata kelola keuangan Negara dan pelaporan keuangan pemerintah yaitu dengan standar akuntansi pemerintah. Menurut Mahmudi (2016) dengan menerapkan standar akuntansi pemerintah yang baik, maka secara otomatis laporan keuangan yang disajikan juga berkualitas.

c. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Dengan adanya pemanfaatan teknologi informasi dapat membantu dalam proses pelaporan keuangan yang nantinya dapat menghasilkan laporan keuangan yang handal dan tepat waktu. Dengan diwajibkannya suatu pemerintah daerah dalam memanfaatkan teknologi informasi untuk dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola keuangan daerah dan dapat menyalurkan informasi keuangan daerah yang dihasilkan kepada pelayanan publik.

d. Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal yaitu merupakan suatu proses yang dapat dilakukan oleh dewan direksi suatu entitas, manajemen serta personil yang lainnya yang dapat memberikan keyakinan memadai atas tercapainya suatu tujuan dari efektivitas dan efisiensi dalam proses akuntansi.

Berdasarkan hasil dari kajian penjelasan di atas mengenai penentuan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal.

2.7 Penelitian Terdahulu dan Kerangka Pemikiran

2.7.1 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Harnoni (2016) "Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerinatah Daerah (Studi Empiris SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas"	Independen: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerinatah Daerah.	Metode Analisis data yang digunakan yaitu berupa Analisis regresi linear berganda dan Uji Statistika Deskriptif, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Menggunakan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji Autokorelasi. Uji Hipotesis yang digunakan yaitu uji t, dan Koefisien Determinasi (R^2). Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Alat analisis data menggunakan SPSS.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Variabel Kapasitas Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Variabel Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
2	Fatmala dan Salisa (2017) "Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara"	Independen: Sistem Pengendalian Intern, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan . Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Daerah.	Metode analisis data yang digunakan adalah uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan sistem pengendalian intern, prinsip pengelolaan keuangan daerah, dan penerapan standar akuntansi pemerintahan, berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Secara parsial sistem pengendalian intern dan prinsip pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Sedangkan penerapan standar akuntansi pemerintahan tidak berpengaruh terhadap

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			pengambilan sampel menggunakan teknik	kualitas laporan keuangan daerah.
			<i>Purposive sampling</i> . .Alat analisis data menggunakan SPSS versi 23.	
3	Pujanira (2017) “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy”	Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode Analisis data yang digunakan adalah berupa Uji coba instrumen terdiri dari uji validitas data dan uji reliabilitas data. Uji validitas menggunakan rumus korelasi <i>Product Moment</i> dari <i>Pearson Correlation</i> . Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah DIY.
4	Alifa (2017) “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan	Metode Analisis data yang digunakan yaitu berupa analisis deskriptif dan verifikatif dengan menggunakan data primer. Teknik <i>sampling</i> yang digunakan adalah dengan <i>nonprobability sampling</i> . Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji validitas, uji	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi secara parsial dan simultan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah <i>survey</i> pada SKPD di Kota Cimahi.

	Daerah (Survey	Pemerintah Daerah.	reliabilitas, analisis korelasi berganda,	
No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	pada SKPD di Kota Cimahi”		Analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi.	
5	Mokoginta, Lambey, dan Pontoh (2017) “Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah”	Independen: Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah	Metode Analisis data yang digunakan yaitu berupa Uji Kualitas Data yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas Data. Uji Hipotesis yang digunakan menggunakan, Uji Koefisien Determinasi (R ²), dan Analisis Regresi Linear berganda.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah.
6	Mene, Karamoy, dan Warongan (2018) “Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara”	Independen: Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Metode Analisis data yang digunakan yaitu dengan pengujian regresi linear berganda. Uji Asumsi Klasik yaitu dengan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas. Dan menggunakan Uji Regresi dan Uji Hipotesis. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan sampel yang digunakan yaitu dengan metode <i>purposive sampling</i> . Alat analisis data menggunakan SPSS versi 23.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.
7	Utami (2018) “Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan	Independen: Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar	Metode Analisis data yang digunakan yaitu berupa analisis regresi linier berganda. Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, analisis regresi berganda selanjutnya untuk uji hipotesis	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, penerapan

	Standar	Akuntansi	menggunakan uji	standar akuntansi
No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan)”	Pemerintah. Dependensi: Kualitas Laporan Keuangan.	Koefisien determinasi, uji t dan uji f.	Pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Dan selain itu secara bersama-sama kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem akuntansi keuangan dan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.
8	Ratnasari (2018) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)”	Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode Analisis data yang digunakan yaitu berupa Uji Kualitas Data yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas. Uji Hipotesis yang digunakan menggunakan Uji Koefisien Determinasi (R ²), Uji t dan Uji F, dan Analisis Regresi Linear berganda.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian internal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, kompetensi staf akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian internal, dan kompetensi staf akuntansi secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
9	Ardianto dan Eforis (2019) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian	Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah,	Metode Analisis data yang dilakukan berupa Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas. Uji Hipotesis yang digunakan menggunakan Uji	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan

	Intern		Koefisien	
No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
	Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang)”	dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Determinasi (R ²), Uji t dan Uji F. Alat analisis data menggunakan SPSS.	keuangan pemerintah daerah, sistem pengendalian intern pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem akuntansi keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, dan Penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
10	Hartono dan Ramdany (2020) “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan”	Independen: Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan.	Penelitian ini menggunakan model Kuantitatif Kausalitas dengan Teknik Sampel nonprobability sampling. Metode Analisis data yang dilakukan berupa Statistik Deskriptif, Uji Kualitas Data yang terdiri dari Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari Uji Normalitas Data, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas dan Uji Autokorelasi. Uji Regresi berupa Analisis Regresi Sederhana/Parsial dan Analisis Regresi Berganda. Uji Hipotesis yang digunakan	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah, Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, dan Sumber Daya Manusia secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

No	Nama Peneliti, Tahun, dan Judul	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
			menggunakan Uji r	
			(<i>Product Moment Pearson</i>), Uji Koefisien Determinasi (R ²), Uji t dan Uji F. Alat analisis data menggunakan SPSS versi 24.	
11	Yanti, Made, dan Wahyu (2020) “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang)”	Independen: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi, dan Pengawasan Keuangan. Dependen: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.	Metode Analisis Data menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengambilan sampel menggunakan teknik <i>purposive sampling</i> . Dan dalam pengujiannya menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesisnya menggunakan uji koefisien determinasi (R ²), uji statistik F dan uji statistik t. Alat Analisis data menggunakan SPSS versi 22.	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel SAP, SIA dan pengawasan keuangan berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan pengawasan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian dari tabel penelitian terdahulu, berikut ini adalah perbedaan dan persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti:

1. Harnoni (2016)

“Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas).” Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada unit analisis dan lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada Kabupaten Kepulauan Anambas, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti berlokasi pada Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan yaitu Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal dan variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta menggunakan metode pengumpulan data yang serupa yaitu dengan menggunakan kuesioner. Dalam

pengujiannya sama-sama menggunakan Analisis regresi linear berganda dan Uji Statistika Deskriptif, Uji Validitas dan Uji Reliabilitas. Menggunakan Uji Asumsi Klasik yang terdiri dari uji normalitas, multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. Uji Hipotesis yang digunakan yaitu uji t, dan Koefisien Determinasi (R^2). Dalam pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

2. Fatmala dan Salisa (2017)

“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara.” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada unit analisis dan lokasi penelitiannya, penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah dan berlokasi di Kabupaten Jepara, sedangkan penelitian yang peneliti teliti yaitu pada BPKAD di Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian intern, dan variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan daerah. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi linear berganda, uji koefisien determinasi, uji statistik F, dan uji statistik t. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*.

3. Pujanira (2017)

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DIY.” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada unit analisis dan lokasi penelitiannya, penelitian ini pada dinas-dinas Daerah Pemerintahan Daerah DIY, sedangkan penelitian yang peneliti teliti yaitu pada BPKAD di Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta menggunakan metode pengumpulan data yang serupa yaitu dengan menggunakan menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner, dan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan Uji coba instrumen terdiri dari uji validitas data dan uji reliabilitas data. Uji validitas menggunakan rumus korelasi *Product Moment* dari *Pearson Correlation*. Teknik Analisis Data yang digunakan yaitu Analisis Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis.

4. Alifa (2017)

“Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD di Kota Cimahi).”

Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada unit analisis dan lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada Kota Cimahi, sedangkan penelitian yang peneliti teliti berlokasi pada Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan pemanfaatan teknologi informasi serta variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta menggunakan metode pengumpulan data yang serupa yaitu dengan menggunakan kuesioner. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan teknik *nonprobability sampling*. Analisis statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji validitas, uji reliabilitas, analisis korelasi berganda, analisis regresi linier berganda, koefisien determinasi.

5. Mokoginta, Lambey dan Pontoh (2017)

“Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah.” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada Bolaang Mongondow Utara, sedangkan penelitian yang peneliti teliti memiliki lokasi penelitiannya di Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan sistem pengendalian intern dan sistem akuntansi keuangan daerah serta variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah. Serta sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner, dengan pendekatan kuantitatif, dan unit analisis penelitiannya yaitu BPKAD. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data. Uji hipotesis yang digunakan adalah uji koefisien determinasi (R^2), dan analisis regresi linear berganda.

6. Mene, Karamoy, dan Warongan (2018)

“Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara.” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada Halmahera Utara, sedangkan penelitian yang peneliti teliti memiliki lokasi penelitiannya di Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah daerah serta variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner, dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, dan sampel yang digunakan yaitu dengan metode *purposive sampling*. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas data. Dengan menggunakan uji hipotesis dan analisis regresi linear berganda.

7. Utami (2018)

“Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat

Daerah Kabupaten Pacitan).” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang di lakukan yaitu pada unit analisis dan lokasi penelitiannya, penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah dan berlokasi di Kabupaten Pacitan, sedangkan penelitian yang peneliti teliti yaitu pada BPKAD di Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah dan penerapan standar akuntansi pemerintahan serta variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Uji kualitas data yang digunakan adalah uji validitas dan uji reliabilitas, analisis regresi berganda selanjutnya untuk uji hipotesis menggunakan uji koefisien determinasi, uji t dan uji f.

8. Ratnasari (2018)

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kota Bandung).” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada lokasi penelitian, penelitian ini berlokasi pada Kota Bandung, sedangkan penelitian yang peneliti teliti memiliki lokasi penelitiannya di Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal serta variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner dan Sama-sama menggunakan unit analisis penelitiannya yaitu BPKAD. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan menggunakan, uji koefisien determinasi (R²), uji t dan uji F, dan analisis regresi linear berganda.

9. Ardianto dan Eforis (2019)

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu pada metode sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan metode sampel dengan *convenience sampling*, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti menggunakan metode *purposive sampling* dan Penelitian ini memilih unit analisis dan lokasi penelitiannya pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang, sedangkan penelitian yang akan peneliti teliti memiliki unit analisis dan lokasi penelitiannya di BPKAD Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah serta variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan statistik deskriptif. Uji kualitas data yang terdiri dari uji

validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis yang digunakan menggunakan, uji koefisien determinasi (R^2), uji t dan uji F.

10. Hartono dan Ramdany (2020)

“Pengaruh SAP, Pengendalian Intern dan Kompetensi SDM terhadap Kualitas Laporan Keuangan.” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada metode sampel yang digunakan penelitian ini menggunakan metode sampel dengan *convenience sampling*, sedangkan penelitian yang peneliti teliti menggunakan metode *purposive sampling*. Serta Penelitian ini memilih unit analisis dan lokasi penelitiannya di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan di Jakarta, sedangkan penelitian yang peneliti teliti memiliki unit analisis dan lokasi penelitiannya di BPKAD Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan standar akuntansi pemerintahan dan pengendalian intern serta variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan. Serta sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner, dan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan statistik deskriptif, uji kualitas data yang terdiri dari uji validitas dan uji reliabilitas. Uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji regresi berupa Analisis Regresi Berganda. Uji hipotesis yang digunakan menggunakan, Uji Koefisien Determinasi (R^2), Uji t dan Uji F.

11. Yanti, Made, dan Wahyu (2020)

“Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang).” Perbedaan penelitian ini dengan dengan penelitian yang dilakukan yaitu pada unit analisis dan lokasi penelitiannya, penelitian ini pada Organisasi Perangkat Daerah dan berlokasi di Kota Malang, sedangkan penelitian yang peneliti teliti yaitu pada BPKAD di Kabupaten Bogor.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan berada pada variabel independen yang digunakan standar standar akuntansi pemerintahan serta variabel dependennya yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Serta sama-sama menggunakan metode pengumpulan data dengan kuesioner. Dalam pengujiannya sama-sama menggunakan analisis regresi linier berganda. Pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Dan dalam pengujiannya menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, uji heteroskedastisitas dan uji hipotesisnya menggunakan uji koefisien determinasi (R^2), uji statistik F dan uji statistik t.

2.7.2 Kerangka Pemikiran

2.7.2.1 Pengaruh penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Laporan keuangan Pemerintah Daerah yaitu merupakan bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang harus di proses, disusun dan dihasilkan dari sebuah penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah yang andal yang dapat dikerjakan secara manual ataupun dengan menggunakan aplikasi komputer. Dari proses tersebut diharapkan juga dapat dilakukan dengan benar dan sesuai dengan sistematika akuntansi keuangan daerah sehingga menjadi suatu laporan keuangan yang berpedoman pada prinsip serta standar penyusunan laporan keuangan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dengan adanya penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah yang baik serta informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat menghasilkan suatu informasi yang relevan, andal, dapat dipahami, dan dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya, dengan begitu maka dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Utami (2018) membuktikan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Pujanira (2017) dan Mokoginta, Lambey, dan Pontoh (2017) yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.7.2.2 Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu merupakan suatu acuan dalam penyusunan laporan keuangan, sehingga faktor terpenting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu faktor standar akuntansi pemerintahan. Ketika standar akuntansi pemerintah tersebut telah dipahami dengan baik maka dapat menyajikan suatu laporan keuangan dengan baik dan benar. Suatu entitas pemerintah yang didalamnya telah menerapkan standar akuntansi pemerintah maka menghasilkan suatu laporan keuangan yang sangat dibutuhkan dalam lingkungan pemerintah. Oleh sebab itu, dengan diterapkannya standar akuntansi pemerintah diharapkan semuanya mampu

berjalan dengan terstruktur dan dapat sesuai dengan pedoman yang berlaku sehingga nantinya dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas serta akurat.

Hasil penelitian Hartono dan Ramdany (2020) dan Ardianto dan Eforis (2019) sama-sama membuktikan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh secara signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yanti, Made, dan Wahyu (2020) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Fatmala dan Salisa (2017) menyatakan Standar Akuntansi Pemerintahan secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.7.2.3 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan Teknologi Informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan suatu keandalan dan ketepatan waktu dalam menyajikan laporan keuangan. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk mengolah suatu data agar dapat menghasilkan suatu informasi yang berkualitas dan dapat dicapai dengan peran suatu komponen teknologi, yang nantinya dapat digunakan untuk keperluan pemerintah, bisnis, bahkan keperluan pribadi sehingga mendukung proses dalam pengambilan keputusan untuk laporan keuangan yang berkualitas.

Hasil penelitian Alifa (2017) membuktikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Mene, Karamoy, dan Warongan (2018) menemukan hasil bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Harnoni (2016) menyatakan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.7.2.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Internal sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sistem Pengendalian Internal suatu pemerintah yaitu merupakan bagian terpenting dari suatu proses penyajian laporan keuangan. Dari adanya sistem pengendalian internal tersebut, diharapkan mampu untuk membangun suatu

lingkungan pekerjaan yang baik sehingga dapat memberikan efek yang baik dan positif bagi kinerja pemerintah yang nantinya dapat menyajikan laporan keuangan yang baik pula. Dengan semakin baik penerapan sistem pengendalian internal pemerintah maka semakin meningkat pula kualitas dari laporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian Fatmala dan Salisa (2017) membuktikan bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Mene, Karamoy, dan Warongan (2018) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan Sistem Pengendalian Internal tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.7.2.5 Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

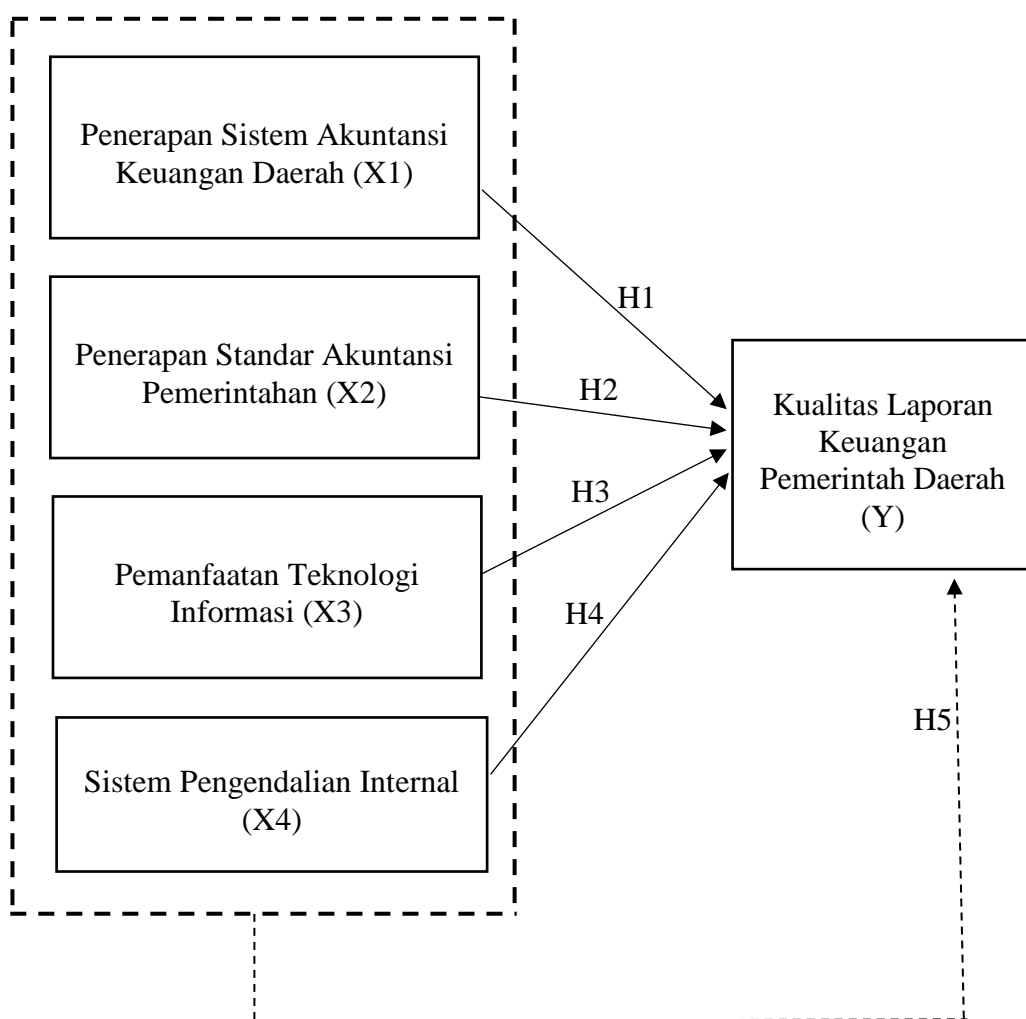
Pemerintah Daerah memiliki hak serta kewajiban untuk mengelola, menyusun dan melaporkan atas penggunaan dana yang telah dilaksanakan dengan cara sistematis pada suatu periode pelaporan. Dalam pengelolaan keuangan daerah dan penyusunan laporan keuangan daerah tersebut sangat membutuhkan penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah hal tersebut dilakukan agar dapat menyampaikan pertanggungjawaban dari laporan keuangan tersebut secara baik dan benar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang merupakan sebagai acuan dalam penyusunan suatu laporan keuangan. Pemerintah Daerah juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan Teknologi Informasi dalam meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Dengan dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam hal pelaporan sehingga dapat mendukung dalam proses pengambilan keputusan dalam laporan keuangan. Selain penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi keuangan, dan pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal juga sangat penting untuk dilakukan dalam mengarahkan, mengawasi, serta mengukur sumber daya suatu organisasi, dan sangat berperan penting dalam mencegah dan mendeteksi segala kecurangan yang akan berdampak dalam menghasilkan suatu laporan keuangan yang berkualitas.

Dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan

Teknologi, dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu, kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

X₁ = Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD)

- X₂ = Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)
- X₃ = Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI)
- X₄ = Variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI)
- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)
- ▶ = Pengaruh Variabel X (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal) secara sendiri-sendiri terhadap Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).
- ▶ = Pengaruh untuk semua Variabel X (Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal) secara bersama-sama terhadap Variabel Y (Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah).

2.8 Hipotesis Penelitian

Hipotesis Penelitian tersebut yaitu merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang masih bersifat praduga dikarenakan masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teori, penelitian sebelumnya, dan kerangka berpikir di atas maka dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

- H1 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai proksi dari faktor
-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H2 : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai proksi dari faktor
-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H3 : Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai proksi dari faktor-faktor yang Mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H4 : Sistem Pengendalian Internal sebagai proksi dari faktor-faktor yang Mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- H5 : Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini yaitu merupakan penelitian verifikatif. Penelitian verifikatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menguji suatu teori atau hasil dari penelitian terdahulu, sehingga dapat diperoleh suatu hasil yang memperkuat atau menggugurkan teori atau hasil penelitian terdahulu. Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian *explanatory survey*. Metode penelitian *explanatory survey* adalah metode yang bertujuan untuk menguji hipotesis, umumnya merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk hubungan antar variabel. Penelitian yang penulis lakukan yaitu mengenai Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor).

3.2 Objek, Unit Analisis, dan Lokasi Penelitian

Objek Penelitian yaitu merupakan suatu hal yang menjadi pusat perhatian dalam penelitian. Objek penelitian ini juga dapat menjadi sasaran dalam suatu penelitian untuk mendapatkan sebuah jawaban ataupun solusi dari suatu permasalahan yang terjadi, serta objek penelitian merupakan objek yang dapat diteliti, dianalisis dan untuk dikaji lebih dalam kemudian ditarik kesimpulannya.

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah berupa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal yaitu sebagai variabel bebas (variabel independen), sedangkan yang menjadi variabel terikat (variabel dependen) adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa *organization*, yaitu sumber data yang unit analisis-nya merupakan divisi atau bidang organisasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor yang berlokasi di Jl. Aman No 1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914.

3.3 Jenis dan Sumber Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif yaitu merupakan penelitian yang datanya berupa angka, jadi peneliti melakukan analisisnya dengan menghitung angka-angka yang ada. Dengan memiliki tujuan untuk menguji suatu hipotesis apakah hasilnya kira-kira dapat terbukti benar atau bahkan hipotesis itu tidak terbukti.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer. Sumber Data Primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya tanpa adanya media perantara. Secara khusus data

primer dikumpulkan oleh peneliti untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian. Data primer dalam penelitian ini yaitu meliputi jawaban dari responden yang diperolehnya melalui penyebaran kuesioner secara langsung mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Internal, dan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara membagikan kuesioner dalam format *link google form* untuk diisi oleh pegawai BPKAD Kabupaten Bogor dengan menggunakan Skala Likert.

3.4 Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi Variabel tersebut sangat dibutuhkan dan diperlukan dalam mengoperasionalkan variabel, sehingga dapat menjadi acuan dalam penggunaan *instrument* penelitian untuk pengolahan data selanjutnya. Untuk mempermudah dalam proses analisis, maka terlebih dahulu penulis dapat mengklasifikasikan variabel-variabel penelitian tersebut ke dalam dua kelompok, yaitu dapat dilihat sebagai berikut:

1. Variabel Independen (variabel tidak terikat atau variabel bebas)

Variabel Independen tersebut merupakan variabel yang menjadi sebab atau merubah dan mempengaruhi variabel yang lain (variabel dependen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independen adalah Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Penerapan Standar akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI).

2. Variabel Dependen (variabel terikat atau variabel tidak bebas)

Variabel Dependen tersebut merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat dari adanya variabel yang lain (variabel independen). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Tabel 3.1 Operasionalisasi Variabel

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Ukuran	Skala
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten)	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	Pencatatan atau Penggolongan	1. Sesuai dengan SAP	Ordinal
			2. Adanya Bukti Transaksi	Ordinal
			3. Dicatat secara berurut	Ordinal
		Pengkhtisaran atau Peringkasan	4. Penyusunan neraca saldo	Ordinal
			5. Adanya jurnal penyesuaian, kertas kerja, jurnal penutup, neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik	Ordinal

Bogor)				
Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Ukuran	Skala
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor)	Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	Pelaporan	6. Kedisiplinan Pembukuan	Ordinal
			7. Dibuat setiap periode akuntansi	Ordinal
			8. Dilaporkan secara konsisten	Ordinal
	Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	PSAP No. 01 Penyajian Laporan Keuangan	1. Berbasis akrual	Ordinal
		PSAP No. 02 Laporan Realisasi Anggaran	2. Pengakuan belanja pada saat pengeluaran	Ordinal
			3. Pengakuan penerimaan pembiayaan pada saat diterima	Ordinal
		PSAP No. 03 Laporan Arus Kas	4. Penyajian laporan arus kas	Ordinal
		PSAP No. 04 Catatan Atas Laporan Keuangan	5. Penyajian Langsung dan susunan dalam CALK	Ordinal
		PSAP No. 05 Akuntansi Persediaan	6. Pengakuan persediaan pada saat diterima	Ordinal
			7. Pencatatan persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik	Ordinal
		PSAP No. 06 Akuntansi Investasi	8. Pengakuan dan klasifikasi investasi	Ordinal
		PSAP No. 07 Akuntansi Aset Tetap	9. Klasifikasi dan pencatatan aset tetap	Ordinal
		PSAP No. 08 Akuntansi Kontruksi Dalam Pengerjaan	10. Pengungkapan kontruksi dalam pengerjaan	Ordinal
		PSAP No. 09 Akuntansi Kewajiban	11. Pengakuan dan pengukuran kewajiban	Ordinal
		PSAP No. 10 Koreksi Kesalahan	12. Pengakuan akuntansi koreksi kesalahan	Ordinal
PSAP No. 11 Laporan Keuangan Konsolidasi	13. Penyajian laporan keuangan konsolidasi	Ordinal		
PSAP No. 12 Laporan Operasional	14. periode pelaporan keuangan dan informasi dalam LO	Ordinal		

Variabel	Sub Variabel (Dimensi)	Indikator	Ukuran	Skala
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor)	Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	Perangkat	1. Komputer yang cukup	Ordinal
			2. Penggunaan Jaringan internet	Ordinal
			3. Pemanfaatan jaringan internet	Ordinal
		Pengelolaan Data Keuangan	4. Komputerisasi	Ordinal
			5. Menggunakan <i>software</i>	Ordinal
			6. Sistem informasi terintegrasi	Ordinal
		Perawatan	7. Pemeliharaan secara teratur	Ordinal
			8. Pendataan peralatan yang rusak	Ordinal
		Sistem Pengendalian Internal (X4)	Lingkungan Pengendalian	1. Penetapan aturan dan standar etika
	2. Standar kompetensi tugas dan fungsi			Ordinal
	3. Menentukan struktur organisasi sesuai bidang			Ordinal
	4. Pendelegasian wewenang			Ordinal
	Penilaian Risiko		5. Identifikasi risiko	Ordinal
			6. Analisis risiko	Ordinal
	Kegiatan Pengendalian		7. Pembinaan SDM	Ordinal
			8. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi	Ordinal
			9. Otorisasi	Ordinal
			10. Dokumentasi yang baik	Ordinal
	Informasi dan Komunikasi		11. Menyediakan sarana komunikasi	Ordinal
			12. Memperbaharui sistem	Ordinal
	Pemanfaatan Pengendalian Internal		13. Evaluasi kekurangan pengendalian internal	Ordinal
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Relevan	1. Nilai umpan balik	Ordinal	
		2. Nilai prediktif	Ordinal	
		3. Tepat waktu	Ordinal	
		4. Lengkap	Ordinal	
	Andal	5. Penyajian jujur	Ordinal	
		6. Andal	Ordinal	
		7. Dapat diverifikasi	Ordinal	
		8. Memenuhi kebutuhan pengguna	Ordinal	
		9. Netralitas	Ordinal	
	Dapat Dibandingkan	10. Dapat dibandingkan	Ordinal	
	Dapat Dipahami	11. Dapat dipahami	Ordinal	

3.5 Metode Penarikan Sampel

“Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.” Sugiyono (2016)

Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor. Dalam pemilihan sampel terdapat teknik *sampling* untuk menentukan sampel mana yang dapat digunakan dalam penelitian ini.

“Teknik *sampling* adalah merupakan teknik dalam pengambilan sampel. Untuk menentukan sampel yang akan digunakan dalam penelitian.” Sugiyono (2016)

Dalam penelitian ini teknik penentuan sampel yang dapat penulis gunakan yaitu didasarkan pada metode *non probability sampling*, yaitu suatu teknik dalam pengambilan sampel yang tidak dapat memberikan suatu peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk menjadi sampel. Pendekatan yang digunakan dalam penarikan sampel adalah dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik tersebut yaitu merupakan teknik penentuan sampel berdasarkan pertimbangan atau karakteristik tertentu, sehingga semua populasi yang memenuhi karakteristik yang ditentukan dapat memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Kriteria sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
2. Pegawai yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dengan usia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun.
3. Pegawai yang bekerja dengan pendidikan terakhir SLTA/SLTP, Diploma, S1 dan S2 pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
4. Pegawai yang bekerja dengan latar pendidikan akuntansi, manajemen, ilmu ekonomi, hukum dan lainnya pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.
5. Pegawai dengan masa jabatan minimal 1 tahun atau lebih.
6. Pegawai yang bekerja pada bagian bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan teknologi informasi, dan bidang aset daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor.

3.6 Metode Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2016) teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang sangat strategis dalam melakukan penelitian, karena tujuan utama

dari penelitian yaitu untuk mendapatkan suatu data penelitian. Dengan adanya teknik pengumpulan data, maka peneliti memperoleh data yang dapat memenuhi standar data yang telah ditetapkannya.

Untuk mengumpulkan data penelitian, penulis menggunakan metode *survey* dengan menggunakan angket atau kuesioner sebagai teknik pengambilan datanya.

“Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan yang tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden.”
Sugiyono (2016)

Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka dan dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui internet. Dalam penelitian ini kuesioner diberikan kepada responden dengan menggunakan *link google form* yang sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan pada sebelumnya, dengan menggunakan skala *Likert* dengan pemberian skor sebagai berikut:

- | | | |
|--------|-----------------------|---------------|
| 1. SS | : Sangat Setuju | Diberi skor 5 |
| 2. S | : Setuju | Diberi skor 4 |
| 3. RG | : Ragu-ragu | Diberi skor 3 |
| 4. TS | : Tidak Setuju | Diberi skor 2 |
| 5. STS | : Sangat Tidak Setuju | Diberi skor 1 |

Sumber: Sugiyono (2016)

3.7 Metode Pengolahan atau Analisis Data

Berdasarkan data kuantitatif dalam penelitian ini, maka metode yang digunakan adalah dengan cara menganalisis data yang telah dikumpulkan atau diperoleh untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah diukur dalam penelitian ini.

Data yang diperoleh, kemudian dikumpulkan mengenai semua variabel penelitian lalu diolah dan dianalisis menggunakan Uji Kualitas Data, Statistika Deskriptif, Uji Asumsi Klasik, Analisis Regresi Linear Berganda, dan Uji Hipotesis. Uji Asumsi Klasik dalam penelitian ini menggunakan Uji Normalitas, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji Multikolinearitas. Sedangkan, Uji Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t), Uji Koefisien Regresi secara Simultan (uji F), dan Koefisien Determinasi (R^2). Dengan menggunakan bantuan *software SPSS* versi 25.

3.7.1 Uji Kualitas Data

Kualitas data dalam penelitian suatu hipotesis sangat bergantung pada kualitas data yang dipakai dalam penelitian tersebut. Kualitas dari penelitian ditentukan oleh instrumen-instrumen yang digunakan dalam mengumpulkan data agar dapat menghasilkan data yang berlaku. Uji kualitas data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.

3.7.1.1 Uji Validitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Validitas ini dilakukan untuk mengukur valid atau tidaknya pertanyaan atau pernyataan yang terdapat pada instrumen penelitian. Kuesioner dapat dikatakan valid yaitu apabila pertanyaan atau pernyataan yang terdapat dalam kuesioner tersebut dapat mengungkapkan sesuatu yang dapat diukur oleh kuesioner yang berkaitan.

Kriteria dalam pengambilan keputusan uji validitas untuk setiap pertanyaan atau pernyataan adalah nilai dari *Corrected Item Total Correlation* atau nilai dari *r*-hitung harus berada di atas nilai dari *r*-tabel. Apabila nilai dari *r* hitung lebih kecil dari nilai *r*-tabel, maka item tersebut memiliki hubungan yang lebih rendah dengan item dari pertanyaan atau pernyataan yang lain daripada dengan variabel yang diteliti, sehingga item tersebut dapat dinyatakan tidak valid. Secara singkat nya adalah sebagai berikut:

Jika $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah *valid*

Jika $r\text{-hitung} < r\text{-tabel}$ maka item-item pertanyaan dari kuesioner adalah tidak *valid*

Apabila suatu alat ukur sudah dikatakan *valid*, maka untuk selanjutnya dapat dilanjutkan untuk melakukan pengujian reliabilitas. Untuk sebaliknya apabila alat ukur dinyatakan tidak *valid*, maka alat ukur yang sebelumnya harus dievaluasi atau harus diganti dengan alat ukur yang lebih tepat.

3.7.1.2 Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Reliabilitas ini merupakan indeks dalam mengetahui sejauh mana alat pengukuran yang memberikan suatu hasil yang konsisten. Apabila semakin kecil kesalahan dalam pengukuran, maka semakin reliabel alat pengukur. Besar kecil nya kesalahan pengukuran dapat diketahui dengan indeks korelasi.

Uji reliabilitas dapat digunakan dengan metode *Cronbach's Alpha* dengan kriteria pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut:

Jika *Cronbach's Alpha* $> 0,70$ maka alat ukur bersifat *reliabel*

Jika *Cronbach's Alpha* $< 0,70$ maka alat ukur bersifat tidak *reliabel*

3.7.2 Statistika Deskriptif

Analisis Statistika Deskriptif ini yaitu dapat berfungsi untuk memberikan gambaran data yang telah dikumpulkan mengenai suatu objek yang diteliti. Analisis deskriptif ini juga dapat digunakan untuk menggambarkan rata-rata, median, modus, standar deviasi, nilai maksimal, nilai minimal, dan jumlah data penelitian. Teknik statistika deskriptif yaitu hanya untuk memberikan informasi mengenai data yang dimiliki dan tidak bermaksud untuk menguji hipotesis dan kemudian menarik referensi yang di generalisasikan untuk data yang lebih besar lagi atau populasi.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik digunakan yaitu untuk memenuhi uji normalitas data pada model regresi linear berganda. Proses untuk pengujian asumsi klasik dilakukan bersama dengan uji regresi linear berganda sehingga langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengujian asumsi klasik mempunyai kontak yang menguji dengan regresi linear berganda.

3.7.3.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai kesalahan taksiran model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Untuk model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data *residual* normal atau mendekati normal. Uji normalitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Kolmogorov Smirnov Test* dengan menggunakan program SPSS 25. Mengenai perolehan hasil dari uji normalitas tersebut ditunjukkan dengan:

1. Jika nilai signifikansinya $> \alpha = 0,05$ maka data normal
2. Jika nilai signifikansinya $< \alpha = 0,05$ maka data tidak normal

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Multikolinearitas dapat bertujuan untuk menguji apakah pada sebuah model regresi terdapat adanya korelasi antar variabel independen. Apabila terjadi korelasi, maka hal tersebut dapat dinamakan *problem* multikolinearitas. Suatu model regresi yang baik yaitu seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Apabila terbukti adanya multikolinearitas sebaiknya untuk salah satu dari variabel independen yang ada harus dikeluarkan dari model, dan pembuatan regresi dapat diulang kembali. Gejala adanya multikolinearitas dapat dideteksi dengan menggunakan *Pearson Correlation* dan *Tolerance Value* serta *Variance Inflation Factor (VIF)*. Untuk dasar pengambilan keputusannya yaitu:

1. Jika $VIF > 10$ maka Hipotesis ditolak (adanya multikolinearitas)
2. Jika $VIF < 10$ maka Hipotesis diterima (tidak ada multikolinearitas)

3. Jika $Tolerance > 0,10$ maka Hipotesis diterima (tidak ada multikolinearitas)
4. Jika $Tolerance < 0,10$ maka Hipotesis ditolak (ada multikolinearitas)

3.7.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) Uji Heteroskedastisitas dapat bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau *residual* dari satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Model regresi yang baik yaitu yang Homoskedastisitas atau tidak ada Heteroskedastisitas. Mengenai perolehan hasil dari uji heteroskedastisitas tersebut ditunjukkan dengan kriteria:

1. Signifikansi (2-tailed) $> 0,05$ Tidak ada Heteroskedastisitas
2. Signifikansi (2-tailed) $< 0,05$ Ada Heteroskedastisitas

Atau dapat juga diketahui dari gambar *Scatterplot* di mana titik-titik data harus menyebar, apabila membentuk pola menumpuk berarti terjadi heteroskedastisitas.

3.7.4 Analisis Regresi Linear Berganda

Menurut Sugiyono (2016) Regresi Linear Berganda ini merupakan suatu metode statistika umum yang dapat digunakan untuk meneliti hubungan antara variabel independen (X) dengan variabel dependen (Y). Untuk persamaan Regresi Linear Berganda dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y	= Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
α	= Konstanta
β_1	= Koefisien Regresi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
β_2	= Koefisien Regresi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
β_3	= Koefisien Regresi Pemanfaatan Teknologi Informasi
β_4	= Koefisien Regresi Sistem Pengendalian Internal
X_1	= Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah
X_2	= Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
X_3	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
X_4	= Sistem Pengendalian Internal
e	= <i>error</i>

3.7.5 Uji Hipotesis

Uji Hipotesis dalam penelitian ini yaitu berkaitan dengan ada atau tidaknya pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Hipotesis adalah suatu pernyataan-pernyataan yang menggambarkan suatu hubungan antara dua variabel yang berkaitan dengan kasus tertentu serta merupakan suatu anggapan sementara yang perlu untuk diuji suatu kebenarannya dalam suatu penelitian.

3.7.5.1 Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2016) Uji Koefisien Regresi Parsial atau Uji t yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap variabel dependen. Untuk pengambilan keputusan dilakukan dengan berdasarkan perbandingan nilai t hitung masing-masing koefisien t regresi dengan table t sesuai dengan tingkat signifikansi yang digunakan. Kriteria untuk pengujian parsial terhadap variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ maka secara parsial berpengaruh signifikan
2. $-t \text{ hitung} < -t \text{ tabel}$ maka secara parsial berpengaruh secara signifikan
3. $-t \text{ tabel} < t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ maka secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan

Atau

1. Signifikansi $< 0,05$ secara parsial berpengaruh secara signifikan
2. Signifikansi $> 0,05$ secara parsial tidak berpengaruh secara signifikan

3.7.5.2 Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Menurut Ghozali (2016) Uji Koefisien Regresi secara Simultan atau Uji F yaitu digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan atau secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan level signifikan 0,05 atau $\alpha = 5\%$. Pengambilan keputusan berdasarkan dari kriteria sebagai berikut:

1. $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
2. $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$ maka secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan

Atau

1. Signifikansi $> 0,05$ maka secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan
2. Signifikansi $< 0,05$ maka secara bersama-sama tidak berpengaruh secara signifikan

3.7.5.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) Koefisien Determinasi R^2 yaitu dapat digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai untuk koefisien determinasi yaitu antara 0 dan 1.

1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas.
2. Nilai R^2 yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang bersumber dari data primer dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yang menjadi sampel dipilih dengan menggunakan metode *Purposive Sampling* dengan 3 kriteria yang telah ditentukan sebagaimana telah dijelaskan dalam BAB III.

4.1.1 Sejarah Singkat Kabupaten Bogor

Pada tahun 1745, awalnya masyarakat Bogor berasal dari 9 kelompok pemukiman yang digabungkan oleh Gubernur Baron Van Inhof yang menjadi kesatuan masyarakat Kabupaten Bogor. Pada waktu itu terdapat berbagai pendapat mengenai lahirnya Nama Bogor tersebut. Ada salah satu pendapat yang menyatakan bahwa Nama Bogor berasal dari kata Bahai atau Baqar yang berarti sapi dengan alasan terdapat bukti berupa patung sapi yang berada di Kebun Raya Bogor. Pendapat yang lainnya menyebutkan bahwa Nama Bogor berasal dari kata Bokor yang berarti tunggul pohon enau (kawung). Kedua pendapat tersebut memiliki dasar dan alasan tersendiri dan diyakini kebenarannya oleh setiap akhlinya. Namun berdasarkan catatan sejarah pada tanggal 7 April tahun 1752 telah muncul kata Bogor dalam sebuah dokumen yang tertulis dengan tulisan Hoofd Van de Negorij Bogor, yang artinya kepala kampung Bogor. Pada dokumen tersebut diketahui juga bahwa kepala kampung itu terletak di dalam lokasi Kebun Raya itu sendiri yang mulai dibangun pada tahun 1817. Pusat Pemerintahan Bogor semula masih berada di wilayah Kota Bogor yang tepatnya di Panaragan, kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982, ibu Kota Kabupaten Bogor dipindahkan dan ditetapkan di Cibinong. Sejak tahun 1990 itulah pusat kegiatan pemerintahan menempati Kantor pemerintahan di Cibinong.

4.1.2 Kegiatan BPKAD Kabupaten Bogor

Berdasarkan peraturan Bupati Bogor Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok dalam membantu Bupati untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah khususnya untuk penunjang bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi yaitu:

1. Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang daerah
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang daerah

3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis pengelolaan keuangan dan barang daerah
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan keuangan dan barang daerah
5. Pelaksanaan administrasi badan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

4.1.3 Struktur Organisasi dan Data Pegawai BPKAD Kabupaten Bogor

Gambaran Struktur Organisasi dan Data Pegawai BPKAD Kabupaten Bogor ada pada lampiran 3, yang dapat dijelaskan bahwa aparatur Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor saat ini sebanyak 92 orang yang terdiri dari 90 PNS dan 2 orang Non PNS atau TTK. Dari sisi jenjang pendidikan, sebanyak 32 orang aparatur sudah berpendidikan prasarjana (S2), 44 orang sarjana (S1), D4, D3 dan D1 sebanyak 3 orang, dan SLTA/SLTP 13 orang. Untuk berbagai latar belakang pendidikan melengkapi kompetensi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bogor dalam melaksanakan tugas diantaranya, SE, Msi, SH, ME, S.AP, MM, A.Md, S.Sos, M.A, MH, S.Si, S.IP, ST, S.Kom dan dari segi kualifikasi golongan kepegawaian terdapat 8 orang golongan IV, 70 orang golongan III, 12 orang golongan II, dan 2 orang tenaga kontrak.

4.1.4 Tugas dan Fungsi BPKAD Kabupaten Bogor

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah suatu unsur dalam melaksanakan fungsi penunjang keuangan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah. Tugas serta Fungsi dari Sekretariat Daerah dan masing-masing Bidang yaitu sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan kesekretariatan badan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, sekretariat daerah memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan badan
- 2) Pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan
- 3) Pengkoordinasian penyusunan rancangan produk hukum
- 4) Penyusunan kebijakan penataan organisasi badan
- 5) Pengelolaan keuangan badan
- 6) Pengelolaan situs web badan
- 7) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sekretariat daerah dipimpin oleh sekretariat dan dibantu oleh:

- 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan rumah tangga, tata usaha dan kepegawaian badan. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha badan
 - b. Pengelolaan barang dan jasa badan
 - c. Penyiapan bahan penyusunan rancangan produk hukum
 - d. Penyiapan bahan penyusun kebijakan penataan organisasi badan
 - e. Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian badan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
 - 2) Sub Bagian Program dan Pelaporan, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan dan penyusunan dari program dan pelaporan badan. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan badan
 - b. Pelaksanaan pengelolaan hubungan masyarakat
 - c. Pengelolaan penyusunan anggaran badan
 - d. Pengelolaan situs web badan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas
 - 3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan keuangan badan. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penatausahaan keuangan badan
 - b. Penyusunan pelaporan keuangan badan
 - c. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai bidang tugasnya
2. Bidang Anggaran
- Bidang Anggaran tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang anggaran memiliki fungsi sebagai berikut:
- 1) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan analisa kebijakan anggaran daerah
 - 2) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD dan pembiayaan

- 3) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran pendapatan daerah
- 4) Pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran belanja daerah
- 5) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang anggaran
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang anggaran dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Analisa Kebijakan Anggaran, mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis anggaran pemerintah daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyiapan bahan analisa kebijakan rancangan anggaran PPKD
 - b. Penyiapan bahan kebijakan teknis anggaran pendapatan daerah
 - c. Penyiapan bahan kebijakan teknis analisa investasi pemerintah daerah
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang analisa kebijakan anggaran
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya
- 2) Sub Bidang Anggaran Belanja, mempunyai tugas untuk melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis dan penyusunan rancangan anggaran belanja daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan analisa rancangan anggaran belanja daerah
 - b. Penyiapan bahan penyusunan rancangan anggaran belanja daerah
 - c. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran belanja daerah
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang anggaran belanja
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) Sub Bidang Anggaran PPKD, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengkoordinasian penyusunan rancangan anggaran PPKD. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyusunan rancangan anggaran pendapatan PPKD, belanja PPKD dan pembiayaan

- b. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja PPKD
- c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang anggaran PPKD
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

3. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan perbendaharaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang perbendaharaan memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Pengelolaan kas daerah
- 2) Pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai
- 3) Pengelolaan anggaran PPKD
- 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang perbendaharaan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Kas Daerah, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan kas daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan mekanisme penerimaan dan pengeluaran kas daerah
 - b. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah
 - c. Pelaksanaan penyimpanan uang
 - d. Pelaksanaan analisa anggaran kas dan penyediaan dana
 - e. Pelaksanaan pengelolaan utang daerah
 - f. Penyiapan bahan pelaksanaan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah
 - g. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang kas daerah
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2) Sub Bidang Perbendaharaan Belanja Tidak Langsung Pegawai, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan belanja tidak langsung belanja pegawai. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:

- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan belanja tidak langsung belanja gaji dan tunjangan
 - b. Pelaksanaan penatausahaan belanja gaji dan tunjangan
 - c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada bidang perbendaharaan belanja tidak langsung pegawai
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3) Sub Bidang Perbendaharaan PPKD, mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan anggaran PPKD. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan anggaran PPKD
 - b. Pelaksanaan penatausahaan belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan soail, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, dan belanja tak terduga
 - c. Pelaksanaan penatausahaan pengeluaran pembiayaan dan penerimaan pembiayaan
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang perbendaharaan PPKD
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
4. Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi
- Bidang Akuntansi dan Teknologi Informasi tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan akuntansi dan teknologi informasi pelaporan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang akuntansi dan teknologi informasi memiliki fungsi sebagai berikut:
- 1) Pengelolaan akuntansi keuangan daerah
 - 2) Pengelolaan pelaporan keuangan daerah
 - 3) Pengelolaan sistem informasi akuntansi dan pelaporan keuangan daerah
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang akuntansi dan teknologi informasi
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang akuntansi dan teknologi informasi dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas untuk melaksanakan akuntansi keuangan daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan akuntansi keuangan daerah

- b. Penyiapan bahan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah
 - c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang akuntansi
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2) Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan pelaksanaan pelaporan keuangan daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan pelaporan keuangan daerah
 - b. Penyiapan bahan penyusunan laporan bulanan, triwulan, semester pertama dan prognosis pemerintah daerah
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan laporan kinerja pemerintah daerah
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pelaporan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3) Sub Bidang Teknologi Informasi mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan teknologi informasi keuangan daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
- a. Penyiapan bahan kebijakan teknis pelaksanaan teknologi informasi keuangan daerah
 - b. Pelaksanaan penyediaan informasi keuangan daerah
 - c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang teknologi informasi
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
5. Bidang Aset Daerah
- Bidang Aset Daerah tersebut mempunyai tugas untuk membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan barang daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, bidang akuntansi dan teknologi informasi memiliki fungsi sebagai berikut:
- 1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan analisis perencanaan barang milik daerah
 - 2) Penyusunan bahan perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah
 - 3) Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengamanan dan pemanfaatan barang milik daerah
 - 4) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan bidang aset daerah

- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bidang aset daerah dipimpin oleh Kepala Bidang dan dibantu oleh:

- 1) Sub Bidang Perencanaan mempunyai tugas untuk melaksanakan analisis perencanaan barang milik daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis analisis perencanaan kebutuhan barang milik daerah
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis standarisasi barang dan harga barang
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan penghapusan barang milik daerah
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang perencanaan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- 2) Sub Bidang Penatausahaan mempunyai tugas untuk melaksanakan penatausahaan dan administrasi barang milik daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pembukuan dan pelaporan barang milik daerah
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis inventarisasi barang milik daerah
 - c. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang penatausahaan
 - d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya
- 3) Sub Bidang Pemanfaatan dan pengamanan mempunyai tugas untuk melaksanakan pemanfaatan dan pengamanan barang milik daerah. Fungsi untuk menyelenggarakan tugas tersebut yaitu:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan barang milik daerah
 - b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengamanan barang milik daerah
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penggunaan barang milik daerah
 - d. Penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pada sub bidang pemanfaatan dan pengamanan
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya

4.2 Hasil Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran kuesioner kepada para responden di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor dengan melalui *link google form* dengan di koordinir oleh salah satu pegawai yang bekerja di BPKAD Kabupaten Bogor. Proses pendistribusian hingga pengumpulan data dilakukan pada tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021. Dari 60 sampel yang ditargetkan dapat mengisi kuesioner hanya 52 sampel yang dapat mengisi kuesioner yang telah disebarkan.

Tabel 4.1 Data Kuesioner Penelitian

No	Keterangan	Jumlah	Presentase
1	Kuesioner yang ditargetkan	60	100%
2	Kuesioner yang diisi/dapat diolah	52	86,8%
3	Kuesioner yang tidak diisi	8	13,3%

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.1 di atas, menunjukkan responden/sampel yang ditargetkan dapat mengisi kuesioner adalah sebanyak 60, tetapi hanya 52 sampel/responden yang dapat dijadikan sebagai data penelitian bagi peneliti.

4.2.1 Deskripsi Karakteristik Responden

Dari hasil penyebaran kuesioner yang telah dilakukan terhadap pegawai BPKAD Kabupaten Bogor, penulis kemudian melakukan olah data dengan menggunakan *software* SPSS 25. Dibawah ini adalah beberapa deskripsi karakteristik responden yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 52 responden diperoleh data mengenai jenis kelamin responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin					
		<i>Frequency</i>	<i>Percent (%)</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Laki-laki	34	65,4	65,4	65,4
	Perempuan	18	34,6	34,6	100,0
	Total	52	100,0	100,0	

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.2 di atas, dapat dilihat bahwa responden dapat dibedakan menjadi 2 kategori yaitu laki-laki dan perempuan. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden yang bekerja pada Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor sebanyak 34 orang atau sebesar 65,4% berjenis kelamin Laki-laki, sedangkan responden yang berjenis kelamin Perempuan sebanyak 18 orang atau sebesar 34,6%. Hal tersebut menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas adalah Laki-laki dengan jumlah 34 orang atau 65,4%.

2. Responden Berdasarkan Usia

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 52 responden diperoleh data mengenai usia responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan usia ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia

		Usia			
		<i>Frequency</i>	<i>Percent (%)</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	21-30 Tahun	3	5,8	5,8	5,8
	31-40 Tahun	13	25,0	25,0	30,8
	41-50 Tahun	24	46,2	46,2	76,9
	51-60 Tahun	12	23,1	23,1	100,0
	Total	52	100,0	100,0	

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, dapat dilihat bahwa responden dapat dibedakan menjadi 4 kategori yaitu 21-30 tahun, 31-40 tahun, 41-50 tahun, dan 51-60 tahun. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yaitu 21-30 tahun sebanyak 3 orang atau 5,8%, 31-40 tahun sebanyak 13 orang atau 25,0%, 41-50 tahun sebanyak 24 orang atau 46,2%, dan 51-60 tahun sebanyak 12 orang atau 23,1%. Hal tersebut menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas berumur 41-50 tahun yaitu sebanyak 24 orang atau 46,2%.

3. Responden Berdasarkan Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 52 responden diperoleh data mengenai pendidikan responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan pendidikan ditunjukkan pada Tabel 4.4.

Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan

		Pendidikan Terakhir			
		<i>Frequency</i>	<i>Percent (%)</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	SLTA/SLTP	5	9,6	9,6	9,6
	Diploma	2	3,8	3,8	13,5
	S1	22	42,3	42,3	55,8
	S2	23	44,2	44,2	100,0
	Total	52	100,0	100,0	

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.4 di atas, dapat dilihat bahwa responden dapat dibedakan menjadi 4 kategori yaitu SLTA/SLTP, Diploma, S1, dan S2. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yaitu SLTA/SLTP sebanyak 5 orang atau 9,6%, Diploma sebanyak 2 orang atau 3,8 %, S1 sebanyak 22 orang atau 43,3%, dan S2 sebanyak 23 orang atau 44,2%. Hal tersebut menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas pendidikan terakhir adalah S2 sebanyak 23 orang atau 44,2%.

4. Responden Berdasarkan Latar Belakang Pendidikan

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 52 responden diperoleh data mengenai latar belakang pendidikan responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan latar belakang pendidikan ditunjukkan pada Tabel 4.5.

Tabel 4.5 Responden Berdasarkan Latar Belakang

Latar Belakang Pendidikan					
		<i>Frequency</i>	<i>Percent (%)</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Akuntansi	8	15,4	15,4	15,4
	Manajemen	13	25	25	40,4
	Ilmu Ekonomi	6	11,5	11,5	51,9
	Hukum	5	9,6	9,6	61,5
	Lainnya	20	38,5	38,5	100
	Total	52	100,0	100,0	

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa responden dapat dibedakan menjadi 5 kategori yaitu Akuntansi, Manajemen, Ilmu Ekonomi, Hukum, dan Lainnya. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yaitu Akuntansi sebanyak 8 orang atau 15,4 %, Manajemen sebanyak 13 orang atau 25,0%, Ilmu Ekonomi sebanyak 6 orang atau 11,5 %, Hukum sebanyak 5 orang atau 9,6%, dan Lainnya sebanyak 20 orang atau 38,5%. Hal tersebut menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas memiliki latar pendidikan yang berbeda-beda sebanyak 20 orang atau 38,5%.

5. Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 52 responden diperoleh data mengenai lama bekerja responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan lama bekerja pendidikan ditunjukkan pada Tabel 4.6.

Tabel 4.6 Responden Berdasarkan Lama Bekerja

Lama Bekerja

		<i>Frequency</i>	<i>Percent (%)</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	1-5 Tahun	1	1,9	1,9	1,9
	6-10 Tahun	7	13,5	13,5	15,4
	11-15 Tahun	29	55,8	55,8	71,2
	16-20 Tahun	7	13,5	13,5	84,6
	21-25 Tahun	3	5,8	5,8	90,4
		<i>Frequency</i>		<i>Percent (%)</i>	<i>Valid Percent</i>
	>25 Tahun	5	9,6	9,6	100,0
	Total	52	100,0	100,0	

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.6 di atas, dapat dilihat bahwa responden dapat dibedakan menjadi 6 kategori yaitu 1-5 tahun, 6-10 tahun, 11-15 tahun, 16-20 tahun, 21-25 tahun, dan >25 tahun. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yaitu 1-5 tahun sebanyak 1 orang atau 1,9 %, 6-10 tahun sebanyak 7 orang atau 13,5%, 11-15 tahun sebanyak 29 orang atau 55,8%, 16-20 tahun sebanyak 7 orang atau 13,5%, 21-25 tahun sebanyak 3 orang atau 5,8%, dan >25 tahun sebanyak 5 orang atau 9,6%. Hal tersebut menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas lama bekerja 11-15 tahun yaitu sebanyak 29 orang atau 55,8%.

6. Responden Berdasarkan Bagian di BPKAD

Berdasarkan kuesioner yang dikumpulkan dari 52 responden diperoleh data mengenai bagian di BPKAD responden. Adapun secara lengkap deskripsi responden berdasarkan bagian di BPKAD ditunjukkan pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Responden Berdasarkan Bagian di BPKD

Bagian di BPKAD					
		<i>Frequency</i>	<i>Percent (%)</i>	<i>Valid Percent</i>	<i>Cumulative Percent</i>
<i>Valid</i>	Bidang Anggaran	9	17,3	17,3	17,3
	Bidang Perbendaharaan	18	34,6	34,6	51,9
	Bidang Akuntansi dan Informasi	9	17,3	17,3	69,2
	Bidang Aset Daerah	16	30,8	30,8	100,0
	Total	52	100,0	100,0	

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.7 di atas, dapat dilihat bahwa responden dapat dibedakan menjadi 4 kategori bidang yaitu bidang anggaran, bidang perbendaharaan, bidang akuntansi dan informasi, dan bidang aset daerah. Pengumpulan data yang dilakukan menghasilkan data responden yang bekerja pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor yaitu bidang anggaran sebanyak 9 orang atau 17,3%, bidang perbendaharaan sebanyak 18 orang atau 34,6%, bidang akuntansi dan informasi sebanyak 9 orang atau 17,3%, dan bidang aset daerah sebanyak 16 orang atau 30,8%. Hal tersebut

menjelaskan bahwa responden dalam penelitian ini mayoritas bekerja pada bidang Perbendaharaan sebanyak 18 orang atau sebesar 34,6%.

4.2.2 Deskripsi Data Variabel

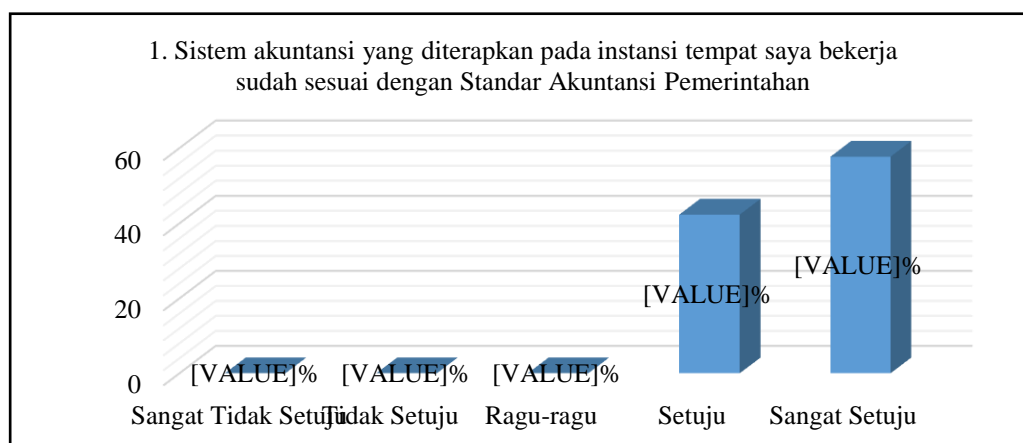
Untuk menganalisis jawaban dari responden mengenai variabel Penerapan SAKD (X1), Penerapan SAP (X2), Pemanfaatan TI (X3), SPI (X4), dan Variabel Kualitas LKPD (Y) peneliti menggunakan 5 skala likert, yaitu:

- 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)
- 2 = Tidak Setuju (TS)
- 3 = Ragu-ragu (RG)
- 4 = Setuju (S)
- 5 = Sangat Setuju (SS)

Terkait dengan pernyataan-pernyataan dari Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3), Sistem Pengendalian Internal (X4), dan Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) yang terdapat dalam kuesioner, yaitu:

1. Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)

Berikut disajikan diagram atau gambaran mengenai deskripsi data variabel independen penerapan sistem akuntansi keuangan daerah untuk masing-masing pernyataan yang diberikan kepada pegawai BPKAD Kabupaten Bogor



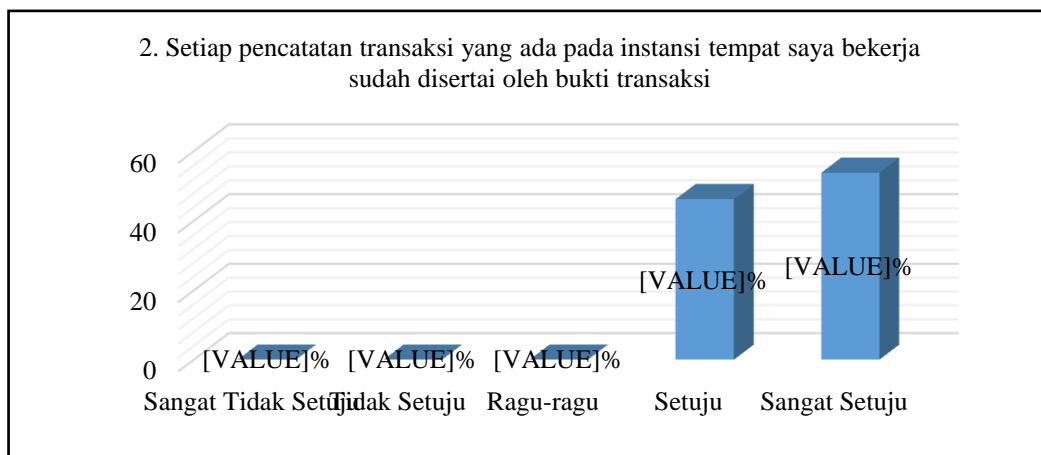
yaitu:

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.1 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Penerapan SAKD

Berdasarkan Gambar 4.1 di atas menunjukkan untuk pernyataan 1 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah responden sebagian

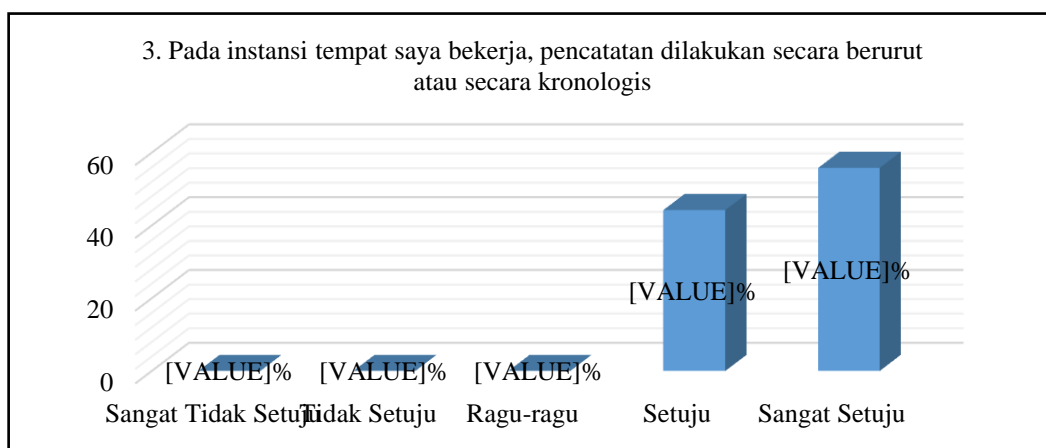
besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa dalam pencatatan dan penggolongannya telah sesuai dengan SAP yang berlaku saat ini.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.2 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Penerapan SAKD

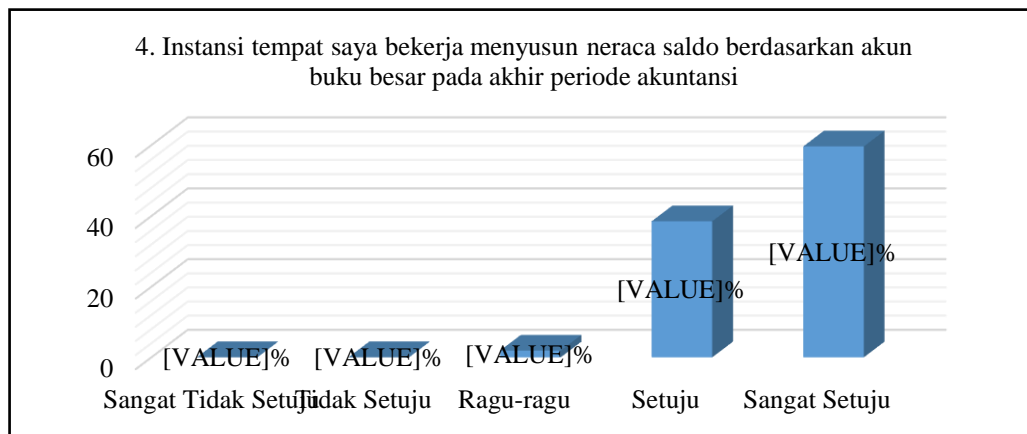
Berdasarkan Gambar 4.2 di atas menunjukkan untuk pernyataan 2 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 53,8% yang artinya bahwa dalam melakukan pencatatan transaksinya telah disertai dengan bukti transaksi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.3 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Penerapan SAKD

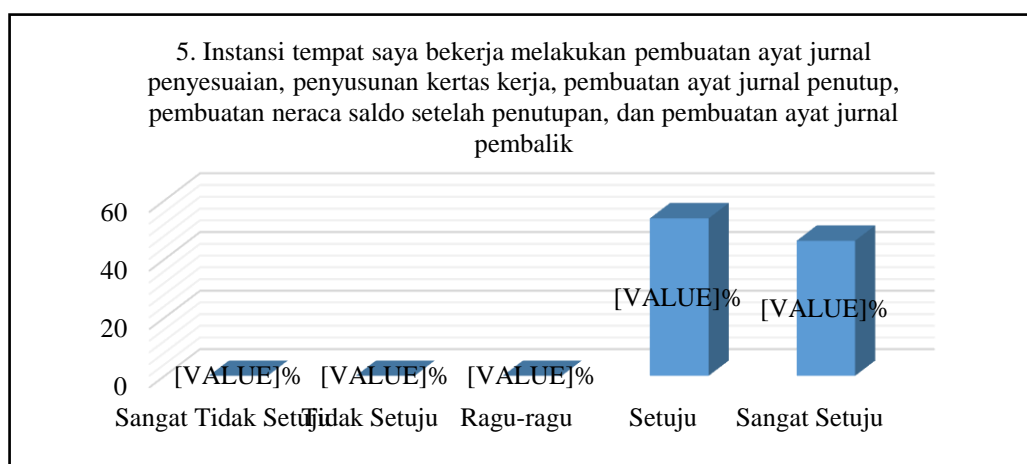
Berdasarkan Gambar 4.3 di atas menunjukkan untuk pernyataan 3 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 55,8% yang artinya bahwa dalam pencatatan nya telah dicatat secara berurut atau kronologis.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.4 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Penerapan SAKD

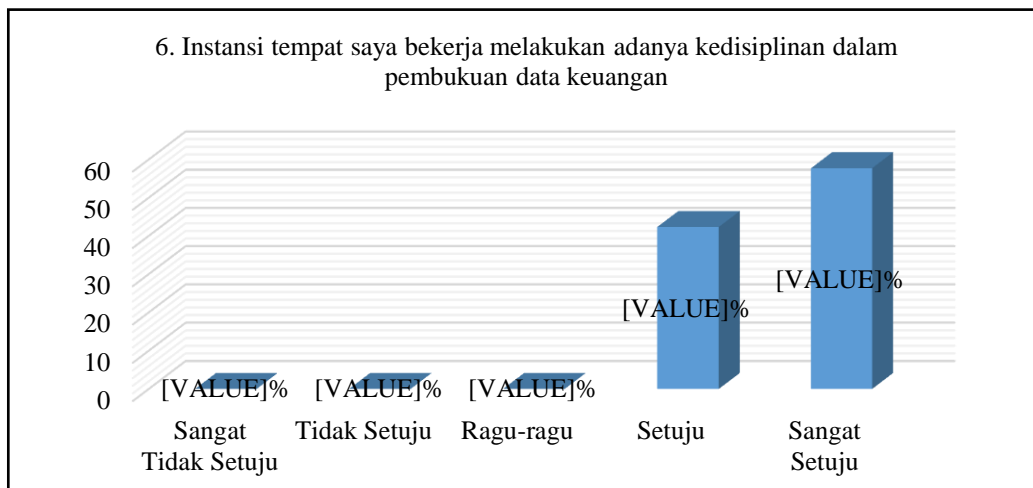
Berdasarkan Gambar 4.4 di atas menunjukkan untuk pernyataan 4 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 59,6% yang artinya bahwa para pegawai BPKAD Kabupaten Bogor telah menyusun neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.5 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Penerapan SAKD

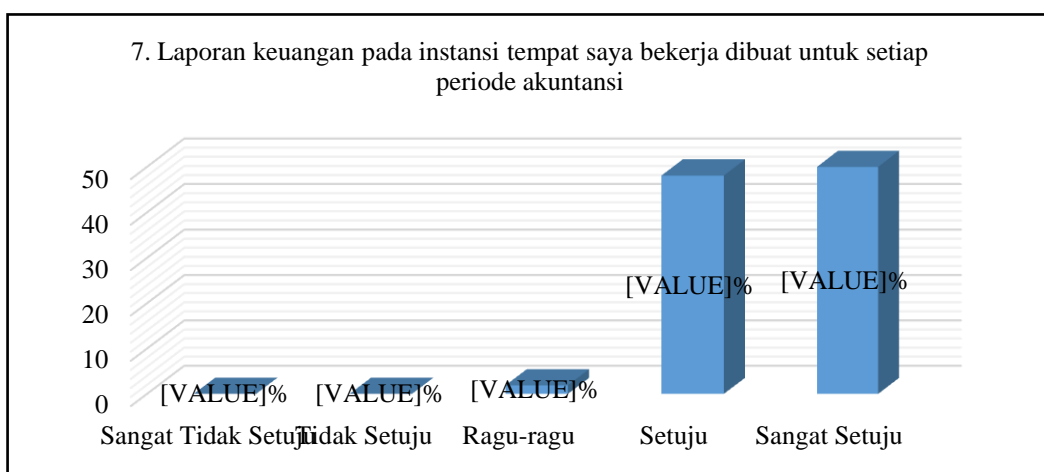
Berdasarkan Gambar 4.5 di atas menunjukkan untuk pernyataan 5 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 53,8% yang artinya bahwa dalam peringkasan telah melakukan pembuatan ayat jurnal penyesuaian sampai dengan ayat jurnal pembalik.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.6 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Penerapan SAKD

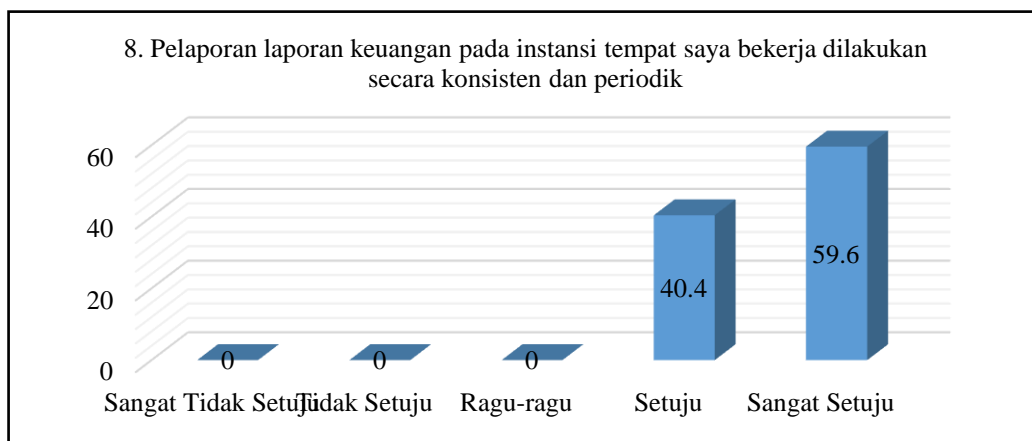
Berdasarkan Gambar 4.6 di atas menunjukkan untuk pernyataan 6 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa telah melakukan kedisiplinan dalam pembukuan data keuangan.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.7 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Penerapan SAKD

Berdasarkan Gambar 4.7 di atas menunjukkan untuk pernyataan 7 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 50,0% yang artinya bahwa dalam pelaporannya dibuat setiap periode akuntansi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.8 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Penerapan SAKD

Berdasarkan Gambar 4.8 di atas menunjukkan untuk pernyataan 8 mengenai penerapan sistem akuntansi keuangan daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 59,6% yang artinya bahwa dalam pelaporannya selalu dilaporkan secara konsisten.

Berdasarkan gambar diagram di atas mengenai masing-masing pernyataan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, berikut ini adalah gambar diagram untuk keseluruhan deskripsi dari pernyataan variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah yang ditunjukkan pada Gambar 4.9.

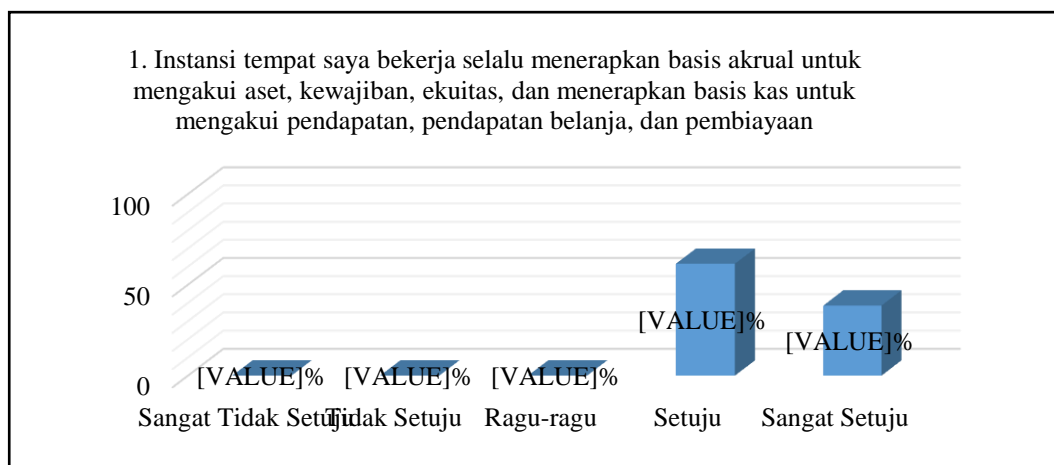


Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.9 Deskripsi Pernyataan Variabel Penerapan SAKD

2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)

Berikut disajikan diagram atau gambaran mengenai deskripsi data variabel independen Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk masing-masing pernyataan yang diberikan kepada pegawai BPKAD Kabupaten Bogor

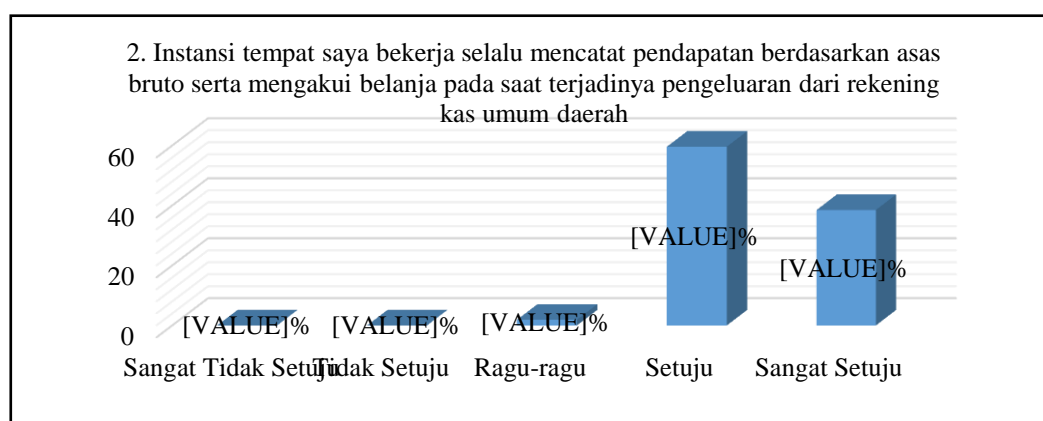


yaitu:

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.10 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Penerapan SAP

Berdasarkan Gambar 4.10 di atas menunjukkan untuk pernyataan 1 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 61,5% yang artinya bahwa dalam penyajian laporan keuangan pada BPKAD Kabupaten Bogor selalu



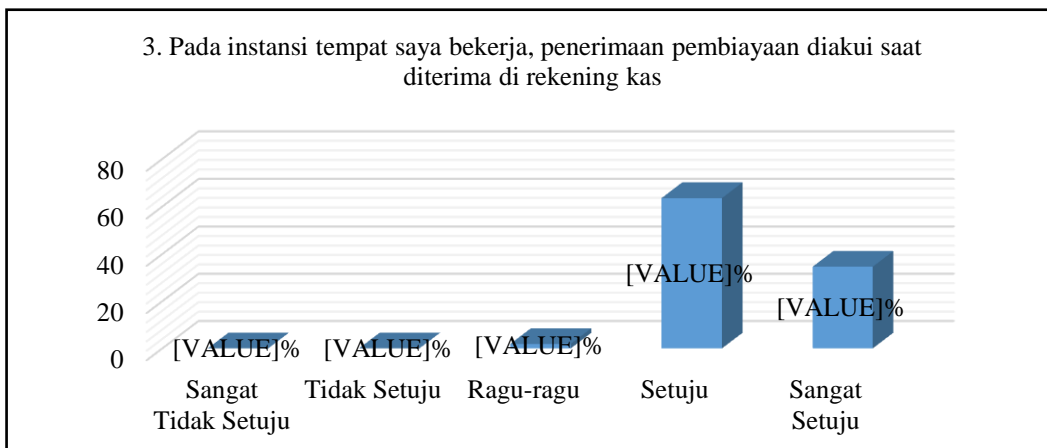
menggunakan dan menerapkan basis akrual.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.11 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Penerapan SAP

Berdasarkan Gambar 4.11 di atas menunjukkan untuk pernyataan 2 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 59,6% yang artinya bahwa

pegawai BPKAD Kabupaten Bogor selalu mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto dan mengakui belanja pada saat terjadi pengeluaran dari rekening kas

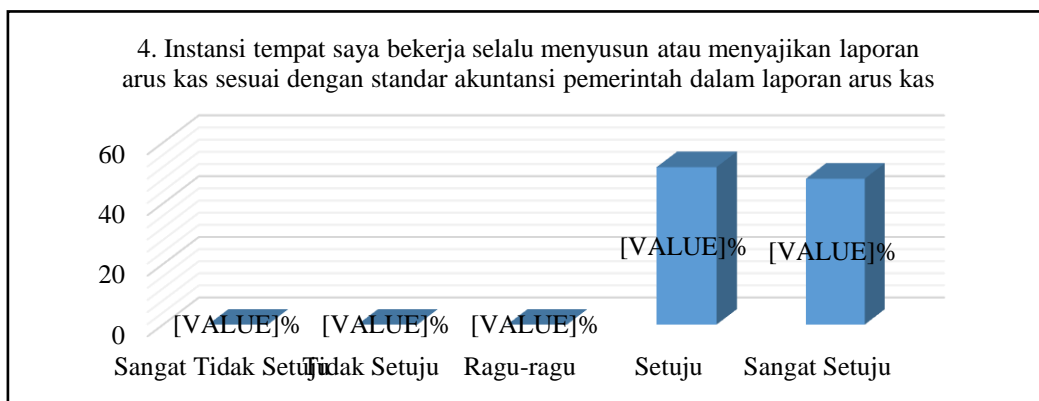


umum daerah.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.12 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Penerapan SAP

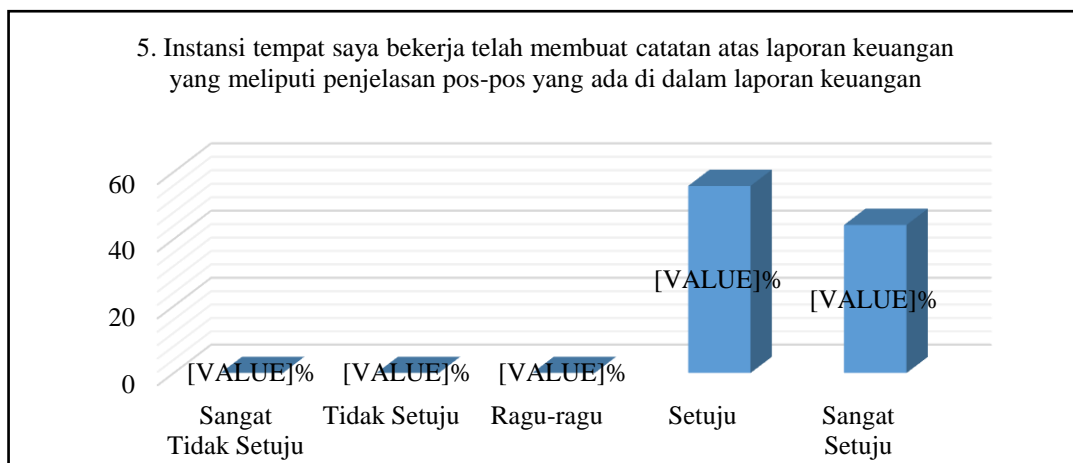
Berdasarkan Gambar 4.12 di atas menunjukkan untuk pernyataan 3 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 63,5% yang artinya bahwa penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.13 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Penerapan SAP

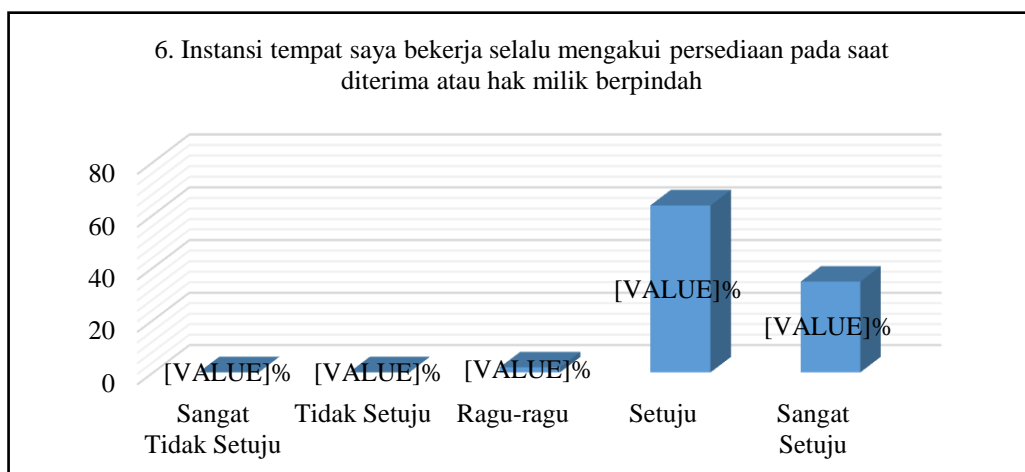
Berdasarkan Gambar 4.13 di atas menunjukkan untuk pernyataan 4 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 51,9% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor telah menyusun laporan arus kas sesuai dengan SAP dalam LAK.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.14 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Penerapan SAP

Berdasarkan Gambar 4.14 di atas menunjukkan untuk pernyataan 5 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 55,8% yang artinya bahwa telah membuat CALK yang di dalamnya meliputi penjelasan pos-pos yang ada

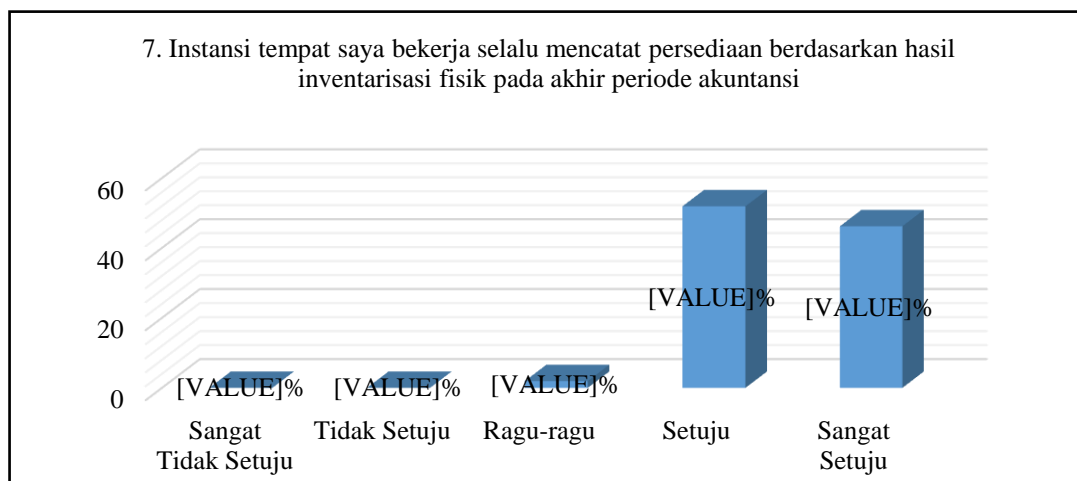


di LK.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.15 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Penerapan SAP

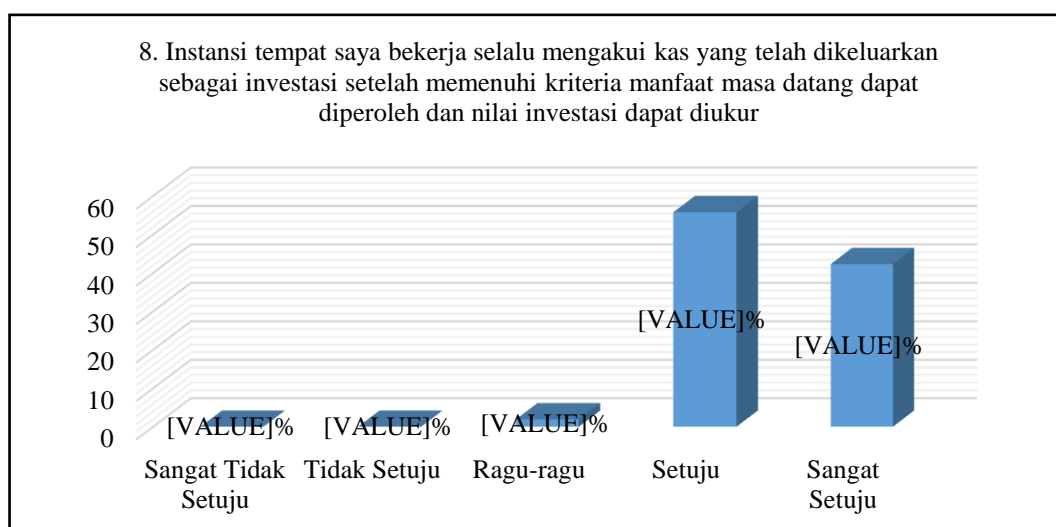
Berdasarkan Gambar 4.15 di atas menunjukkan untuk pernyataan 6 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 63,5% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu mengakui persediaan pada saat diterima.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.16 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Penerapan SAP

Berdasarkan Gambar 4.16 di atas menunjukkan untuk pernyataan 7 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 51,9% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu mencatat persediaan berdasarkan hasil

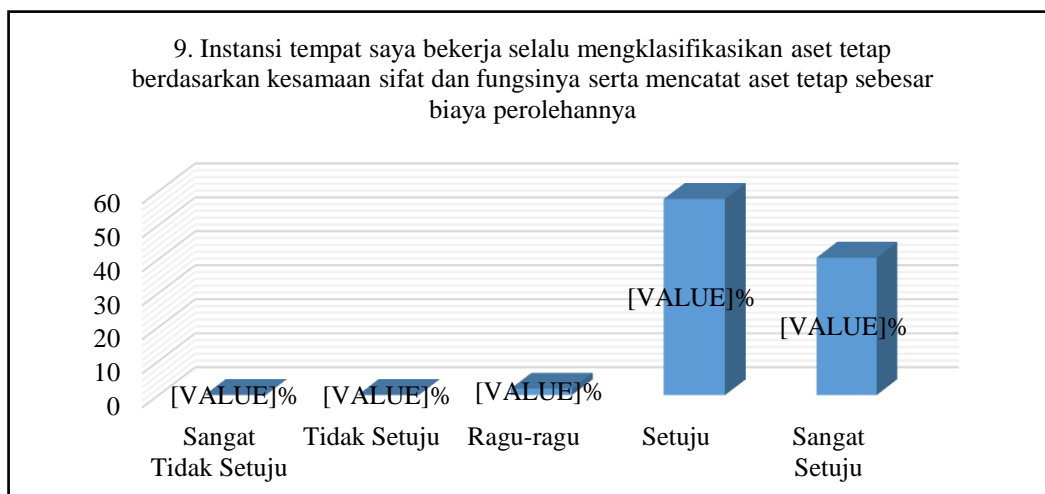


inventarisasi fisik.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.17 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Penerapan SAP

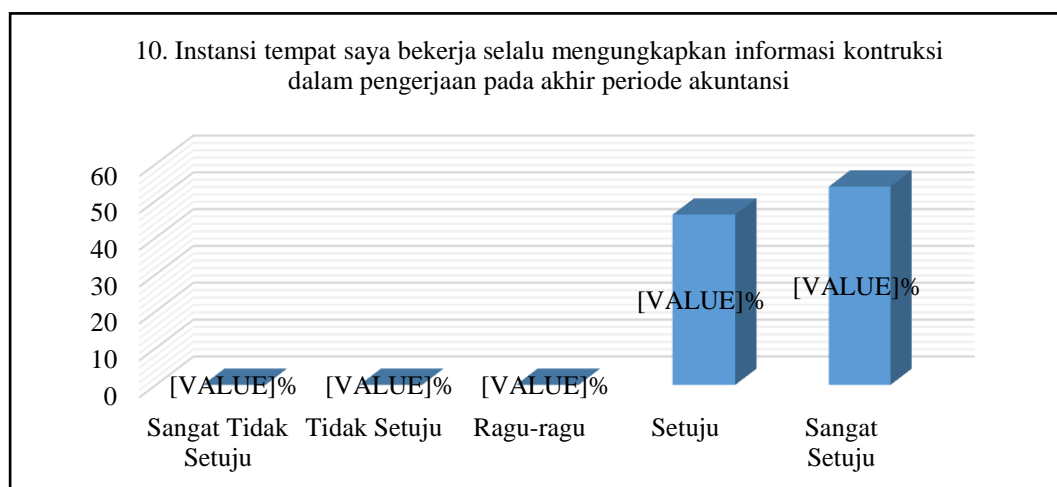
Berdasarkan Gambar 4.17 di atas menunjukkan untuk pernyataan 8 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 55,8% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.18 Deskripsi Pernyataan 9 Variabel Penerapan SAP

Berdasarkan Gambar 4.18 di atas menunjukkan untuk pernyataan 9 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan sifat

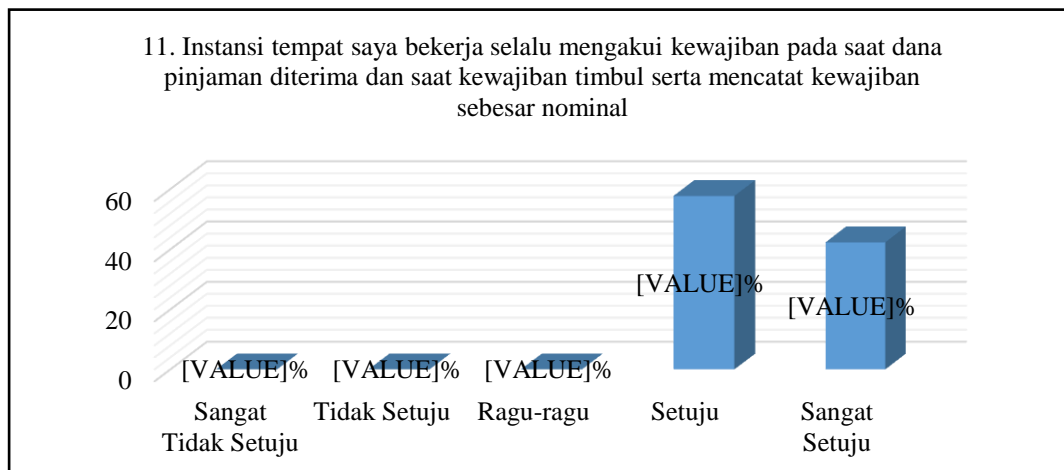


dan fungsinya.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.19 Deskripsi Pernyataan 10 Variabel Penerapan SAP

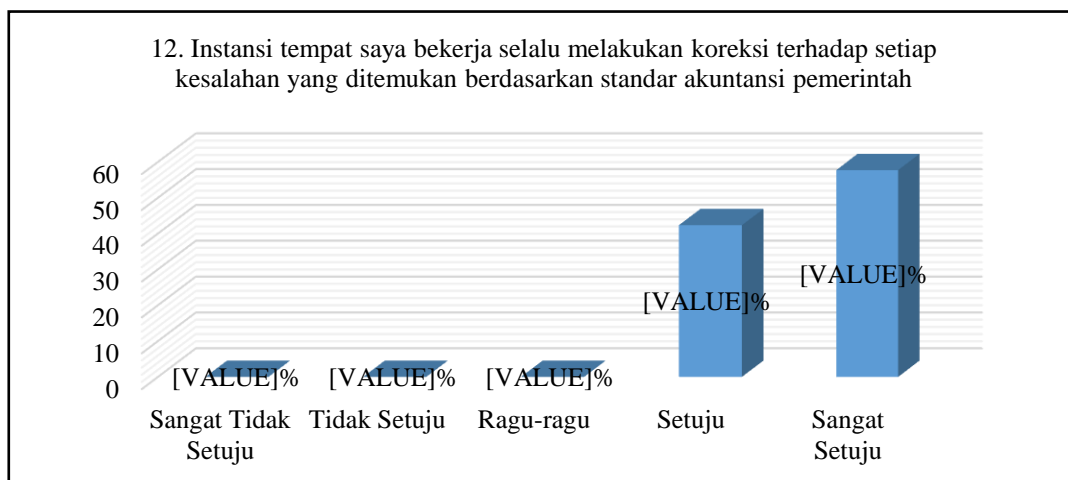
Berdasarkan Gambar 4.19 di atas menunjukkan untuk pernyataan 10 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 53,8% yang artinya bahwa selalu mengungkapkan informasi konstruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.20 Deskripsi Pernyataan 11 Variabel Penerapan SAP

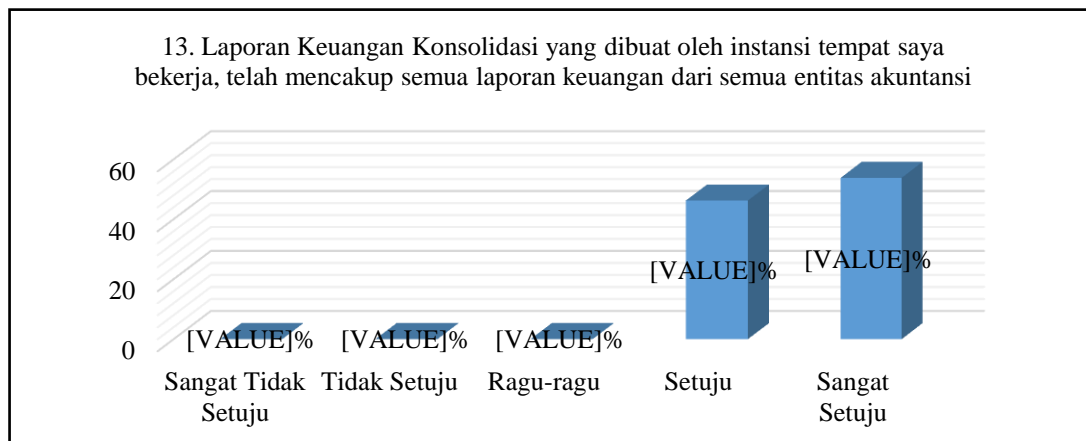
Berdasarkan Gambar 4.20 di atas menunjukkan untuk pernyataan 11 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.21 Deskripsi Pernyataan 12 Variabel Penerapan SAP

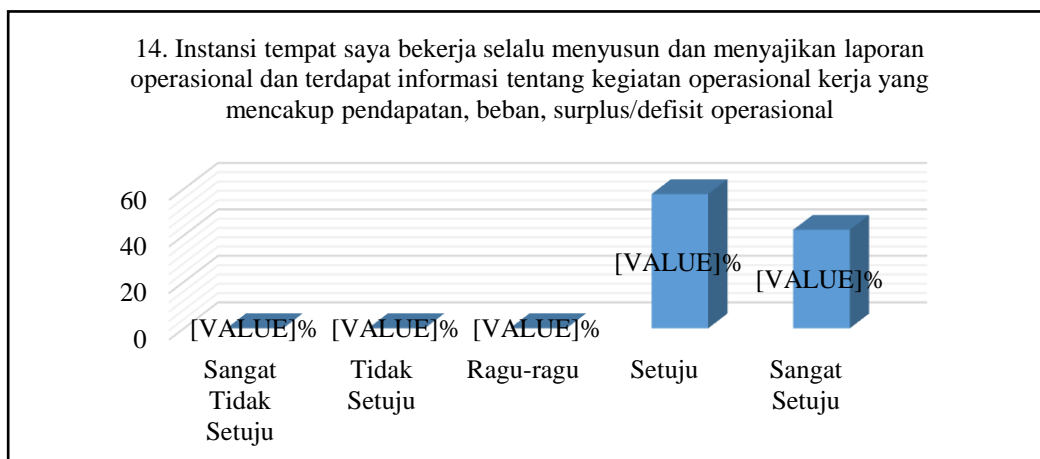
Berdasarkan Gambar 4.21 di atas menunjukkan untuk pernyataan 12 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu melakukan koreksi terhadap setiap kesalahan yang sesuai dengan SAP.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.22 Deskripsi Pernyataan 13 Variabel Penerapan SAP

Berdasarkan Gambar 4.22 di atas menunjukkan untuk pernyataan 13 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 53,8% yang artinya bahwa laporan konsolidasi telah mencakup semua LK dari semua entitas



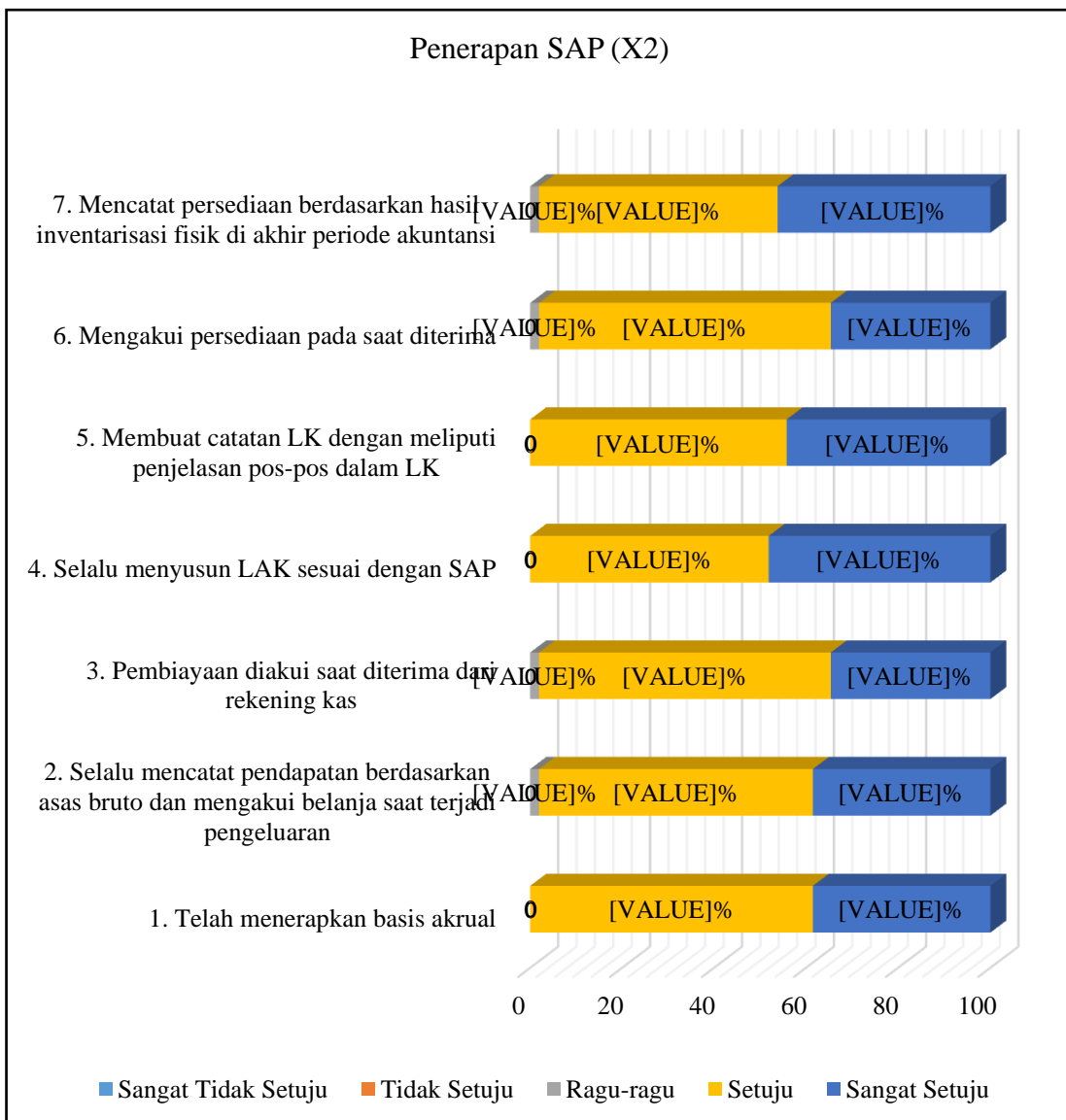
akuntansi.

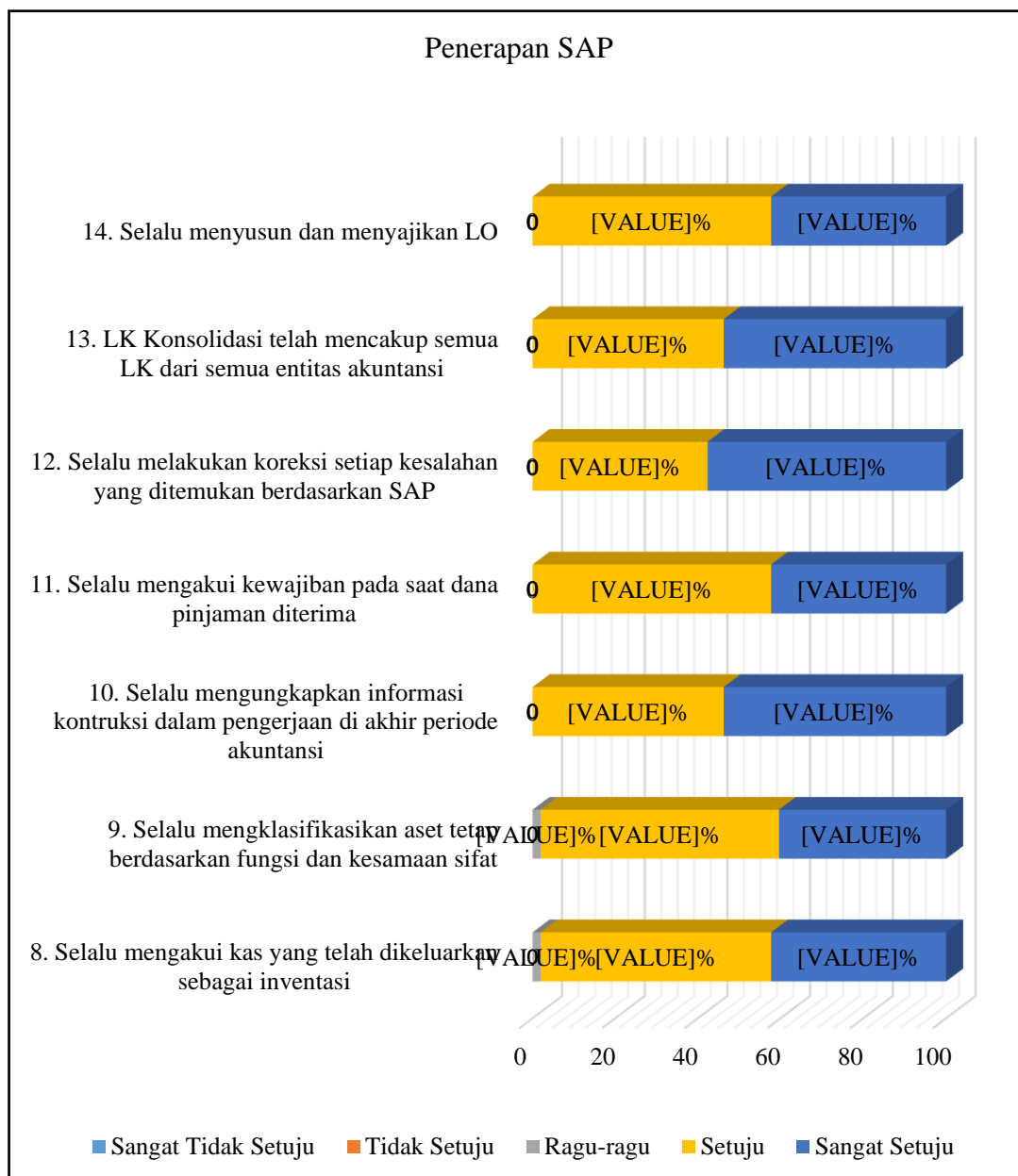
Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.23 Deskripsi Pernyataan 14 Variabel Penerapan SAP

Berdasarkan Gambar 4.23 di atas menunjukkan untuk pernyataan 14 mengenai penerapan standar akuntansi pemerintahan responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu menyusun dan menyajikan LO.

Berdasarkan gambar diagram di atas mengenai masing-masing pernyataan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berikut ini adalah gambar diagram untuk keseluruhan deskripsi dari pernyataan variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan yang ditunjukkan pada Gambar 4.24.



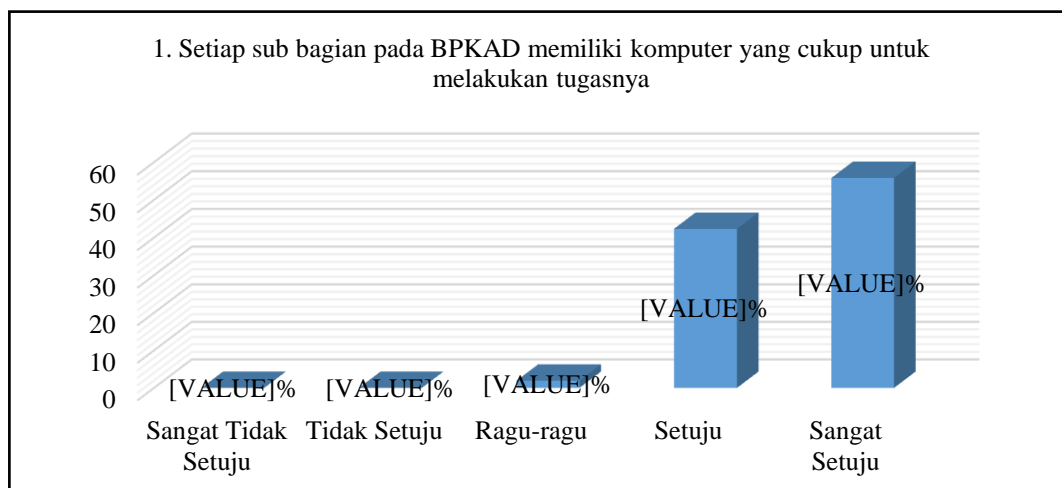


Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.24 Deskripsi Pernyataan Variabel Penerapan SAP

3. Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

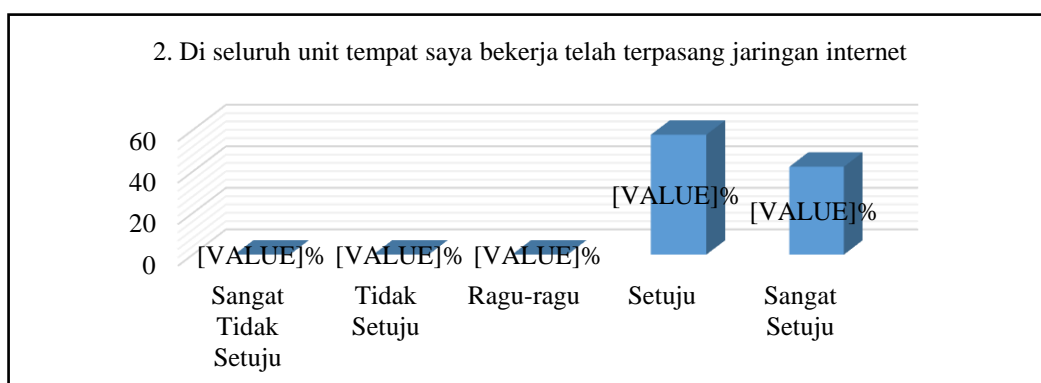
Berikut disajikan diagram atau gambaran mengenai deskripsi data variabel independen Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk masing-masing pernyataan yang diberikan kepada pegawai BPKAD Kabupaten Bogor yaitu:



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.25 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Pemanfaatan TI

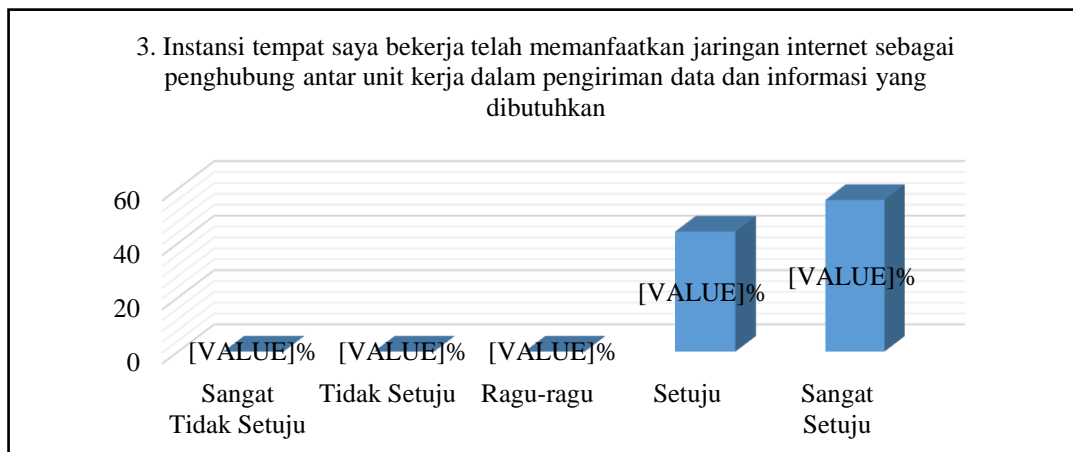
Berdasarkan Gambar 4.25 di atas menunjukkan untuk pernyataan 1 mengenai pemanfaat teknologi informasi responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 55,8 % yang artinya bahwa perangkat komputer yang dimiliki sudah cukup dalam melakukan tugasnya.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.26 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Pemanfaatan TI

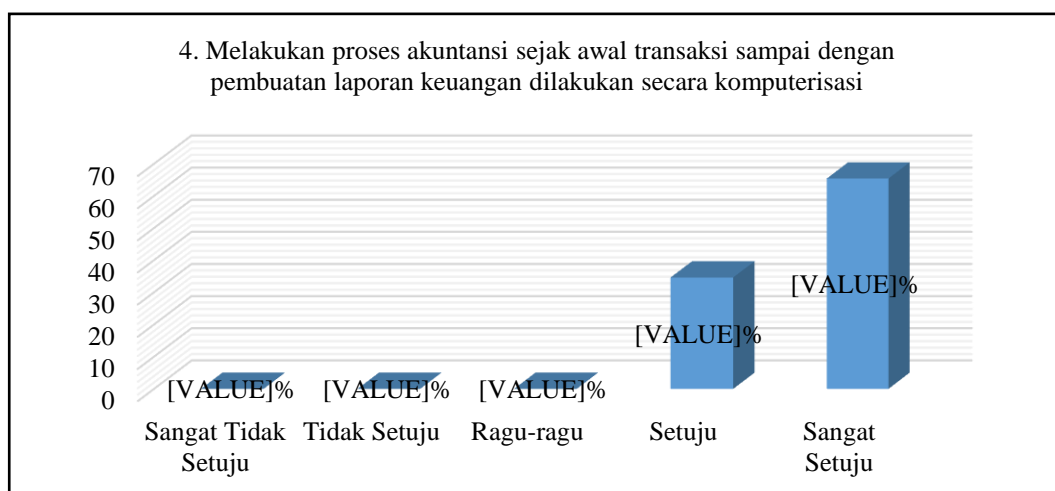
Berdasarkan Gambar 4.26 di atas menunjukkan untuk pernyataan 2 mengenai pemanfaat teknologi informasi responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa di setiap unit BPKAD Kabupaten Bogor telah terpasang perangkat jaringan internet.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.27 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Pemanfaatan TI

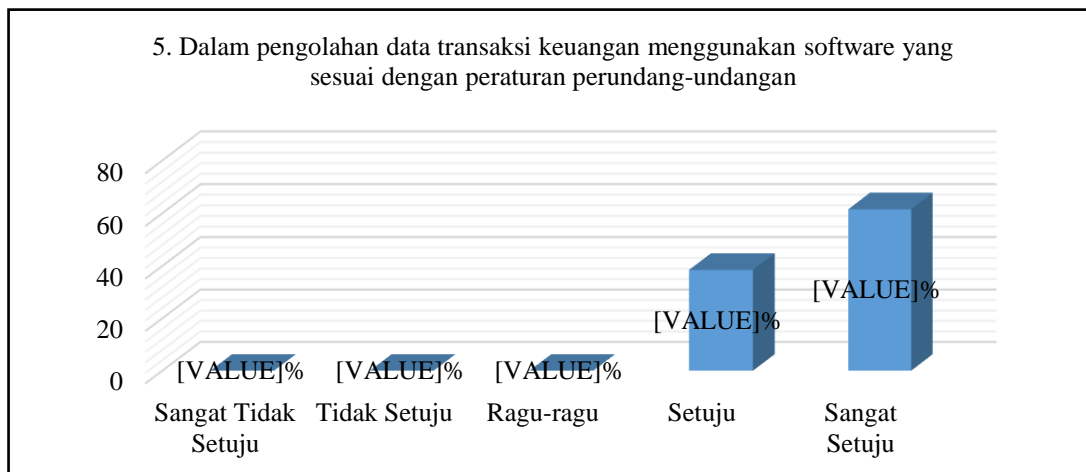
Berdasarkan Gambar 4.27 di atas menunjukkan untuk pernyataan 3 mengenai pemanfaat teknologi informasi responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 55,8% yang artinya bahwa setiap unit BPKAD Kabupaten Bogor telah memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.28 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Pemanfaatan TI

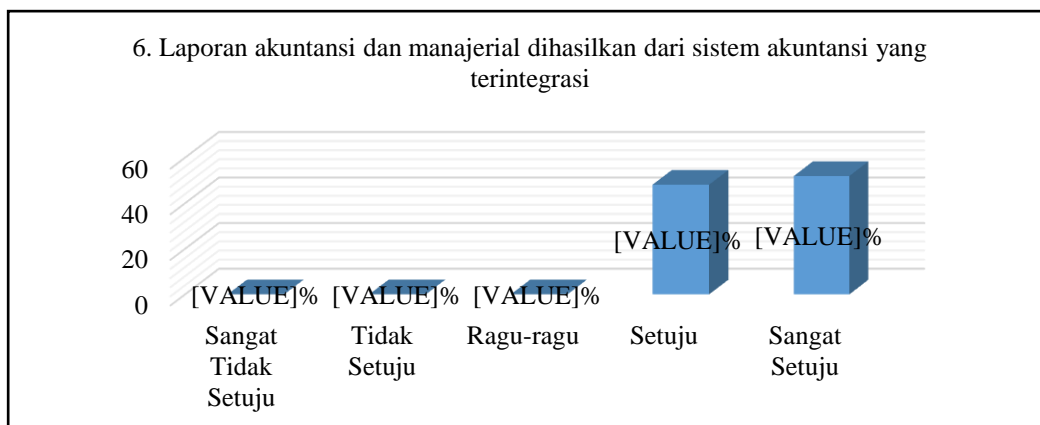
Berdasarkan Gambar 4.28 di atas menunjukkan untuk pernyataan 4 mengenai pemanfaat teknologi informasi responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 65,4% yang artinya bahwa pembuatan LK di BPKAD Kabupaten Bogor dilakukan secara komputerisasi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.29 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Pemanfaatan TI

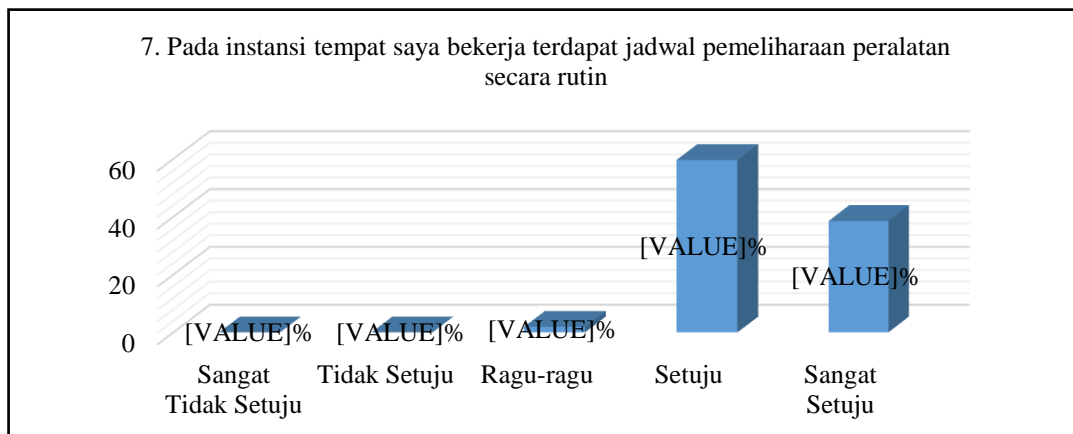
Berdasarkan Gambar 4.29 di atas menunjukkan untuk pernyataan 5 mengenai pemanfaat teknologi informasi responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 61,5% yang artinya bahwa pengelolaan data transaksi keuangan di BPKAD Kabupaten Bogor telah menggunakan *software* yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.30 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Pemanfaatan TI

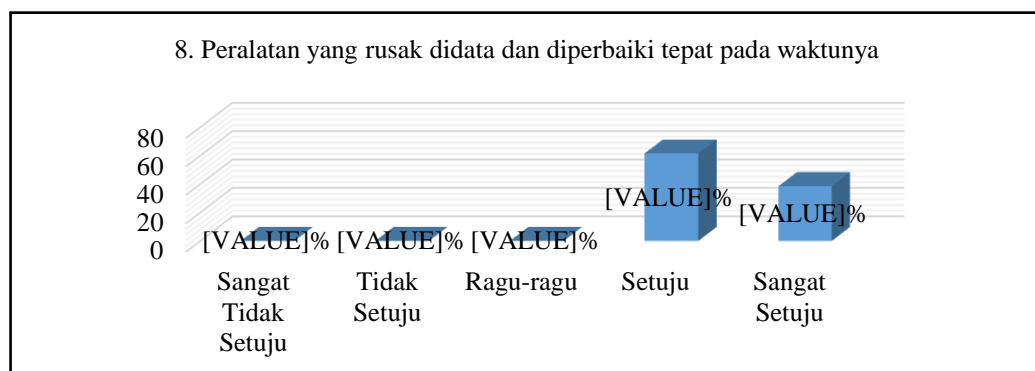
Berdasarkan Gambar 4.30 di atas menunjukkan untuk pernyataan 6 mengenai pemanfaat teknologi informasi responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 51,9% yang artinya bahwa sistem informasi di BPKAD Kabupaten Bogor telah terintegrasi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.31 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Pemanfaatan TI

Berdasarkan Gambar 4.31 di atas menunjukkan untuk pernyataan 7 mengenai pemanfaat teknologi informasi responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 59,6% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu melakukan pemeliharaan secara teratur untuk seluruh



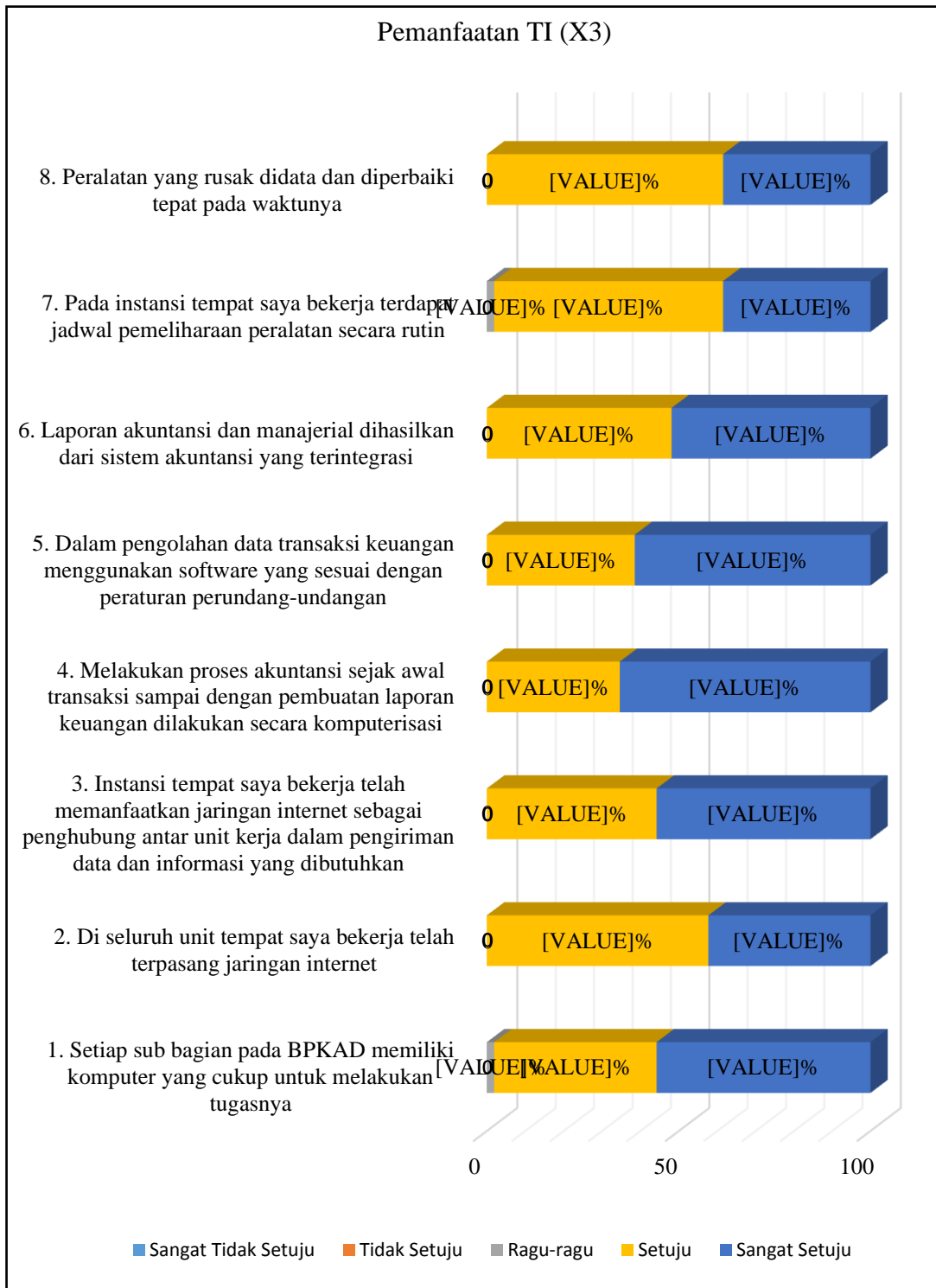
peralatan yang ada.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.32 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Pemanfaatan TI

Berdasarkan Gambar 4.32 di atas menunjukkan untuk pernyataan 8 mengenai pemanfaat teknologi informasi responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 61,5% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogorselalu melakukan pendataan dan perbaikan untuk peralatan yang rusak tepat pada waktunya.

Berdasarkan gambar diagram di atas mengenai masing-masing pernyataan variabel pemanfaatan teknologi informasi berikut ini adalah gambar diagram untuk keseluruhan deskripsi dari pernyataan variabel pemanfaatan teknologi informasi yang ditunjukkan pada Gambar 4.33

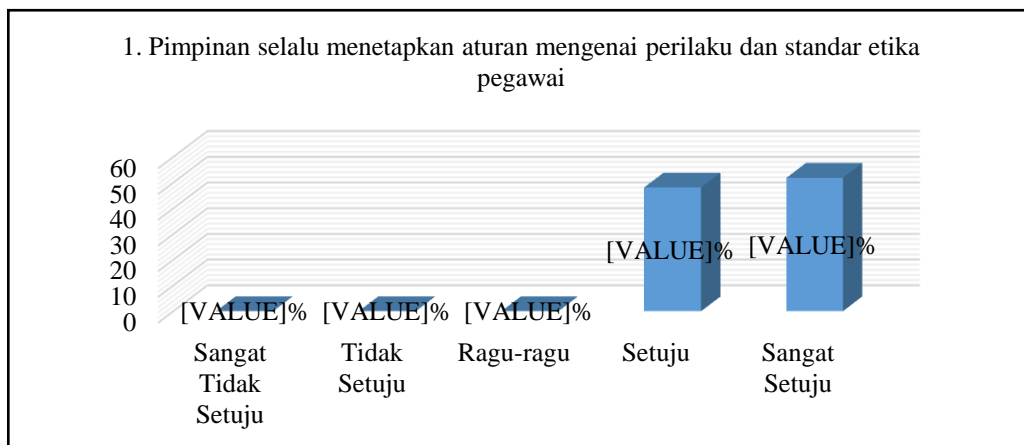


Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.33 Deskripsi Pernyataan Variabel Pemanfaatan TI

4. Sistem Pengendalian Internal (X4)

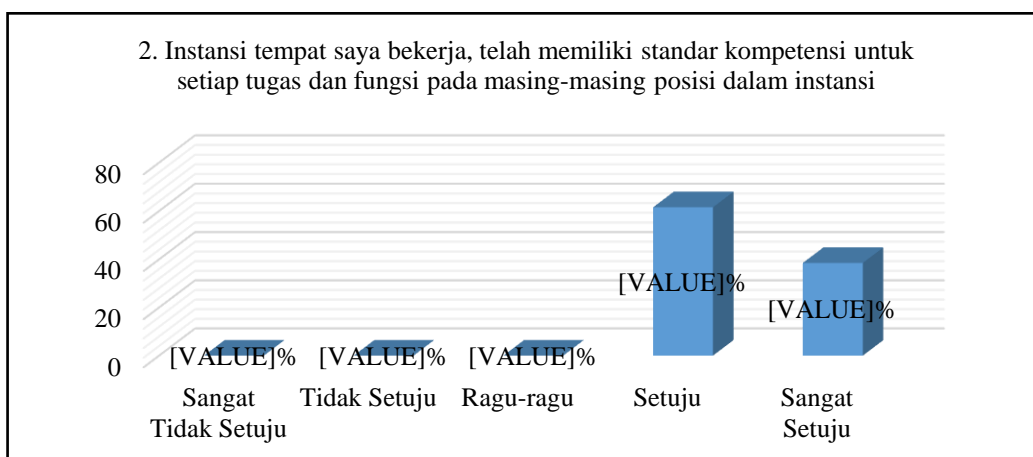
Berikut disajikan diagram atau gambaran mengenai deskripsi data variabel independen Sistem Pengendalian Internal untuk masing-masing pernyataan yang diberikan kepada pegawai BPKAD Kabupaten Bogor yaitu:



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.34 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel SPI

Berdasarkan Gambar 4.34 di atas menunjukkan untuk pernyataan 1 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 51,9% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan



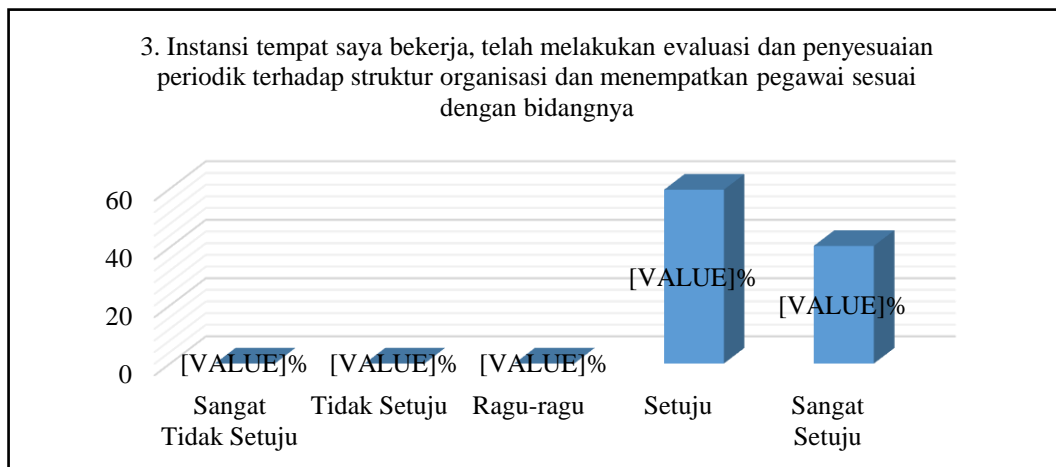
standar etika pegawai.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.35 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel SPI

Berdasarkan Gambar 4.35 di atas menunjukkan untuk pernyataan 2 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 61,5,2% yang artinya bahwa BPKAD

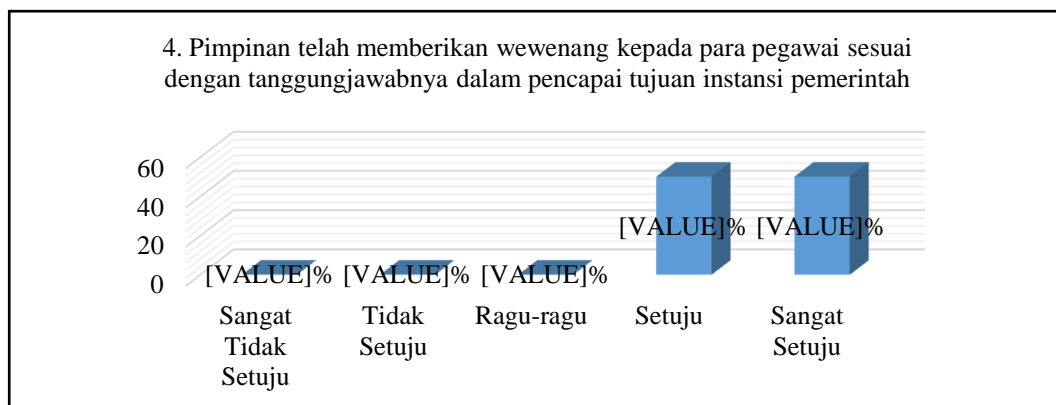
Kabupaten Bogor telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada setiap posisi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.36 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel SPI

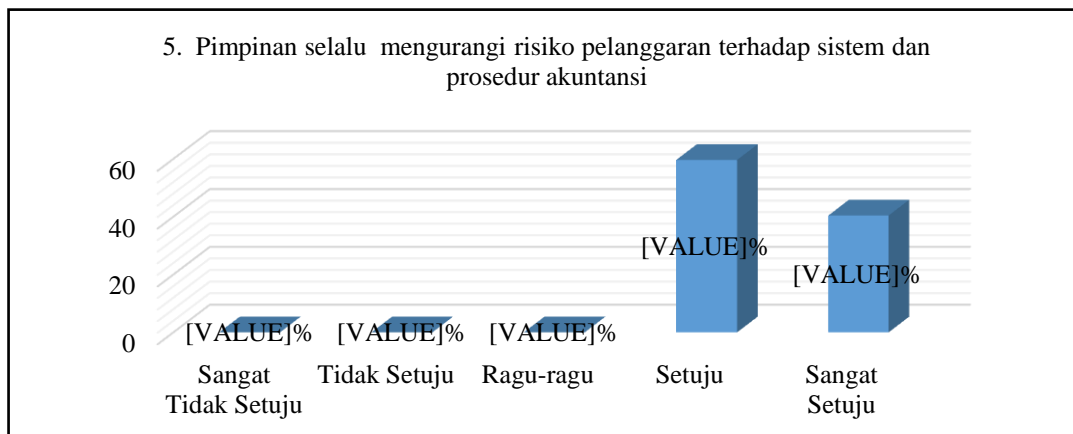
Berdasarkan Gambar 4.36 di atas menunjukkan untuk pernyataan 3 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 59,6% yang artinya bahwa BPKAS Kabupaten Bogor telah melakukan evaluasi terhadap struktur organisasi dan penempatan pegawai sesuai dengan bidangnya.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.37 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel SPI

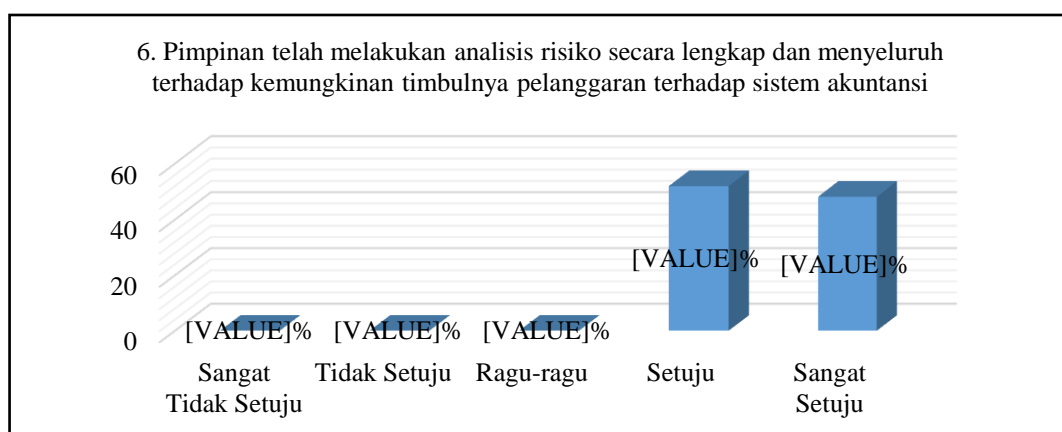
Berdasarkan Gambar 4.37 di atas menunjukkan untuk pernyataan 4 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dan sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 50,0% yang artinya bahwa telah memberikan wewenang kepada pegawai sesuai dengan tanggungjawabnya.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.38 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel SPI

Berdasarkan Gambar 4.38 di atas menunjukkan untuk pernyataan 5 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 59,6% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan

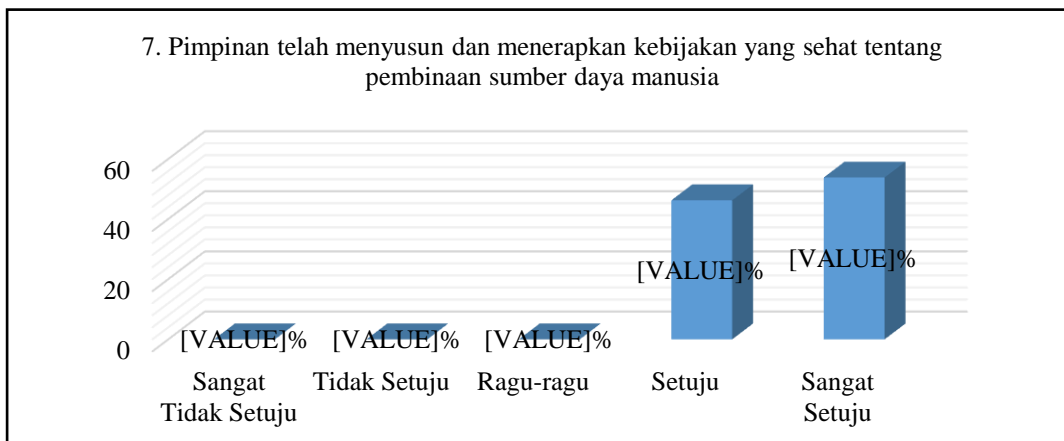


prosedur akuntansi.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.39 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel SPI

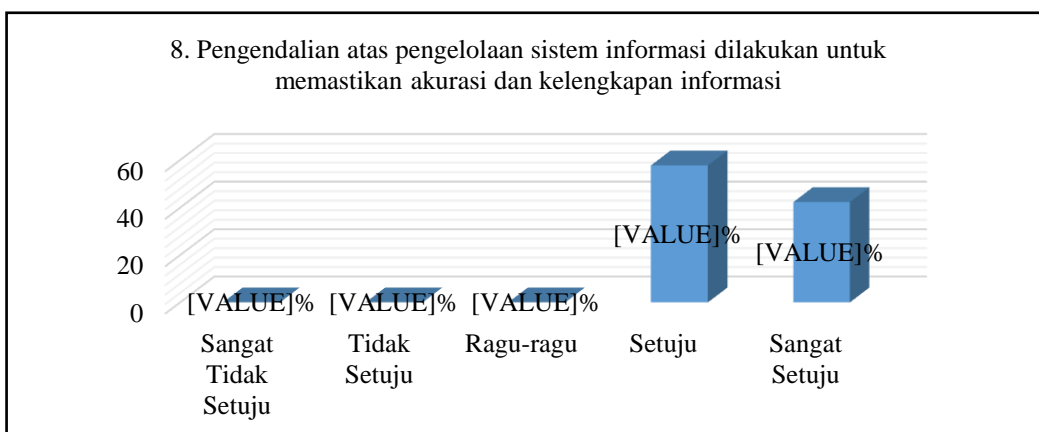
Berdasarkan Gambar 4.39 di atas menunjukkan untuk pernyataan 6 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 51,9% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor telah melakukan analisis risiko secara lengkap terhadap pelanggaran sistem akuntansi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.40 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel SPI

Berdasarkan Gambar 4.40 di atas menunjukkan untuk pernyataan 7 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 53,8% yang artinya bahwa

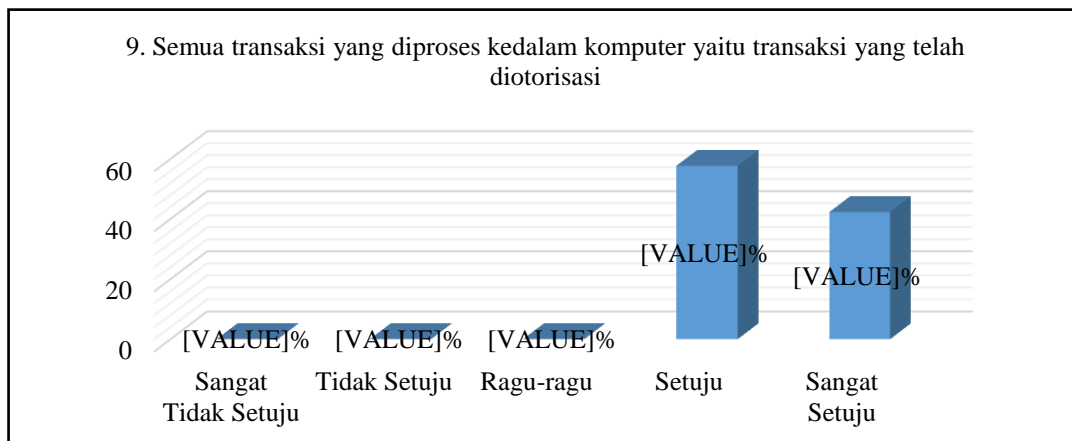


BPKAD Kabupaten Bogor selalu melakukan pembinaan SDM.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.41 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel SPI

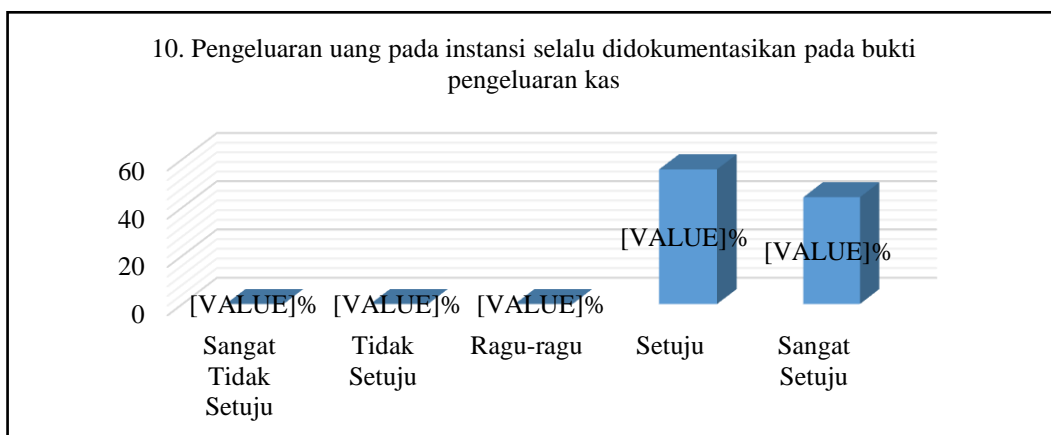
Berdasarkan Gambar 4.41 di atas menunjukkan untuk pernyataan 8 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu melakukan pengendalian atas pengelolaan sistem informasi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.42 Deskripsi Pernyataan 9 Variabel SPI

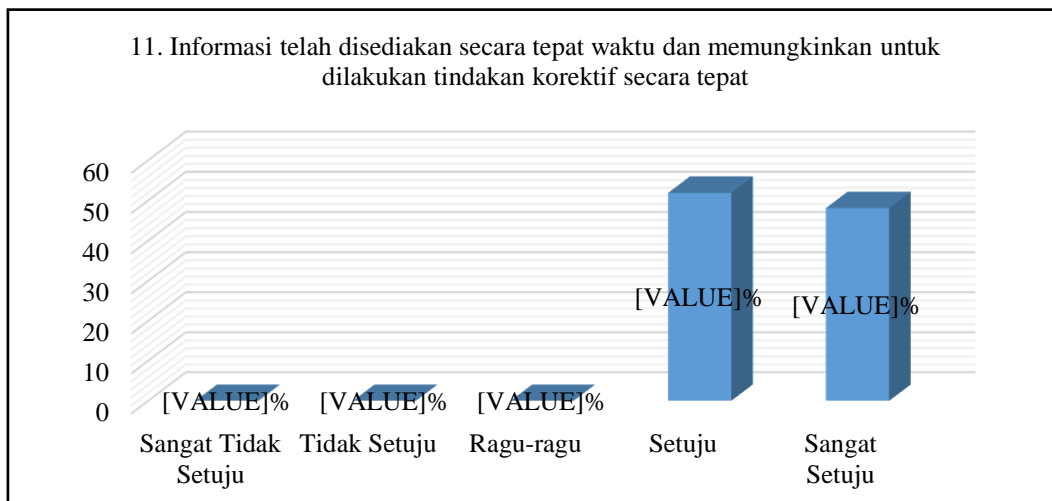
Berdasarkan Gambar 4.42 di atas menunjukkan untuk pernyataan 9 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor telah melakukan otorisasi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.43 Deskripsi Pernyataan 10 Variabel SPI

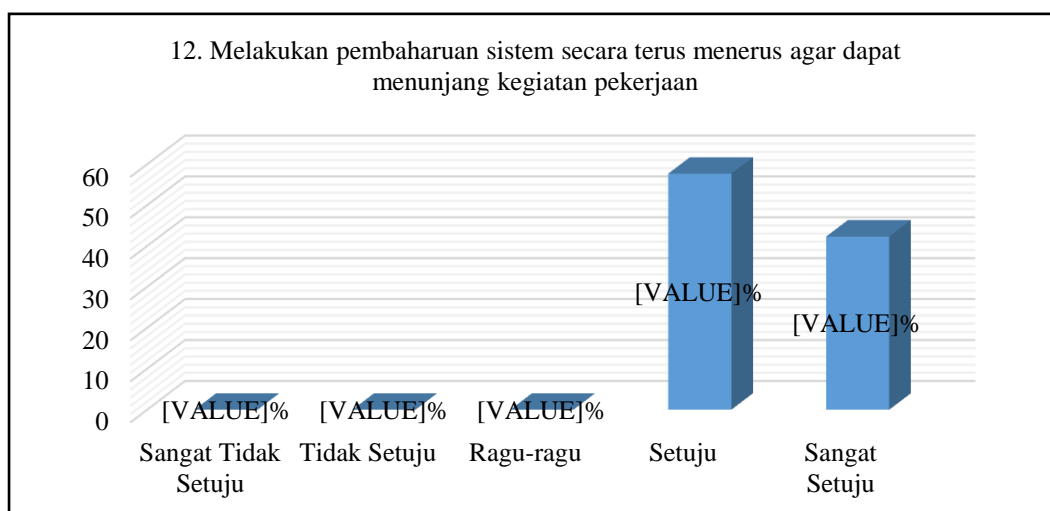
Berdasarkan Gambar 4.43 di atas menunjukkan untuk pernyataan 10 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 55,8% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu melakukan dokumentasi yang baik.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.44 Deskripsi Pernyataan 11 Variabel SPI

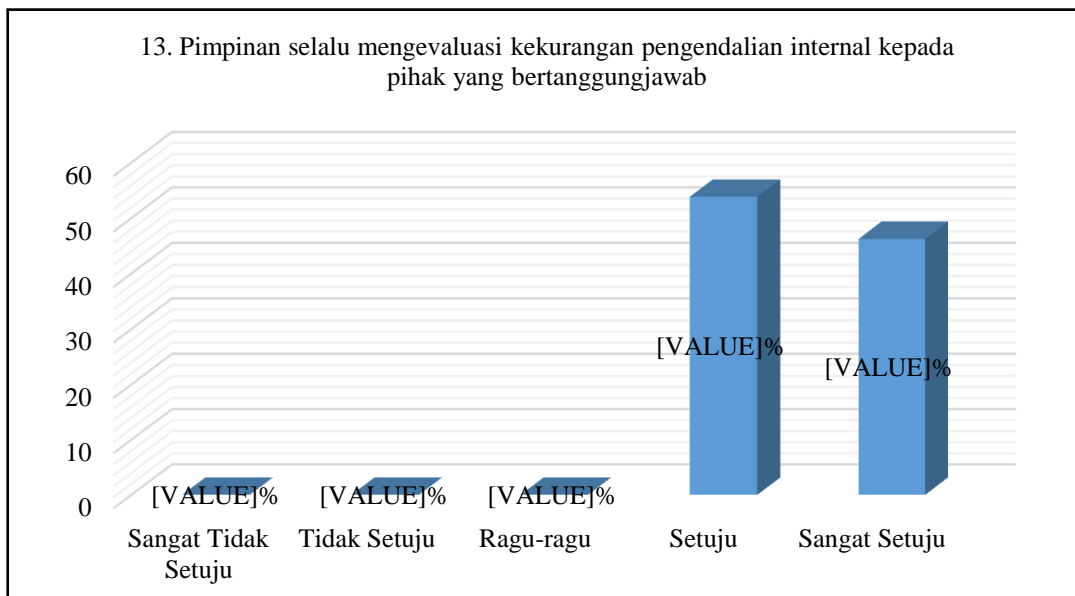
Berdasarkan Gambar 4.44 di atas menunjukkan untuk pernyataan 11 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 51,9% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu menyediakan sarana komunikasi.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.45 Deskripsi Pernyataan 12 Variabel SPI

Berdasarkan Gambar 4.45 di atas menunjukkan untuk pernyataan 12 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 57,7% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu melakukan pembaharuan sistem.



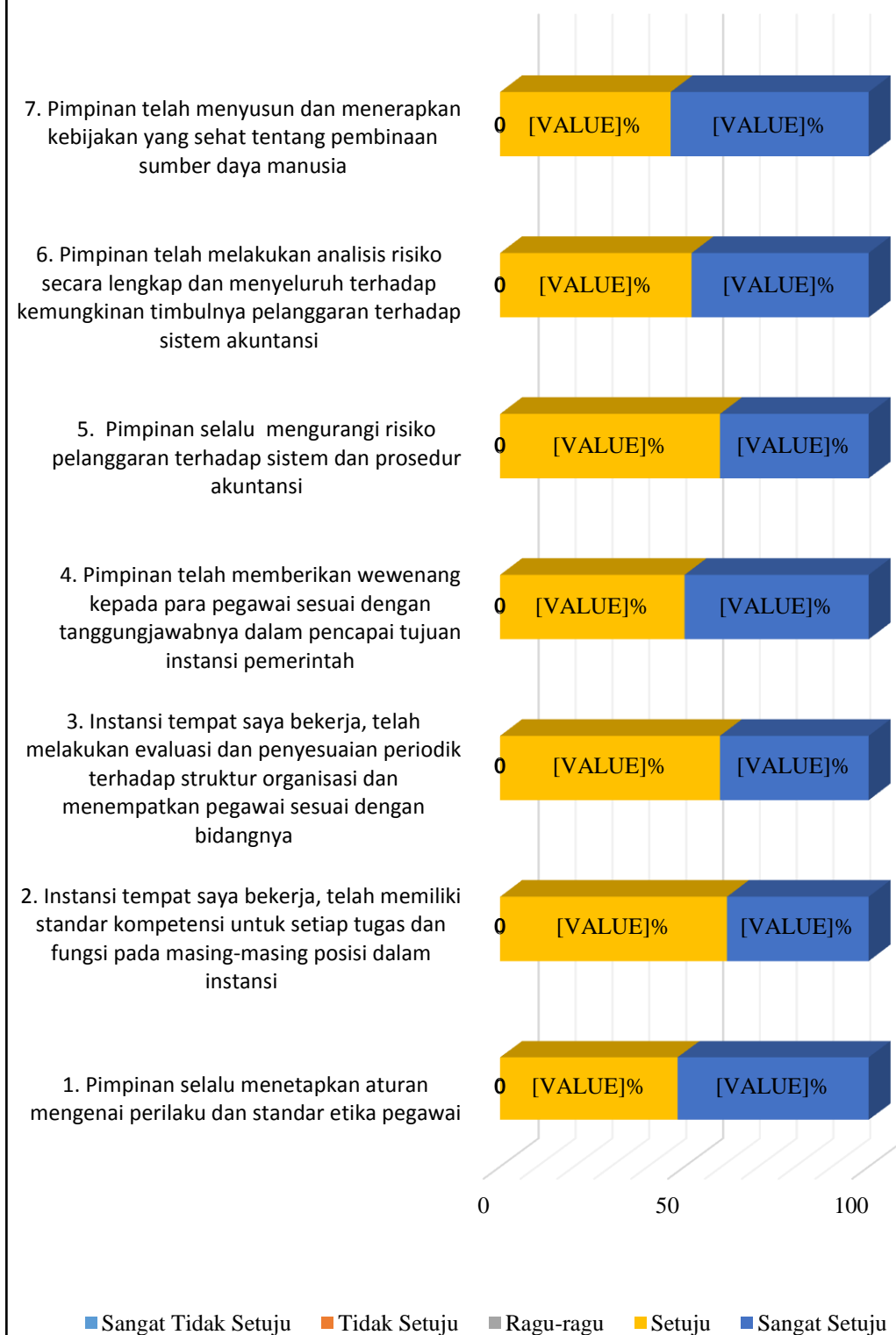
Sumber: Hasil olah data (2021)

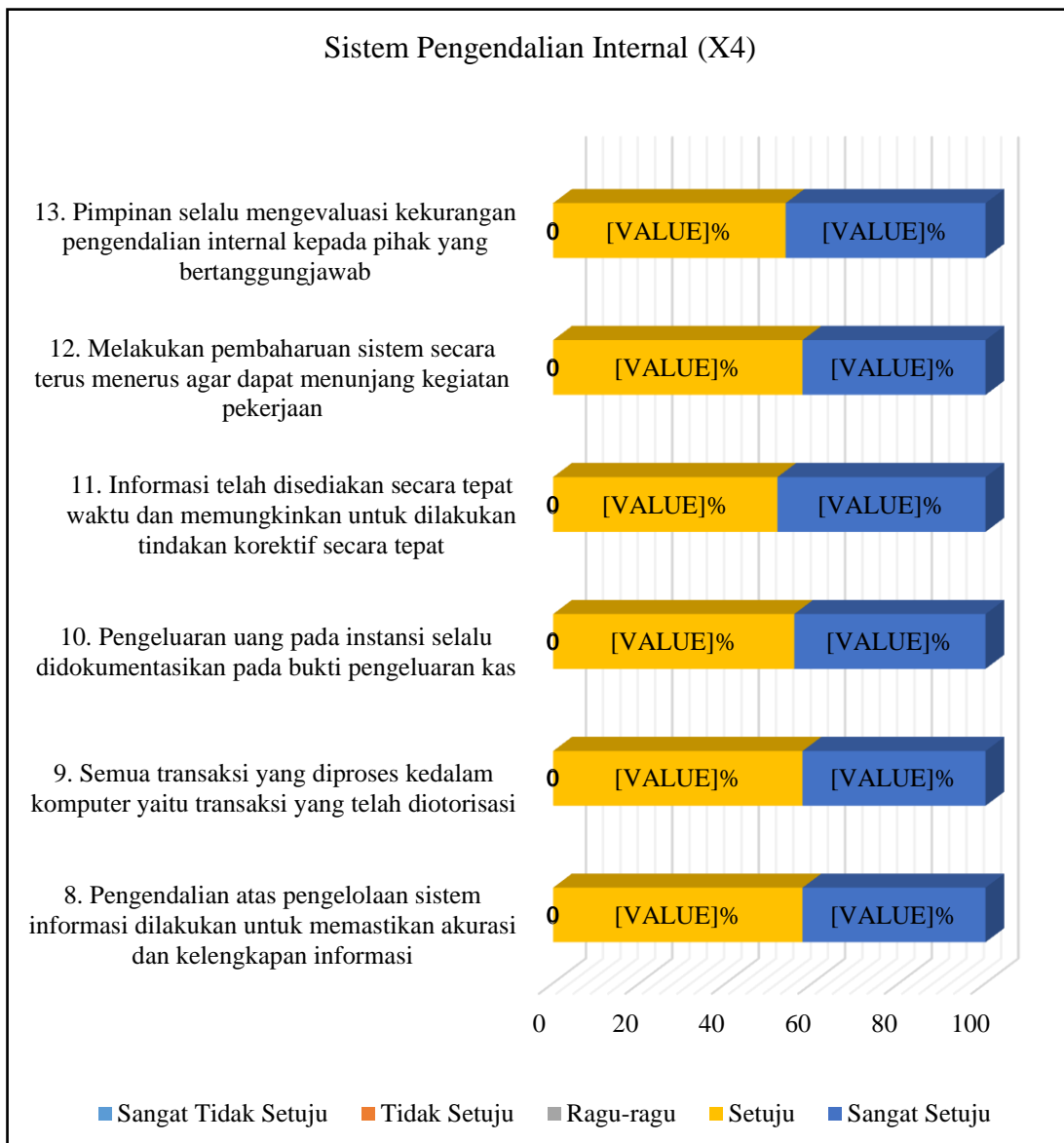
Gambar 4.46 Deskripsi Pernyataan 13 Variabel SPI

Berdasarkan Gambar 4.46 di atas menunjukkan untuk pernyataan 13 mengenai sistem pengendalian internal responden sebagian besar menjawab setuju dengan jumlah presentase sebesar 53,8% yang artinya bahwa BPKAD Kabupaten Bogor selalu melakukan evaluasi mengenai kekurangan pengendalian internal.

Berdasarkan gambar diagram di atas mengenai masing-masing pernyataan variabel sistem pengendalian internal berikut ini adalah gambar diagram untuk keseluruhan deskripsi dari pernyataan variabel sistem pengendalian internal yang ditunjukkan pada Gambar 4.47.

Sistem Pengendalian Internal (X4)



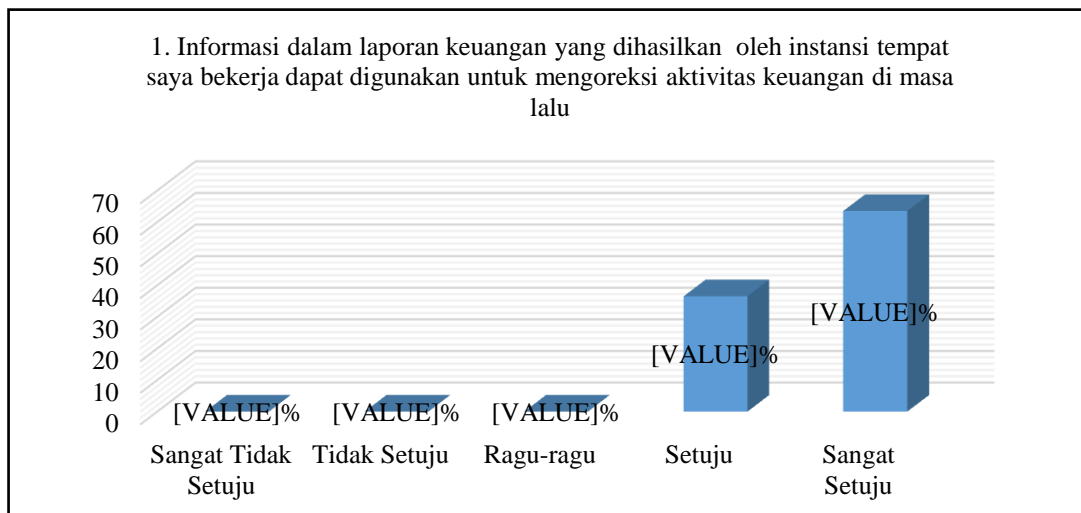


Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.47 Deskripsi Pernyataan Variabel SPI

5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)

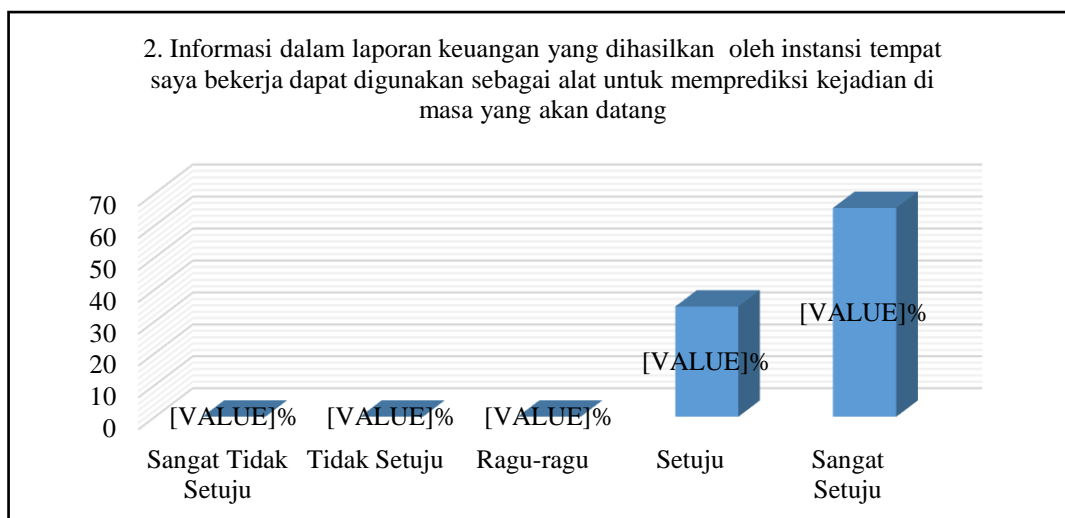
Berikut disajikan diagram atau gambaran mengenai deskripsi data variabel independen Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah untuk masing-masing pernyataan yang diberikan kepada pegawai BPKAD Kabupaten Bogor yaitu:



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.48 Deskripsi Pernyataan 1 Variabel Kualitas LKPD

Berdasarkan Gambar 4.48 di atas menunjukkan untuk pernyataan 1 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 63,5% yang artinya bahwa Informasi LK BPKAD Kabupaten Bogor dapat digunakan untuk

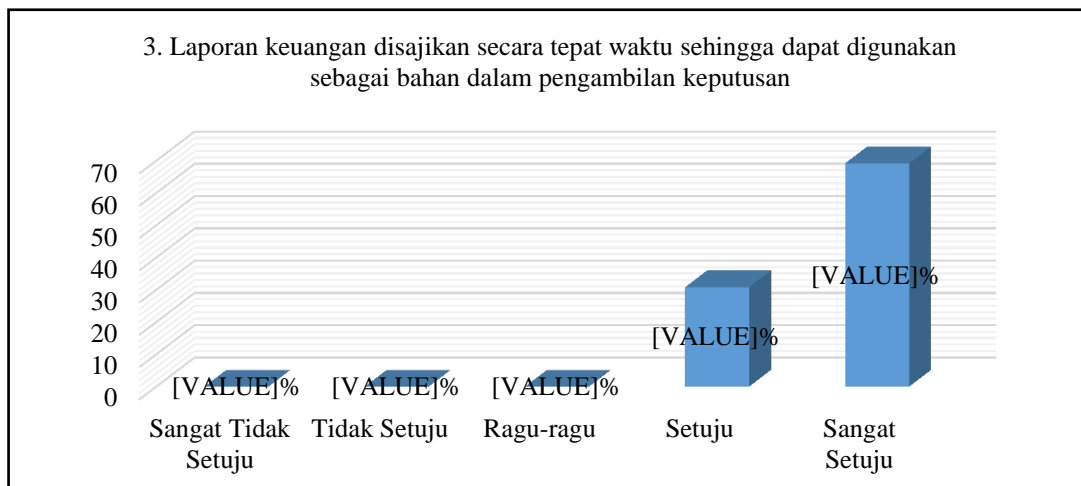


mengoreksi aktivitas.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.49 Deskripsi Pernyataan 2 Variabel Kualitas LKPD

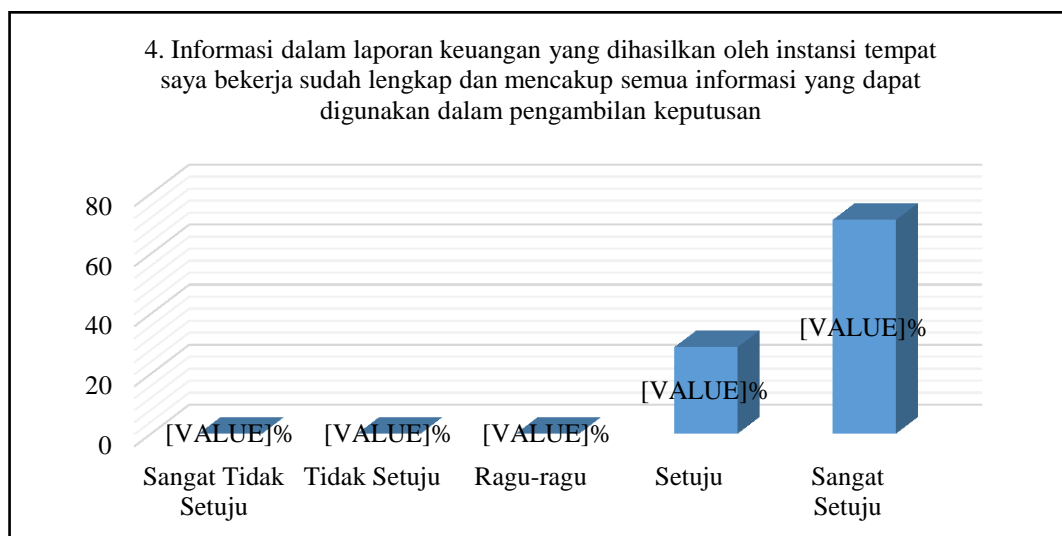
Berdasarkan Gambar 4.49 di atas menunjukkan untuk pernyataan 2 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 65,4% yang artinya bahwa Informasi LK BPKAD Kabupaten Bogor dapat digunakan untuk memprediksi kejadian dimasa yang akan datang.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.50 Deskripsi Pernyataan 3 Variabel Kualitas LKPD

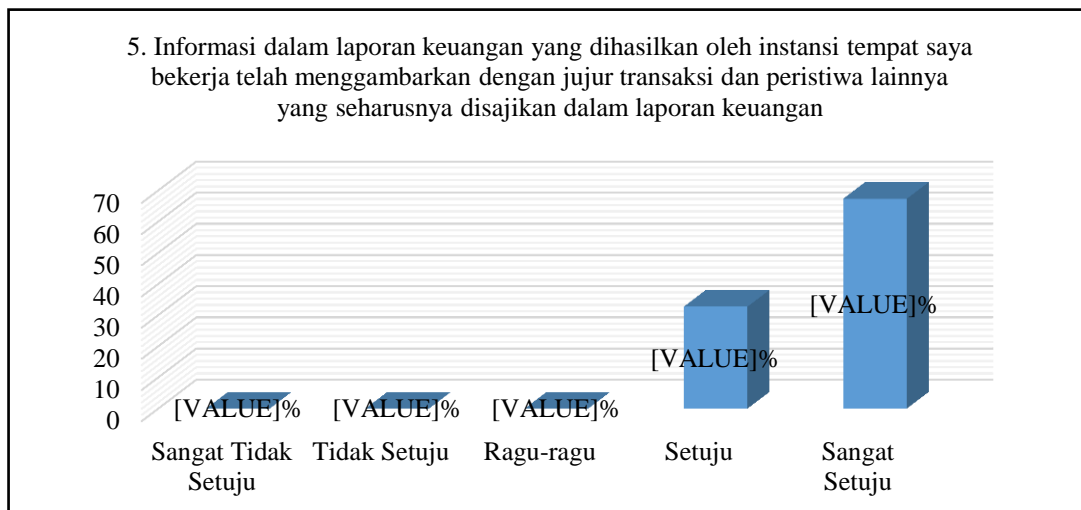
Berdasarkan Gambar 4.50 di atas menunjukkan untuk pernyataan 3 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 69,2% yang artinya bahwa LK BPKAD Kabupaten Bogor selalu disajikan tepat waktu.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.51 Deskripsi Pernyataan 4 Variabel Kualitas LKPD

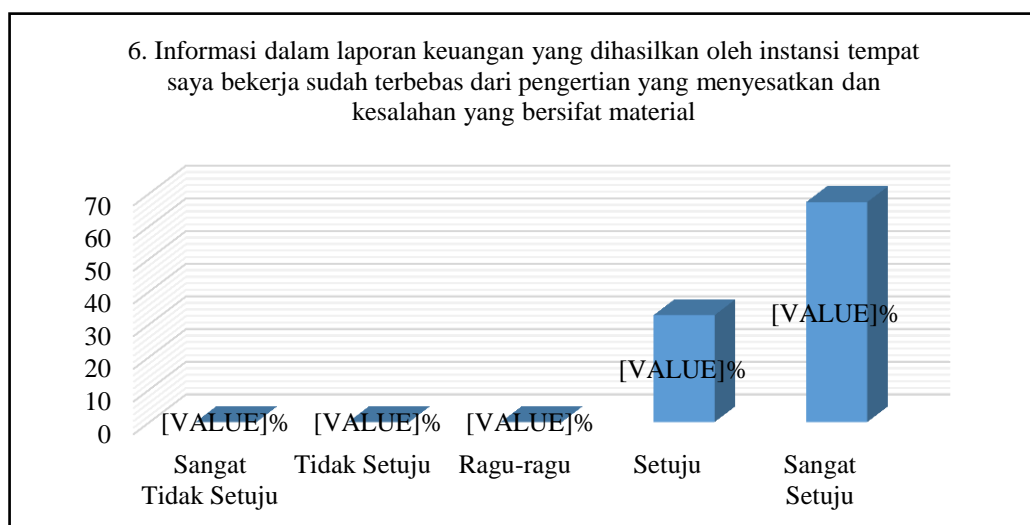
Berdasarkan Gambar 4.51 di atas menunjukkan untuk pernyataan 4 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 71,2% yang artinya bahwa informasi dalam laporan keuangan BPKAD Kabupaten Bogor sudah lengkap.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.52 Deskripsi Pernyataan 5 Variabel Kualitas LKPD

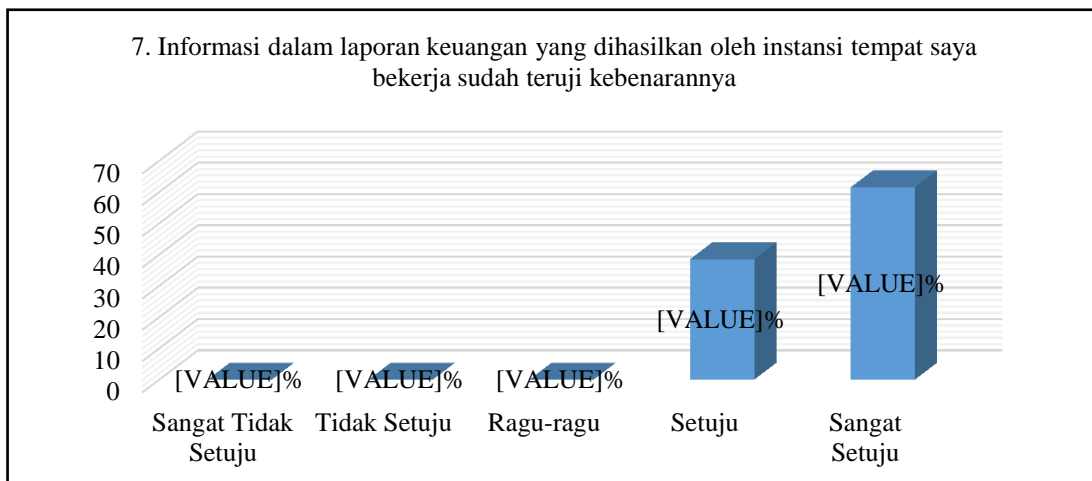
Berdasarkan Gambar 4.52 di atas menunjukkan untuk pernyataan 5 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 67,3% yang artinya bahwa informasi LK BPKAD Kabupaten Bogor telah menggambarkan transaksi dan peristiwa dalam LK.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.53 Deskripsi Pernyataan 6 Variabel Kualitas LKPD

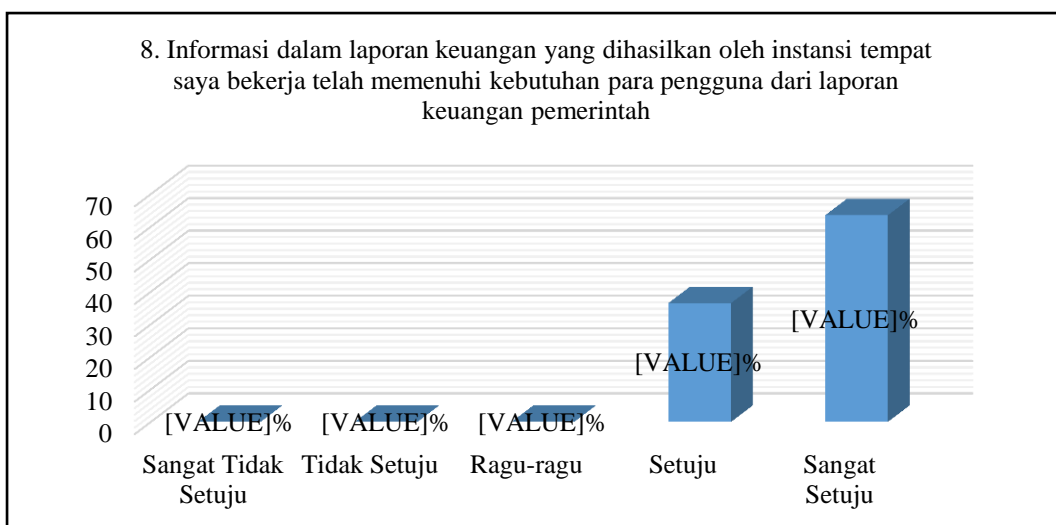
Berdasarkan Gambar 4.53 di atas menunjukkan untuk pernyataan 6 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 67,3% yang artinya bahwa informasi LK BPKAD Kabupaten Bogor terbebas dari pengertian yang menyesatkan.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.54 Deskripsi Pernyataan 7 Variabel Kualitas LKPD

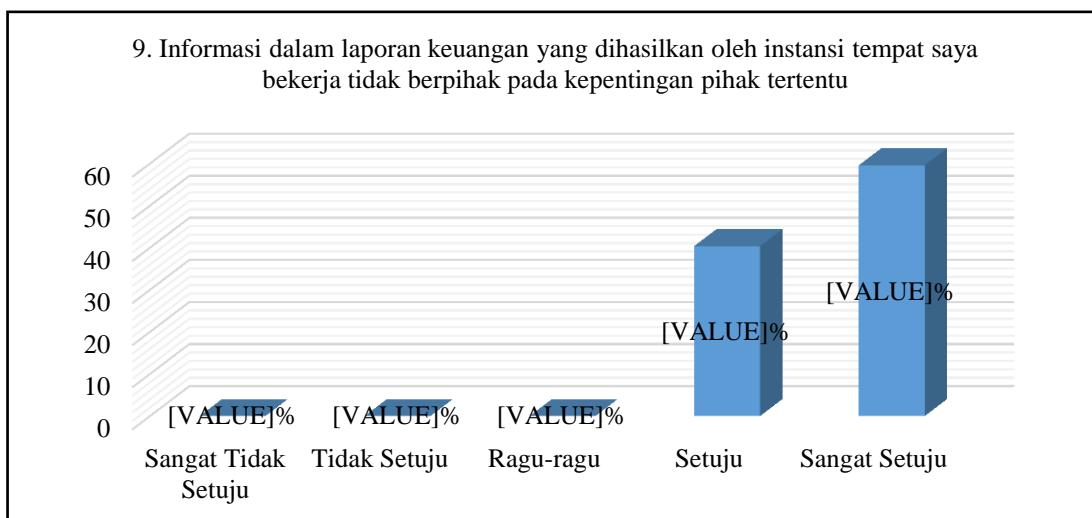
Berdasarkan Gambar 4.54 di atas menunjukkan untuk pernyataan 7 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 61,5% yang artinya bahwa LK BPKAD Kabupaten Bogor dapat teruji kebenarannya.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.55 Deskripsi Pernyataan 8 Variabel Kualitas LKPD

Berdasarkan Gambar 4.55 di atas menunjukkan untuk pernyataan 8 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar

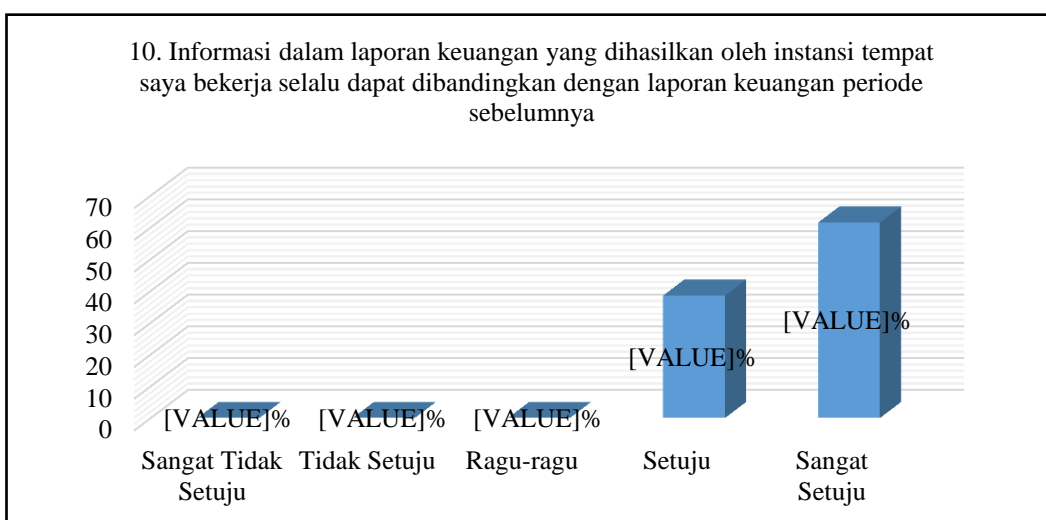


menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 63,5% yang artinya bahwa informasi LK BPKAD Kabupaten Bogor dapat memenuhi kebutuhan pengguna.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.56 Deskripsi Pernyataan 9 Variabel Kualitas LKPD

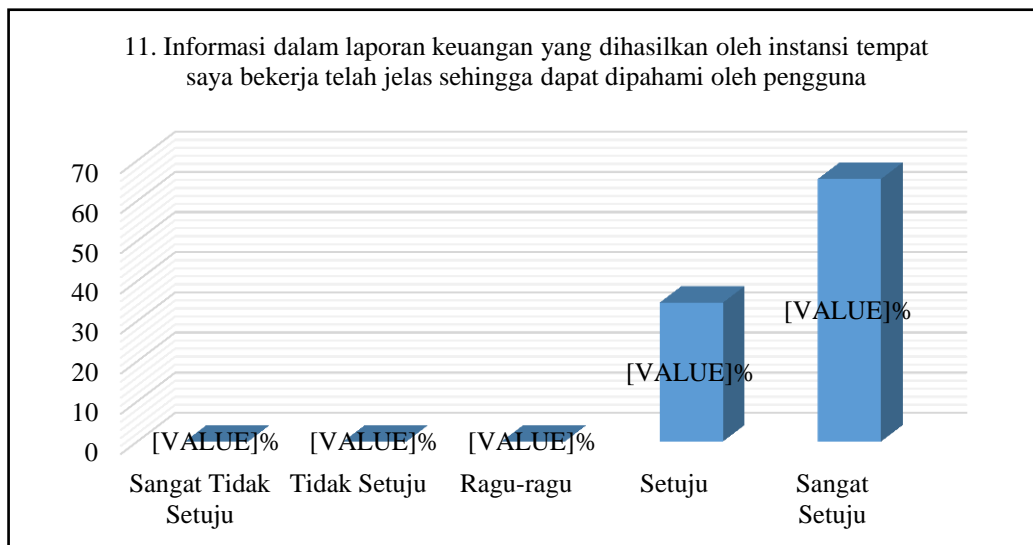
Berdasarkan Gambar 4.56 di atas menunjukkan untuk pernyataan 9 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 59,6% yang artinya bahwa informasi LK BPKAD Kabupaten Bogor disajikan secara netral atau tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.57 Deskripsi Pernyataan 10 Variabel Kualitas LKPD

Berdasarkan Gambar 4.57 di atas menunjukkan untuk pernyataan 10 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian



besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 61,5% yang artinya bahwa informasi LK BPKAD Kabupaten Bogor dapat dibandingkan.

Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.58 Deskripsi Pernyataan 11 Variabel Kualitas LKPD

Berdasarkan Gambar 4.58 di atas menunjukkan untuk pernyataan 11 mengenai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah responden sebagian besar menjawab sangat setuju dengan jumlah presentase sebesar 65,4% yang artinya bahwa informasi LK BPKAD Kabupaten Bogor dapat dipahami.

Berdasarkan gambar diagram di atas mengenai masing-masing pernyataan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah berikut ini adalah gambar diagram untuk keseluruhan deskripsi dari pernyataan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang ditunjukkan pada Gambar 4.59.



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.59 Deskripsi Pernyataan Variabel Kualitas LKPD

4.3 Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yaitu berupa pengujian hipotesis dengan menggunakan uji statistika yang dibantu dengan menggunakan *software* SPSS versi 25. Metode yang digunakan yaitu dengan menganalisis data yang telah dikumpulkan untuk mempermudah dalam menganalisis data yang telah diukur dalam penelitian, adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

4.3.1 Hasil Uji Kualitas Data

4.3.1.1 Hasil Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan berdasarkan dengan analisis item. Item suatu *instrument* atau pernyataan dapat dikatakan *valid* apabila $r\text{-hitung} > r\text{-tabel}$. Tabel berikut menunjukkan hasil uji validitas dari 5 variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan 52 sampel responden.

Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAKD (X1)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	Item/Pernyataan 1	0,877	0,268	<i>Valid</i>
2	Item/Pernyataan 2	0,844	0,268	<i>Valid</i>
3	Item/Pernyataan 3	0,909	0,268	<i>Valid</i>
4	Item/Pernyataan 4	0,898	0,268	<i>Valid</i>
5	Item/Pernyataan 5	0,838	0,268	<i>Valid</i>
6	Item/Pernyataan 6	0,888	0,268	<i>Valid</i>
7	Item/Pernyataan 7	0,795	0,268	<i>Valid</i>
8	Item/Pernyataan 8	0,901	0,268	<i>Valid</i>

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas, menunjukkan hasil pengujian validitas bahwa semua item *instrument* dalam variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang diuji dalam penelitian ini bahwa masing-masing *instrument* pernyataan dianggap *valid* karena $r\text{ hitung} > r\text{ tabel}$ pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.9 Hasil Uji Validitas Variabel Penerapan SAP (X2)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	Item/Pernyataan 1	0,825	0,268	<i>Valid</i>
2	Item/Pernyataan 2	0,753	0,268	<i>Valid</i>
3	Item/Pernyataan 3	0,848	0,268	<i>Valid</i>
4	Item/Pernyataan 4	0,827	0,268	<i>Valid</i>
5	Item/Pernyataan 5	0,833	0,268	<i>Valid</i>
6	Item/Pernyataan 6	0,861	0,268	<i>Valid</i>

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
7	Item/Pernyataan 7	0,860	0,268	<i>Valid</i>
8	Item/Pernyataan 8	0,790	0,268	<i>Valid</i>
9	Item/Pernyataan 9	0,833	0,268	<i>Valid</i>
10	Item/Pernyataan 10	0,835	0,268	<i>Valid</i>
11	Item/Pernyataan 11	0,838	0,268	<i>Valid</i>
12	Item/Pernyataan 12	0,874	0,268	<i>Valid</i>
13	Item/Pernyataan 13	0,828	0,268	<i>Valid</i>
14	Item/Pernyataan 14	0,831	0,268	<i>Valid</i>

Sumber: Hasil olah data (2021)

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.9 di atas, menunjukkan hasil pengujian validitas bahwa semua item *instrument* dalam variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diuji dalam penelitian ini bahwa masing-masing *instrument* pernyataan dianggap *valid* karena r hitung > r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.10 Hasil Uji Validitas Variabel Pemanfaatan TI (X3)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	Item/Pernyataan 1	0,772	0,268	<i>Valid</i>
2	Item/Pernyataan 2	0,841	0,268	<i>Valid</i>
3	Item/Pernyataan 3	0,867	0,268	<i>Valid</i>
4	Item/Pernyataan 4	0,877	0,268	<i>Valid</i>
5	Item/Pernyataan 5	0,883	0,268	<i>Valid</i>
6	Item/Pernyataan 6	0,863	0,268	<i>Valid</i>
7	Item/Pernyataan 7	0,790	0,268	<i>Valid</i>
8	Item/Pernyataan 8	0,856	0,268	<i>Valid</i>

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.10 di atas, menunjukkan hasil pengujian validitas bahwa semua item *instrument* dalam variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi yang diuji dalam penelitian ini bahwa masing-masing *instrument* pernyataan dianggap *valid* karena r hitung > r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.11 Hasil Uji Validitas Variabel SPI (X4)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	Item/Pernyataan 1	0,855	0,268	<i>Valid</i>
2	Item/Pernyataan 2	0,755	0,268	<i>Valid</i>
3	Item/Pernyataan 3	0,786	0,268	<i>Valid</i>
4	Item/Pernyataan 4	0,811	0,268	<i>Valid</i>
5	Item/Pernyataan 5	0,822	0,268	<i>Valid</i>
6	Item/Pernyataan 6	0,867	0,268	<i>Valid</i>
7	Item/Pernyataan 7	0,929	0,268	<i>Valid</i>

8	Item/Pernyataan 8	0,875	0,268	<i>Valid</i>
9	Item/Pernyataan 9	0,839	0,268	<i>Valid</i>
No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
10	Item/Pernyataan 10	0,864	0,268	<i>Valid</i>
11	Item/Pernyataan 11	0,867	0,268	<i>Valid</i>
12	Item/Pernyataan 12	0,767	0,268	<i>Valid</i>
13	Item/Pernyataan 13	0,876	0,268	<i>Valid</i>

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, menunjukkan hasil pengujian validitas bahwa semua item *instrument* dalam variabel Sistem Pengendalian Internal yang diuji dalam penelitian ini bahwa masing-masing *instrument* pernyataan dianggap *valid* karena r hitung > r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

Tabel 4.12 Hasil Uji Validitas Variabel Kualitas LKPD (Y)

No	Instrumen Penelitian	Corrected Item-Total Correlation (r hitung)	r tabel	Keterangan
1	Item/Pernyataan 1	0,878	0,268	<i>Valid</i>
2	Item/Pernyataan 2	0,834	0,268	<i>Valid</i>
3	Item/Pernyataan 3	0,893	0,268	<i>Valid</i>
4	Item/Pernyataan 4	0,927	0,268	<i>Valid</i>
5	Item/Pernyataan 5	0,817	0,268	<i>Valid</i>
6	Item/Pernyataan 6	0,853	0,268	<i>Valid</i>
7	Item/Pernyataan 7	0,827	0,268	<i>Valid</i>
8	Item/Pernyataan 8	0,887	0,268	<i>Valid</i>
9	Item/Pernyataan 9	0,864	0,268	<i>Valid</i>
10	Item/Pernyataan 10	0,896	0,268	<i>Valid</i>
11	Item/Pernyataan 11	0,887	0,268	<i>Valid</i>

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.12 di atas, menunjukkan hasil pengujian validitas bahwa semua item *instrument* dalam variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang diuji dalam penelitian ini bahwa masing-masing *instrument* pernyataan dianggap *valid* karena r hitung > r tabel pada signifikan 0.05 (5%).

Dilihat dari hasil uji validitas untuk seluruh variabel yang peneliti gunakan yaitu variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, sistem pengendalian internal, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dinyatakan *valid* artinya data penelitian tersebut dapat dilanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji reliabilitas.

4.3.1.2 Hasil Uji Reliabilitas

Pengujian Reliabilitas dapat dilakukan untuk menilai konsistensi dari *instrument* penelitian. Suatu *instrument* penelitian dapat dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,70. Jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih kecil 0,70 maka jawaban dari para responden terhadap kuesioner penelitian tidak reliabel. Hasil uji reliabilitas untuk seluruh variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.13.

Tabel 4.13 Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Batas Reliabilitas	Keterangan
Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)	0,953	0,70	Reliabel
Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)	0,965	0,70	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)	0,941	0,70	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X4)	0,965	0,70	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	0,968	0,70	Reliabel

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.13 di atas, diperoleh nilai *Cronbach's Alpha* atas variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebesar 0,953, penerapan standar akuntansi pemerintahan sebesar 0,965, pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,941, sistem pengendalian internal sebesar 0,965, dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0,968. Dengan demikian bahwa nilai *Cronbach's Alpha* dari semua variabel tersebut lebih besar dari 0,70. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa *instrument* dari kuesioner yang digunakan dapat dipercaya sebagai alat ukur variabel sehingga dapat melanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji statistika deskriptif.

4.3.2 Hasil Uji Statistika Deskriptif

Uji statistika deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan data yang diperoleh dan disajikan dalam bentuk tabel yang digunakan sebagai alat dalam membuat suatu kesimpulan. Dalam tabel tersebut memiliki 5 keterangan untuk masing-masing variabel yang diteliti yaitu banyaknya data, nilai minimum, nilai maksimum, *mean* (rata-rata), dan standar deviasi. Hasil uji statistika deskriptif untuk seluruh variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.14.

Tabel 4.14 Hasil Uji Statistika Deskriptif

<i>Descriptive Statistics</i>					
	N	Minimum	Maximum	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
Penerapan SAKD (X1)	52	32	40	36,37	3,543
Penerapan SAP (X2)	52	52	70	62,06	5,946
Pemanfaatan TI (X3)	52	32	40	36,06	3,398

SPI (X4)	52	52	65	57,88	5,462
Kualitas LKPD (Y)	52	44	55	51,15	4,591
Valid N (listwise)	52				

Sumber: Hasil olah data (2021)

Dari Tabel 4.14 di atas dapat diketahui untuk semua variabel yaitu variabel Penerapan SAKD, Penerapan SAP, Pemanfaatan TI, SPI, dan Kualitas LKPD memiliki jumlah data sebanyak 52 dengan:

1. Variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah memiliki nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata sebesar 36,37, dan standar deviasi sebesar 3,543.
2. Variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan memiliki nilai minimum sebesar 52, nilai maksimum sebesar 70, nilai rata-rata sebesar 62,06, dan standar deviasi sebesar 5,946.
3. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai minimum sebesar 32, nilai maksimum sebesar 40, nilai rata-rata sebesar 36,06, dan standar deviasi sebesar 3,398
4. Sistem Pengendalian Internal memiliki nilai minimum sebesar 52, nilai maksimum sebesar 65, nilai rata-rata sebesar 57,88, dan standar deviasi sebesar 5,462
5. Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah memiliki nilai minimum sebesar 44, nilai maksimum sebesar 55, nilai rata-rata sebesar 51,15, dan standar deviasi sebesar 4,591

Setelah mengetahui hasil uji statistika deskriptif, data penelitian tersebut dapat dilanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji asumsi klasik.

4.3.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

Sebelum data penelitian di analisis lebih lanjut dengan menggunakan analisis regresi linear berganda, data penelitian harus memenuhi persyaratan yang sudah dikehendaki dalam analisis regresi. Adapun persyaratan yang harus dipenuhi dalam analisis regresi linear berganda yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

4.3.3.1 Hasil Uji Normalitas Data

Uji Normalitas digunakan untuk melihat apakah beberapa variabel telah berdistribusi normal atau tidak berdistribusi normal. Kriteria pengujian normalitas yaitu dengan melihat dari uji *Kolmogorov Smirnov Test*. Hasil uji normalitas untuk seluruh variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.15.

Tabel 4.15 Hasil Uji Normalitas Data

<i>One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test</i>		
		<i>Unstandardized Residual</i>
N		52
<i>Normal Parameters^{a,b}</i>	<i>Mean</i>	,0000000
	<i>Std. Deviation</i>	2,82445337
<i>Most Extreme Differences</i>	<i>Absolute</i>	,117
	<i>Positive</i>	,113
	<i>Negative</i>	-,117
<i>Test Statistic</i>		,117
<i>Asymp. Sig. (2-tailed)</i>		,073 ^c
<i>a. Test distribution is Normal.</i>		
<i>b. Calculated from data.</i>		
<i>c. Lilliefors Significance Correction.</i>		

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.15 di atas, dapat dilihat bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig. (2-tailed)* yang diperoleh yaitu 0,073 melebihi 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal sehingga dapat melanjutkan untuk pengujian berikutnya yaitu uji multikolinearitas.

4.3.3.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas diperlukan dalam persamaan regresi linear berganda. Hal tersebut digunakan untuk melihat ada tau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel-variabel independen dalam suatu model regresi linear berganda. Hasil uji multikolinearitas untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Tabel 4.16 Hasil Uji Multikolinearitas Data

<i>Coefficients^a</i>								
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.	<i>Collinearity Statistics</i>	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,538	5,012		1,903	,063		
	Penerapan SAKD (X1)	,585	,198	,451	2,958	,005	,346	2,889
	Penerapan SAP (X2)	,380	,119	,492	3,200	,002	,341	2,935
	Pemanfaatan TI (X3)	,479	,179	,355	2,670	,010	,456	2,191

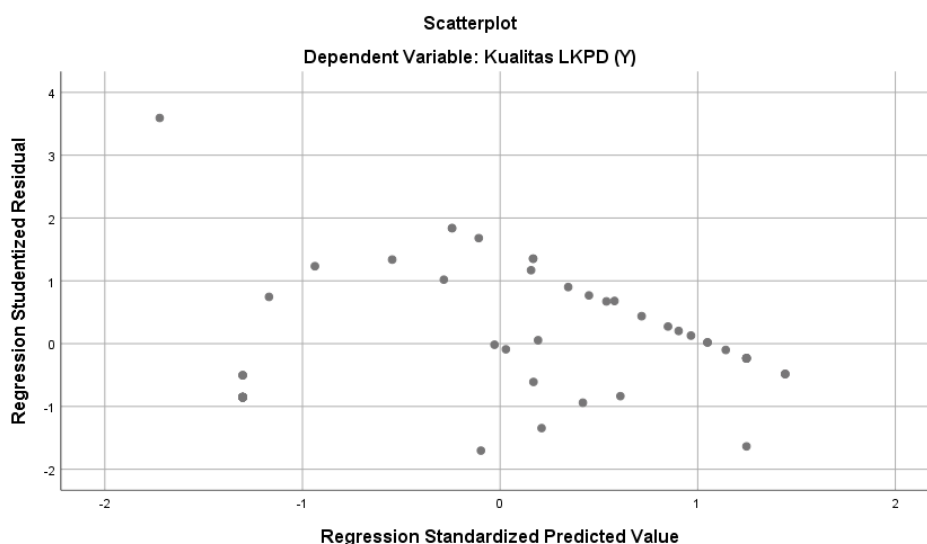
	SPI (X4)	-,354	,158	-,421	- 2,246	,029	,229	4,368
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD (Y)								

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.16 di atas, terlihat bahwa nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah < 10 . Dengan nilai VIF dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 2,889, nilai VIF dari penerapan standar akuntansi pemerintahan (X2) sebesar 2,935, nilai VIF dari pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 2,191, nilai VIF dari sistem pengendalian internal (X4) sebesar 4,368. Sedangkan untuk nilai *Tolerance* $> 0,10$ dengan nilai *tolerance* dari penerapan sistem akuntansi keuangan daerah (X1) sebesar 0,346, nilai *tolerance* dari penerapan standar akuntansi pemerintahan (X2) sebesar 0,341, nilai *tolerance* dari pemanfaatan teknologi informasi (X3) sebesar 0,456, nilai *tolerance* dari sistem pengendalian internal (X4) sebesar 0,229. Jadi berdasarkan nilai VIF dan *Tolerance* dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi sehingga dapat melanjutkan untuk pengujian berikutnya yaitu uji heteroskedastisitas.

4.3.3.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas diperlukan dalam persamaan regresi linear berganda. Hal tersebut digunakan untuk melihat ada tidaknya kesamaan varians dari residual antara observasi satu dengan yang lainnya. Hasil uji heteroskedastisitas untuk seluruh variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 4.6



Sumber: Hasil olah data (2021)

Gambar 4.60 Diagram *Scatterplot*

Berdasarkan Gambar 4.60 di atas, diperoleh hasil bahwa diagram *scatterplot* menggambarkan titik-titik data tersebar secara acak tidak membentuk suatu pola tertentu serta titik-titik data menyebar di atas dan di bawah atau di sekitar angka 0. Hal tersebut membuktikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi sehingga dapat melanjutkan untuk pengujian berikutnya yaitu uji regresi linear berganda.

4.3.4 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda memiliki fungsi untuk menentukan pengaruh variabel X yaitu Penerapan SAKD, Penerapan SAP, Pemanfaatan TI, dan SPI terhadap variabel Y yaitu Kualitas LKPD. Hasil uji analisis regresi linear berganda untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17 Hasil Uji Regresi Linear Berganda

<i>Coefficients^a</i>						
Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,538	5,012		1,903	,063
	Penerapan SAKD (X1)	,585	,198	,451	2,958	,005
	Penerapan SAP (X2)	,380	,119	,492	3,200	,002
	Pemanfaatan TI (X3)	,479	,179	,355	2,670	,010
	SPI (X4)	-,354	,158	-,421	-2,246	,029

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD (Y)

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.17 di atas, dilihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* kolom B, persamaan dari analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,358 + 0,585 X_1 + 0,380 X_2 + 0,479 X_3 - 0,354 X_4 + e$$

Dari persamaan regresi di atas, nilai konstanta adalah sebesar 9,538 hal ini berarti apabila tidak ada perubahan variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD), Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI), dan Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang mempengaruhi, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terjadi pada Kabupaten Bogor sebesar 9,538. Sedangkan hasil uji regresi linear berganda untuk variabel independen dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai koefisien regresi variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) sebesar 0,585. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,585 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

2. Nilai koefisien regresi variabel Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebesar 0,380. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan penerapan standar akuntansi pemerintahan satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,380 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
3. Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (TI) sebesar 0,479. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan pemanfaatan teknologi informasi satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah naik sebesar 0,479 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.
4. Nilai koefisien regresi variabel Sistem Pengendalian Internal (SPI) sebesar -0,354. Hal tersebut dapat diartikan bahwa untuk setiap kenaikan sistem pengendalian internal satu satuan maka variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah turun sebesar -0,354 dengan asumsi bahwa variabel independen yang lainnya tetap.

Dilihat dari hasil uji regresi linear berganda untuk seluruh variabel independen yang peneliti gunakan yaitu variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal dinyatakan lolos dan dapat melanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji hipotesis.

4.3.5 Hasil Uji Hipotesis

4.3.5.1 Hasil Uji Koefisien Regresi Parsial (uji t)

Uji koefisien regresi parsial (uji t) digunakan untuk membandingkan antara nilai t-hitung dengan nilai t-tabel dengan kaidah keputusan, jika nilai t-hitung > t-tabel maka hipotesis diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X berpengaruh terhadap variabel Y, begitupun sebaliknya. Hasil uji t untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.18.

Tabel 4.18 Hasil Uji Parsial (uji t)

Model		<i>Coefficients^a</i>		t	Sig.	
		<i>Unstandardized Coefficients</i>				<i>Standardized Coefficients</i>
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,538	5,012		1,903	,063
	Penerapan SAKD (X1)	,585	,198	,451	2,958	,005
	Penerapan SAP (X2)	,380	,119	,492	3,200	,002
	Pemanfaatan TI (X3)	,479	,179	,355	2,670	,010
	SPI (X4)	-,354	,158	-,421	-2,246	,029

a. Dependent Variable: Kualitas LKPD (Y)

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.18 di atas, hasil uji t sebagai berikut:

1. Variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah memiliki nilai t-hitung sebesar 2,958 dimana t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($2,958 > 2,011$). Dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H1 diterima**, yang menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
2. Variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan memiliki nilai t-hitung sebesar 3,200 dimana t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($3,200 > 2,011$). Dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,002 ($0,002 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H2 diterima**, yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki nilai t-hitung sebesar 2,670 dimana t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($2,670 > 2,011$). Dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,010 ($0,010 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H3 diterima**, yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.
4. Variabel sistem pengendalian internal memiliki nilai t-hitung sebesar -2,246 dimana -t hitung kurang dari dari -t tabel ($-2,246 < -2,011$). Dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,029 ($0,029 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H4 diterima**, yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Dari hasil uji koefisien regresi secara parsial untuk seluruh variabel independen menunjukkan bahwa seluruh uji hipotesis tersebut diterima dan dapat melanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji koefisien regresi secara simultan.

4.3.5.2 Hasil Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (uji F)

Uji koefisien regresi secara simultan (uji F) memiliki suatu fungsi untuk mengetahui pengaruh secara simultan (bersama-sama) antara variabel X terhadap variabel Y. Hasil uji F untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Tabel 4.19 Hasil Uji Simultan (uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	667,915	4	166,979	19,289	,000 ^b
	Residual	406,854	47	8,656		
	Total	1074,769	51			
a. Dependent Variable: Kualitas LKPD (Y)						
b. Predictors: (Constant), SPI (X4), Pemanfaatan TI (X3), Penerapan SAKD (X1), Penerapan SAP (X2)						

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.19 di atas, menunjukkan nilai dari hasil perhitungan regresi dengan nilai F-hitung sebesar 19,289 dimana F-tabel adalah sebesar 2,80, sehingga F-hitung > F-tabel dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan antara variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H5 diterima**, yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara simultan meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga dapat ikut meningkat.

Dari hasil uji koefisien regresi secara simultan (bersama-sama) menunjukkan bahwa uji hipotesis tersebut diterima dan dapat melanjutkan untuk uji selanjutnya yaitu uji koefisien determinasi.

4.3.5.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk memprediksi seberapa besar kontribusi pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Nilai koefisien determinasi besarnya berada pada kisaran 0% - 100%. Hasil uji R^2 untuk seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 4.20.

Tabel 4.20 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

<i>Model Summary^b</i>				
Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	,788 ^a	,621	,589	2,942
a. Predictors: (Constant), SPI, Pemanfaatan TI, Penerapan SAKD, Penerapan SAP				
b. Dependent Variable: Kualitas LKPD				

Sumber: Hasil olah data (2021)

Berdasarkan Tabel 4.20 di atas, menunjukkan nilai dari hasil uji koefisien determinasi (R^2) dengan nilai *Adjusted R square* yang diperoleh sebesar 0,589 atau 58,9%. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa besarnya peran atau kontribusi variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 58,9%, sedangkan sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

4.4 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (studi empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor), maka dapat dilakukan suatu pembahasan atau analisis antara kesesuaian teori dengan prakteknya yaitu sebagai berikut:

4.4.1 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Sebagai Proksi dari Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan, andal, dapat dipercaya, dan dapat dikatakan berkualitas, instansi pemerintah daerah harus menerapkan atau memiliki suatu Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang sangat andal.

Pengertian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan serangkaian prosedur yang dapat dilakukan mulai dari pengidentifikasian, pengukuran, dan pencatatan yang dapat dilakukan dengan dua hal baik secara manual ataupun bantuan dari aplikasi komputer sehingga dapat menghasilkan suatu laporan yang relevan, andal, tepat waktu, dan akurat. Laporan keuangan daerah yang akurat dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dan dapat dipertanggungjawabkan. Implementasi sistem akuntansi keuangan daerah harus

berlandaskan pada kebijakan akuntansi yang berlaku, sehingga laporan keuangan pemerintah daerah dapat berkualitas.

Hasil dari pengujian uji t atau uji regresi secara parsial variabel X1 memiliki nilai t-hitung sebesar 2,958 dimana t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($2,958 > 2,011$). Dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,005 ($0,005 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H1 diterima**, yang menyatakan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Penjelasan lebih dalam mengenai pengaruh dari penerapan SAKD dapat dilihat pada gambar 4.9 dimana peneliti menggunakan pengukuran pada variabel X1 ini terdiri dari 3 indikator yaitu pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan dengan ukuran sebanyak 8 pernyataan. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan para responden memilih jawaban sangat setuju untuk semua item kecuali item 5 para responden memilih jawaban setuju, artinya seluruh responden menyetujui serta melaksanakan pernyataan yang di berikan oleh peneliti.

Dapat dikatakan bahwa tingkat penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat penerapan SAKD termasuk salah satu faktor yang menentukan laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas. Dengan begitu, semakin digunakannya SAKD dengan baik maka laporan keuangan semakin berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Pujanira (2017) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menurut Utami (2018) menyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.4.2 Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Sebagai Proksi dari Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat berdampak pada peningkatan dari kualitas laporan keuangan pemerintah pusat maupun daerah. Penerapan standar akuntansi pemerintahan harus selalu mengacu pada peraturan standar akuntansi pemerintah yang berlaku di Indonesia saat ini. Peraturan tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan salah satu aspek penting yang sangat diperlukan dalam meningkatkan kualitas

tata kelola keuangan Negara dan pellaoran keuangan pemerintah yang didalamnya berisikan suatu prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun serta menyajikan suatu laporan keuangan kepada organisasi pemerintahan. Sehingga SAP merupakan suatu pedoman yang digunakan oleh setiap instansi pemerintahan di Indonesia dan memiliki kekuatan hukum yang dibuat sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan.

Hasil dari pengujian uji t atau uji regresi secara parsial variabel X2 memiliki nilai t-hitung sebesar 3,200 dimana t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($3,200 > 2,011$). Dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,002 ($0,002 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H2 diterima**, yang menyatakan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Penjelasan lebih dalam mengenai pengaruh dari penerapan SAP dapat dilihat pada gambar 4.24 dimana peneliti menggunakan pengukuran pada variabel X2 ini terdiri dari 12 indikator yaitu PSAP No. 01 sampai dengan PSAP No. 12, dengan ukuran sebanyak 14 pernyataan. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan para responden memilih jawaban setuju untuk item pernyataan 1,2,3,4,5,6,8,9,11, dan 14. Sedangkan untuk item 7,10,12, dan 13 para responden memilih jawaban sangat setuju, artinya seluruh responden menyetujui serta melaksanakan pernyataan yang di berikan oleh peneliti dan responden telah menerapkan PSAP No. 01 sampai dengan PSAP No. 12.

Dapat dikatakan bahwa tingkat penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerntah Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat penerapan SAP termasuk salah satu faktor yang menentukan laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas. Dengan begitu, semakin digunakannya SAP sebagai pedoman dalam pembuatan dan penyajian dari laporan keuangan maka isi dari laporan keuangan juga semakin berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Utami (2018) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dan menurut Yanti, Made, dan Wahyu (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.4.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi Sebagai Proksi dari Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi keuangan Daerah. Bahwa dalam rangka untuk menindak lanjuti terselenggaranya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip tata pemerintah yang baik (*good governance*), pemerintah pusat dan daerah berkewajiban dalam mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan dari teknologi informasi untuk meningkatkan dalam mengelola dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan publik.

Hasil dari pengujian uji t atau uji regresi secara parsial variabel X3 memiliki nilai t-hitung sebesar 2,670 dimana t-hitung lebih besar dari pada t-tabel ($2,670 > 2,011$). Dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,010 ($0,010 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H3 diterima**, yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Penjelasan lebih dalam mengenai pengaruh dari Pemanfaatan TI dapat dilihat pada gambar 4.33 dimana peneliti menggunakan pengukuran pada variabel X3 ini terdiri dari 3 indikator yaitu Perangkat, Pengelolaan Data Keuangan, dan Perawatan, dengan ukuran sebanyak 8 pernyataan. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan para responden memilih jawaban setuju untuk item pernyataan 2, 7 dan 8. Sedangkan untuk item 1,3,4,5, dan 6 para responden memilih jawaban sangat setuju, artinya seluruh responden menyetujui serta melaksanakan pernyataan yang di berikan oleh peneliti.

Dapat dikatakan bahwa tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil perhitungan dan penjelasan tersebut maka dapat dikatakan bahwa tingkat Pemanfaatan Teknologi Informasi termasuk salah satu faktor yang menentukan laporan keuangan pemerintah daerah berkualitas. Oleh sebab itu dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan dari teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, maka dapat disimpulkan semakin baik pemanfaatan teknologi informasi maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Alifa (2017), Mene, Karamoy, dan Warongan (2018), dan Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.4.4 Sistem Pengendalian Internal Sebagai Proksi dari Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah. Sistem pengendalian internal pemerintah yaitu merupakan suatu proses yang integral pada tindakan serta kegiatan yang dapat dilakukan secara terus menerus oleh seluruh pimpinan dan seluruh pegawai untuk dapat memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan dari organisasi dengan melalui beberapa kegiatan yang efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang andal, pengamanan aset Negara, dan ketaatan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hasil dari pengujian uji t atau uji regresi secara parsial variabel X4 memiliki nilai t-hitung sebesar -2,246 dimana -t hitung kurang dari -t tabel ($-2,246 < -2,011$) Dengan taraf signifikan dibawah tingkat kesalahan $\alpha = 5\%$ yaitu sebesar 0,029 ($0,029 < 0,05$). Berdasarkan hasil perhitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bogor. Hasil tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H4 diterima**, yang dapat dinyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Penjelasan lebih dalam mengenai pengaruh dari Sistem Pengendalian Internal dapat dilihat pada gambar 4.47 dimana peneliti menggunakan pengukuran pada variabel X4 ini terdiri dari 5 indikator yaitu Lingkungan Pengendalian, Penilaian Risiko, Kegiatan Pengendalian, Informasi dan Komunikasi dan Pemanfaatan Pengendalian Internal dengan ukuran sebanyak 13 pernyataan. Pada tabel tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan para responden memilih jawaban setuju untuk item pernyataan 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12 dan 13. Sedangkan untuk item 1, 4 dan 7, para responden memilih jawaban sangat setuju, artinya seluruh responden menyetujui serta melaksanakan pernyataan yang di berikan oleh peneliti.

Dapat dikatakan dan disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan sudah baik, namun seluruhnya belum dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Harnoni (2016) dan Fatmala dan Salisa (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah serta menurut Mokoginta, Lambey, dan Pontoh (2017) menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.4.5 Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil pengujian dengan nilai F-hitung yaitu sebesar 19,289 dengan taraf signifikan sebesar 0,000 yang memiliki arti bahwa secara keseluruhan yakni variabel Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal secara simultan (bersama-sama) berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Dilihat dari hasil pengujian koefisien determinasi juga bahwa nilai *adjusted R square* sebesar 0,589 nilai tersebut menunjukkan bahwa 58,9% variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu variabel penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal. Sedangkan sisanya sebesar 41,1% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Maka hal tersebut membuktikan bahwa hipotesis **H5 diterima** yang dapat dinyatakan bahwa penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan yaitu apabila penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian internal secara bersama-sama meningkat maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga ikut meningkat. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ardianto dan Eforis (2019) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada BPKAD Kabupaten Bogor). Dengan menggunakan 4 variabel independen yaitu penerapan sistem akuntansi keuangan daerah sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD, penerapan standar akuntansi pemerintahan sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD, pemanfaatan teknologi informasi sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD, dan sistem pengendalian internal sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD serta 1 variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Pengujian terkait pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tersebut berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah peneliti bahas sebelumnya, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil pengujian hipotesis pertama (H1) disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian uji t untuk variabel penerapan SAKD yang memiliki nilai t-hitung sebesar 2,958 dengan taraf signifikan 0,005 yang artinya variabel penerapan SAKD tersebut berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang semakin baik, dapat meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
2. Dari hasil pengujian hipotesis kedua (H2) disimpulkan bahwa Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor. Hal tersebut dapat dibuktikan dari pengujian uji t untuk variabel penerapan SAP yang memiliki nilai t-hitung sebesar 3,200 dengan taraf signifikan 0,002 yang artinya variabel penerapan SAP berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik dalam Menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dapat semakin baik.
3. Dari hasil pengujian hipotesis ketiga (H3) disimpulkan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian uji t untuk variabel pemanfaatan TI yang

memiliki nilai t-hitung sebesar 2,670 dengan taraf signifikan 0,010 yang artinya variabel Pemanfaatan TI berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya tingkat Penggunaan Komputer dengan didukung Jaringan Internet yang kuat sebagai penghubung informasi pemerintah daerah untuk Pengelolaan Data Keuangan, maka dapat berpengaruh baik terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang disajikan.

4. Dari hasil pengujian hipotesis keempat (H4) disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Internal sebagai proksi dari faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas LKPD terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada BPKAD Kabupaten Bogor. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil pengujian uji t untuk variabel SPI yang memiliki nilai t-hitung sebesar -2,246 dengan taraf signifikan 0,029 yang artinya variabel SPI berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Internal yang diterapkan sudah baik, namun seluruhnya belum dijalankan secara efektif dan efisien sehingga menyebabkan kurangnya kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.
5. Dari hasil pengujian hipotesis kelima (H5) disimpulkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal secara bersama-sama terbukti berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor. Hal tersebut dapat dibuktikan dari hasil uji F dengan nilai F-hitung sebesar 19,289 dengan taraf signifikan 0,000 yang artinya variabel penerapan SAKD, penerapan SAP, pemanfaatan TI, dan SPI secara simultan berpengaruh terhadap kualitas LKPD. Hal ini menunjukkan bahwa Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal dapat dipahami dan diimplementasikan dengan baik, maka dari itu Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor yang dihasilkan akan semakin baik pula.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian serta keterbatasan dalam penelitian ini, selanjutnya dapat dikemukakan saran yang diharapkan dapat bermanfaat yaitu sebagai berikut:

5.2.1 Saran Praktis

1. Pada Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi Penerapan dari Sistem Akuntansi Keuangan Daerah.

Dikarenakan penerapan dari sistem akuntansi keuangan daerah yang baik sangat dibutuhkan dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

2. Pada Standar Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi Penerapan dari Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan terus menggunakan dan menerapkan SAP sebagai pedoman dalam pembuatan dan penyajian laporan keuangan yang berkualitas.

3. Pada Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya dapat mempertahankan dan meningkatkan lagi optimalisasi Pemanfaatan dari Teknologi Informasi. Dengan mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan dari teknologi informasi dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Pada Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor khususnya kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebaiknya pada tahun berikutnya dapat meningkatkan lagi sistem pengendalian internalnya agar seluruhnya dapat dijalankan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

5.2.2 Saran Akademis

Bagi Peneliti Selanjutnya:

- a. Peneliti selanjutnya disarankan agar dapat menambahkan variabel atau bahkan mengganti variabel lain yang lebih berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Contohnya seperti variabel Kualitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia.
- b. Peneliti selanjutnya disarankan agar tidak hanya menggunakan metode survei berupa penyebaran kuesioner saja, melainkan dapat menggunakan metode berupa *Focus Group Discussion* (FGD) yaitu sebagai suatu diskusi yang dilakukan secara sistematis dan terarah dalam mengumpulkan data dan informasi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh interaksi data yang dihasilkan dari suatu diskusi sekelompok responden dalam hal meningkatkan kedalaman informasi mengenai suatu fenomena.
- c. Peneliti selanjutnya disarankan untuk dapat memperluas wilayah penelitian dalam menentukan objek penelitiannya. Contohnya dapat melakukan penelitian pada kantor dinas, badan, atau bahkan organisasi lain agar lebih spesifik hasil dari penelitiannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alifa, R. (2017). *Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survey pada SKPD di Kota Cimahi)*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Ardianto, R. dan Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada SKPD Wilayah Kabupaten Tangerang). *Jurnal Bina Akuntansi*, [online] Volume 6 (1), p. 95-136. Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/301319-pengaruh-penerapan-standar-akuntansi-pem-8051e787.pdf> [Diakses pada 14 September 2020].
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar*. Edisi ke 3. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- bpk.go.id. Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 Tahun 2020. [Diakses pada 22 Desember 2020].
- bpk.go.id. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 60. Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. [Diakses pada 21 Oktober 2020].
- _____. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17. Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. [Diakses pada 22 November 2020].
- djpk.kemenkeu.go.id. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 71. Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. [Diakses pada 7 Oktober 2020].
- Fatmala, C. dan Salisa, N. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Prinsip Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara. *Accounting Global Journal*, [online] Volume 1 (1), p. 225-238. Tersedia di <https://jurnal.umk.ac.id/index.php/AccGlobal/article/view/3332/1633> [Diakses pada 8 September 2020].
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harnoni. (2016). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (Studi Empiris SKPD di Kabupaten Kepulauan Anambas). *Jom FEKON*, [online] Volume 3 (1), p. 10799-1093. Tersedia di <https://media.neliti.com/media/publications/185029-ID-pengaruh-kapasitas-sumber-daya-manusia-p.pdf> [Diakses pada 4 Desember 2020].

- Hartono dan Ramdany. (2020). Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi*, [online] Volume 9 (1), p. 14-23. Tersedia di <http://ejournal.stiemj.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/90> [Diakses pada 14 September 2020].
- jdih.bpk.go.id. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor. 29. Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. [Diakses pada 5 Desember 2020].
- _____. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 59. Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. [Diakses pada 22 Oktober 2020].
- _____. kominfo.go.id. Undang-undang Nomor. 11. Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Kadir, A. dan Triwahyuni, T. (2013). *Pengantar Teknologi Informasi*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Edisi Revisi. Yogyakarta: Penerbit UII Press.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mene, R. E., Karamoy, H., dan Warongan, J.D.L. (2018). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Halmahera Utara. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, [online] Volume 13 (3), p. 133-143. Tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/viewFile/20045/19653> [Diakses pada 4 Desember 2020].
- Mokoginta, N., Lambey, L., dan Pontoh, W. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, [online] Volume 12 (2), p. 874-890. Tersedia di <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18282> [Diakses pada 5 November 2020].
- peraturan.bpk.go.id. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 13. Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. [Diakses pada 9 Oktober 2020].
- peraturan.bpk.go.id. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 8. Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. [Diakses pada 20 November 2020].

-
- . Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 9. Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. [Diakses pada 22 November 2020].
- Pujanira, P. (2017). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Diy*. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Ratnasari, R. (2018). *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal dan Kompetensi Staf Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Survei pada Pemerintah Daerah Kota Bandung)*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sutabri, T. (2014). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Utami, A. (2018). *Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pacitan)*. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Yanti, N. S., Made, A., dan Wahyu, S. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Pengawasan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kota Malang). *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, [online] Volume 8 (1), p. 1-8. Tersedia di <http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jrm/article/view/4455> [Diakses pada 9 Agustus 2020].

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dini Dwiyani
Alamat : Kp. Buniaga RT 04/07 Desa Ciherang Kecamatan
Pacet Kabupaten Cianjur
Tempat dan tanggal lahir : Cianjur, 31 Maret 1999
Umur : 22 tahun
Agama : Islam
Pendidikan
• SD : SDN Caringin Nunggal
• SMP : MTsN Ciherang (Sekarang menjadi MTsN 1 Cianjur)
• SMA : SMAN 1 Sukaresmi
• Perguruan Tinggi : Universitas Pakuan

Bogor, 04 Juni 2020

Peneliti,

(Dini Dwiyani)

LAMPIRAN

LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner

KATA PENGANTAR

Kepada

Yth. Bapak/ Ibu BPKAD Kabupaten Bogor

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyusunan skripsi Program Studi Akuntansi Universitas Pakuan, bersama ini peneliti bermaksud menyusun penelitian yang berjudul “FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pada BPKAD Kabupaten Bogor).” Oleh karena itu, peneliti membutuhkan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Adapun identitas dari peneliti:

Nama: Dini Dwiyani

NPM: 022117252

Fakultas/Prodi: Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi S1

Peneliti menyadari sepenuhnya, adanya kuesioner ini mengganggu aktivitas Bapak/ Ibu yang padat. Namun dengan segala kerendahan hati, peneliti mohon kiranya Bapak/ Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Partisipasi Bapak/ Ibu dalam memberikan jawaban pada setiap pernyataan kuesioner sebagaimana sesuai dengan kenyataan pada diri Bapak/ Ibu sangat kami hargai. Kuesioner ini hanya untuk keperluan skripsi, tidak untuk di publikasikan secara luas, sehingga kerahasiaan data yang diisi dapat dijaga.

Demikian pengantar kuesioner penelitian ini, atas perhatian dan kerjasama Bapak/ Ibu, peneliti ucapkan terima kasih.

Peneliti

Dini Dwiyani

A. Identitas Responden

Untuk keperluan validitas jawaban kuesioner dan analisis data, kami memerlukan jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i sebagai responden. Dimohon Bapak/Ibu berkenan mengisi identitas berikut:

1. Nama :
2. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan
3. Usia :
4. Pendidikan Terakhir : SLTA/SLTP Diploma S1 S2
5. Latar Belakang Pendidikan
 - Akuntansi
 - Manajemen
 - Ilmu Ekonomi
 - Hukum
 - Lainnya
6. Lama Bekerja :
7. Bagian di BPKAD :

B. Petunjuk Pengisian Kuesioner

1. Cara pengisian kuesioner adalah
 - a. Semua pernyataan dijawab dengan memberikan tanda (√) pada salah satu jawaban yang tersedia dan paling tepat menurut persepsi Bapak/Ibu/Sdr (i).
 - b. Tidak ada benar atau salah dalam memberikan jawaban karena kami hanya memperhatikan pada suatu angka atau jawaban yang menunjukkan persepsi terbaik dari Bapak/Ibu/Sdr (i).

2. Terdapat beberapa pilihan pernyataan, yaitu:

STS: Sangat Tidak Setuju

TS: Tidak Setuju

RG: Ragu-ragu

S: Setuju

SS: Sangat Setuju

3. Pernyataan Mengenai Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Daftar Pernyataan Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS
Kesesuaian Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dengan Standar Akuntansi Pemerintahan						
1	Sistem akuntansi yang diterapkan pada instansi tempat saya bekerja sudah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan					
2	Setiap pencatatan transaksi yang ada pada instansi tempat saya bekerja sudah disertai oleh bukti transaksi					
3	Pada instansi tempat saya bekerja, pencatatan dilakukan secara berurut atau secara kronologis					
Prosedur Pencatatan Akuntansi Berdasarkan Standar Pencatatan yang Berlaku Umum						
4	Instansi tempat saya bekerja menyusun neraca saldo berdasarkan akun buku besar pada akhir periode akuntansi					
5	Instansi tempat saya bekerja melakukan pembuatan ayat jurnal penyesuaian, penyusunan kertas kerja, pembuatan ayat jurnal penutup, pembuatan neraca saldo setelah penutupan, dan pembuatan ayat jurnal pembalik					
6	Instansi tempat saya bekerja melakukan adanya kedisiplinan dalam pembukuan data keuangan					
Pembukuan Laporan Keuangan Secara Periodik						
7	Laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja dibuat untuk setiap periode akuntansi					

Daftar Pernyataan Tentang Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X1)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS
Pembukuan Laporan Keuangan Secara Periodik						
8	Pelaporan laporan keuangan pada instansi tempat saya bekerja dilakukan secara konsisten dan periodik					

4. Pernyataan Mengenai Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

Daftar Pernyataan Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS
PSAP 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan						
1	Instansi tempat saya bekerja selalu menerapkan basis akrual untuk mengakui aset, kewajiban, ekuitas, dan menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan, pendapatan belanja, dan pembiayaan					
PSAP 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran						
2	Instansi tempat saya bekerja selalu mencatat pendapatan berdasarkan asas bruto serta mengakui belanja pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah					
3	Pada instansi tempat saya bekerja, penerimaan pembiayaan diakui saat diterima di rekening kas					
PSAP 03 tentang Laporan Arus Kas						
4	Instansi tempat saya bekerja selalu menyusun atau menyajikan laporan arus kas sesuai dengan standar akuntansi pemerintah dalam laporan arus kas					
PSAP 04 tentang Catatan atas Laporan Keuangan						
5	Instansi tempat saya bekerja telah membuat catatan atas laporan keuangan yang meliputi penjelasan pos-pos yang ada di dalam laporan keuangan					
PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan						
6	Instansi tempat saya bekerja selalu mengakui persediaan pada saat diterima atau hak milik berpindah					
7	Instansi tempat saya bekerja selalu mencatat persediaan berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode akuntansi					
PSAP 06 tentang Akuntansi Investasi						
8	Instansi tempat saya bekerja selalu mengakui kas yang telah dikeluarkan sebagai investasi setelah memenuhi kriteria manfaat masa datang dapat diperoleh dan nilai investasi dapat diukur					

Daftar Pernyataan Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (X2)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS
PSAP 07 tentang Aset Tetap						
9	Instansi tempat saya bekerja selalu mengklasifikasikan aset tetap berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya serta mencatat aset tetap sebesar biaya perolehannya					
PSAP 08 tentang Akuntansi Kontruksi dalam Pengerjaan						
10	Instansi tempat saya bekerja selalu mengungkapkan informasi kontruksi dalam pengerjaan pada akhir periode akuntansi					
PSAP 09 tentang Akuntansi Kewajiban						
11	Instansi tempat saya bekerja selalu mengakui kewajiban pada saat dana pinjaman diterima dan saat kewajiban timbul serta mencatat kewajiban sebesar nominal					
PSAP 10 tentang Koreksi Kesalahan						
12	Instansi tempat saya bekerja selalu melakukan koreksi terhadap setiap kesalahan yang ditemukan berdasarkan standar akuntansi pemerintah					
PSAP 11 tentang Laporan Konsolidasi						
13	Laporan Keuangan Konsolidasi yang dibuat oleh instansi tempat saya bekerja, telah mencakup semua laporan keuangan dari semua entitas akuntansi					
PSAS 12 tentang Laporan Operasional						
14	Instansi tempat saya bekerja selalu menyusun dan menyajikan laporan operasional dan terdapat informasi tentang kegiatan operasional kerja yang mencakup pendapatan, beban, surplus/defisit operasional					

5. Pernyataan Mengenai Pemanfaatan Teknologi Informasi

Daftar Pernyataan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS
Perangkat						
1	Setiap sub bagian pada BPKAD memiliki komputer yang cukup untuk melakukan tugasnya					
2	Di seluruh unit tempat saya bekerja telah terpasang jaringan internet					
3	Instansi tempat saya bekerja telah memanfaatkan jaringan internet sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan					

Daftar Pernyataan tentang Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS
Pengelolaan Data Keuangan						
4	Melakukan proses akuntansi sejak awal transaksi sampai dengan pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi					
5	Dalam pengolahan data transaksi keuangan menggunakan software yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan					
6	Laporan akuntansi dan manajerial dihasilkan dari sistem akuntansi yang terintegrasi					
Perawatan						
7	Pada instansi tempat saya bekerja terdapat jadwal pemeliharaan peralatan secara rutin					
8	Peralatan yang rusak didata dan diperbaiki tepat pada waktunya					

ngeni Sistem Pengendalian Internal

Daftar Pernyataan Tentang Sistem Pengendalian Internal (X4)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS
Lingkungan Pengendalian						
1	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai					
2	Instansi tempat saya bekerja, telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi					
3	Instansi tempat saya bekerja, telah melakukan evaluasi dan penyesuaian periodik terhadap struktur organisasi dan menempatkan pegawai sesuai dengan bidangnya					
4	Pimpinan telah memberikan wewenang kepada para pegawai sesuai dengan tanggungjawabnya dalam mencapai tujuan instansi pemerintah					
Penilaian Risiko						
5	Pimpinan selalu mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi					
6	Pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi					
Kegiatan Pengendalian						
7	Pimpinan telah menyusun dan menerapkan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia					
8	Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi dilakukan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi					
Daftar Pernyataan Tentang Sistem Pengendalian Internal (X4)						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS

Kegiatan Pengendalian					
9	Semua transaksi yang diproses kedalam komputer yaitu transaksi yang telah diotorisasi				
10	Pengeluaran uang pada instansi selalu didokumentasikan pada bukti pengeluaran kas				
Informasi dan Komunikasi					
11	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan tindakan korektif secara tepat				
12	Melakukan pembaharuan sistem secara terus menerus agar dapat menunjang kegiatan pekerjaan				
Pemanfaatan Pengendalian Internal					
13	Pimpinan selalu mengevaluasi kekurangan pengendalian internal kepada pihak yang bertanggungjawab				

7. Pernyataan Mengenai Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Daftar Pernyataan Tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS
Relevan						
1	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja dapat digunakan untuk mengoreksi aktivitas keuangan di masa lalu					
2	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian di masa yang akan datang					
3	Laporan keuangan disajikan secara tepat waktu sehingga dapat digunakan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan					
4	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja sudah lengkap dan mencakup semua informasi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan					
Andal						
5	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja telah menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan dalam laporan keuangan					
6	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja sudah terbebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material					

Daftar Pernyataan Tentang Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						
No	Pernyataan	Alternatif Jawaban				
		STS	TS	RG	S	SS

Andal					
7	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja sudah teruji kebenarannya				
8	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja telah memenuhi kebutuhan para pengguna dari laporan keuangan pemerintah				
9	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu				
Dapat Dibandingkan					
10	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya				
Dapat Dipahami					
11	Informasi dalam laporan keuangan yang dihasilkan oleh instansi tempat saya bekerja telah jelas sehingga dapat dipahami oleh pengguna				

Lampiran 2
Hasil Kuesioner Seluruh Variabel

Hasil Kuesioner Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

No Resp.	Nomor Butir Pernyataan								Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	
1	4	5	5	5	5	5	5	5	39
2	5	5	5	5	5	5	5	5	40
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	4	4	5	38
6	4	4	4	4	4	4	5	5	34
7	5	5	5	5	5	5	5	5	40
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	4	5	5	4	4	5	4	4	35
11	5	5	5	5	4	5	4	4	37
12	5	4	5	5	4	5	5	5	38
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	5	5	5	5	4	5	5	5	39
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	5	4	5	5	4	5	5	5	38
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
23	5	4	5	5	4	5	5	5	38
24	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	5	5	5	5	5	5	5	5	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	5	5	4	5	5	5	3	5	37
36	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	5	5	4	5	5	5	4	5	38
39	5	4	4	3	4	5	4	5	34
40	5	5	4	5	4	4	4	4	35
41	5	5	5	5	5	5	5	5	40
42	5	5	5	5	5	5	5	5	40
43	5	5	5	5	5	5	5	5	40
No Resp.	Nomor Butir Pernyataan								Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	
44	4	5	5	5	5	4	4	5	37

45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32	
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40	
52	5	4	5	5	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	38	

Hasil Kuesioner Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan

No Re sp.	No Butir Pernyataan														Sk or To tal				
	Ite m1	Ite m2	Ite m3	Ite m4	Ite m5	Ite m6	Ite m7	Ite m8	Ite m9	Ite m10	Ite m11	Ite m12	Ite m13	Ite m14					
1	4	3	5	5	5	4	5	3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	64
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
3	5	5	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	69
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
5	5	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	67
6	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	66
7	4	4	5	5	5	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	65
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
10	5	5	5	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	65
11	5	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	62
12	4	5	4	5	4	4	4	4	5	4	5	4	5	4	4	4	4	4	61
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
15	4	4	4	5	5	4	5	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	63
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
18	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	60
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
23	4	4	4	4	5	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	63
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
No Re sp.	No Butir Pernyataan														Sk or To tal				
	Ite m1	Ite m2	Ite m3	Ite m4	Ite m5	Ite m6	Ite m7	Ite m8	Ite m9	Ite m10	Ite m11	Ite m12	Ite m13	Ite m14					

32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
34	4	4	3	4	4	3	3	4	3	4	4	4	4	4	52
35	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	66
36	5	5	4	5	5	4	5	4	4	4	4	5	5	4	63
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
38	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
39	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
40	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	61
41	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	5	5	4	65
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
44	4	4	4	5	4	4	5	5	4	5	4	5	5	5	63
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	70
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
48	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	5	4	4	60
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	56
52	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	4	5	5	5	62

Hasil Kuesioner Pemanfaatan Teknologi Informasi

No Resp.	No Butir Pernyataan								Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	
1	5	5	5	5	5	5	3	4	37
2	5	4	4	5	5	5	5	4	37
3	5	5	5	5	5	5	5	5	40
4	5	5	5	5	5	5	5	5	40
5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
6	5	4	4	5	4	4	4	4	34
7	4	4	5	5	5	5	4	4	36
8	5	5	5	5	5	5	5	5	40
9	5	5	5	5	5	5	5	5	40
10	3	5	5	5	5	5	4	4	36
11	4	5	5	5	5	4	4	5	37
12	4	4	5	5	5	4	5	5	37
13	4	4	4	4	4	4	4	4	32
14	5	5	5	5	5	5	5	5	40
15	5	4	5	5	5	5	4	4	37
16	5	5	5	5	5	5	5	5	40
17	4	4	4	4	4	4	4	4	32
18	5	4	4	5	5	5	4	4	36
19	4	4	4	4	4	4	4	4	32
20	4	4	4	4	4	4	4	4	32
21	4	4	4	4	4	4	4	4	32
22	4	4	4	4	4	4	4	4	32
No Resp.	No Butir Pernyataan								Skor Total
	Item1	Item2	Item3	Item4	Item5	Item6	Item7	Item8	
23	5	4	5	5	5	5	4	4	37

24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
38	5	5	4	5	4	5	4	4	4	36
39	4	4	5	5	5	4	4	4	4	35
40	5	4	5	5	5	4	4	4	4	36
41	5	4	5	5	5	5	4	4	4	37
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
44	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
45	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
48	5	4	5	5	5	4	4	4	4	36
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	40
51	4	4	4	4	4	4	4	4	4	32
52	5	4	4	5	5	4	4	4	4	35

Hasil Kuesioner Sistem Pengendalian Internal

No Res p.	No Butir Pernyataan													Sk or Tot al
	Ite m1	Ite m2	Ite m3	Ite m4	Ite m5	Ite m6	Ite m7	Ite m8	Ite m9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	
1	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	61
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
6	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
10	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	4	5	4	59
11	5	4	5	5	4	4	5	4	5	4	5	4	4	58
12	4	5	5	5	4	5	5	4	4	5	4	4	5	59
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
No Res p.	No Butir Pernyataan													Sk or Tot
	Ite m1	Ite m2	Ite m3	Ite m4	Ite m5	Ite m6	Ite m7	Ite m8	Ite m9	Item 10	Item 11	Item 12	Item 13	

														al
15	5	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	4	5	61
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
17	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
18	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	58
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
23	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53
24	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
27	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
28	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
34	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
35	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	63
36	4	4	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	61
37	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	63
38	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	5	4	55
39	5	4	5	5	4	4	5	4	4	4	5	5	4	58
40	5	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	4	5	60
41	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	5	61
42	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	65
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
44	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	61
45	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	61
46	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	63
47	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
48	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	60
49	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
50	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	52
51	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	53
52	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	5	62

Hasil Kuesioner Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

No Res p.	No Butir Pernyataan											SkorTotal	
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11		
1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
2	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
3	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
5	5	4	5	5	4	5	5	4	4	5	5	5	51
6	5	5	5	5	5	5	4	4	5	4	4	4	51
No Res p.	No Butir Pernyataan											SkorTotal	
	Item 1	Item 2	Item 3	Item 4	Item 5	Item 6	Item 7	Item 8	Item 9	Item 10	Item 11		

7	5	4	5	5	4	5	4	5	5	5	5	52
8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
9	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
10	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	51
11	4	5	4	4	5	5	4	5	4	4	4	48
12	4	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	50
13	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
14	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
15	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
16	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
17	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	45
18	5	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	51
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
22	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
23	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
24	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
25	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
26	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
27	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	45
28	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
29	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
31	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
33	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	44
34	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
35	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
36	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
37	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
38	4	4	5	4	5	4	4	4	4	4	4	46
39	5	5	4	5	5	4	4	4	4	4	5	49
40	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	5	53
41	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
42	4	4	5	5	4	5	5	5	4	5	5	51
43	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
44	4	5	5	5	5	4	4	4	5	4	5	50
45	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
46	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
47	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
48	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
49	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
50	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
51	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	55
52	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	53

Lampiran 3

Struktur Organisasi dan Data Pegawai BPKAD Kabupaten Bogor



**DATA PEGAWAI
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH TA. 2020**

JENIS	PEGAWAI , GOL.	SEKRETARIAT	BIDANG ANGGARAN	BIDANG PERBENDAHARAAN	BIDANG AKUNTANSI & TEKNOLOGI INFORMASI	BIDANG ASET DAERAH	JUMLAH PEGAWAI	PER GOL.
PNS	Golongan IV/C	1					1	
	Golongan IV/B						1	
	Golongan IV/A	2	2	1			5	6
	Golongan III/D	2	2	2	3		14	8
	Golongan III/C	4	5	13	2	5	34	14
	Golongan III/B	5	1	2	7	5	34	15
	Golongan III/A	2	1	1	1	2	7	70
	Golongan II/D	2		2		2	6	
	Golongan II/C	2		2		1	5	
	Golongan II/B					1	1	
	Golongan II/A						0	12
	Golongan I/B						2	
TKK		1	1	14	22	92	92	
JUMLAH PNS								
		21	11	24	14	22	92	92
PENDIDIKAN	S-2	4	5	8	9	6	32	
	S-1	11	6	10	5	9	43	
	D-4			1			1	
	D-3						0	
	D-2			1			0	
	SLTA	5		3		4	13	
	SLTP					1	1	
	JUMLAH PNS	20	11	23	14	22	90	
	TKK							
	S-1	1						
D-3			1					
SLTA								
JUMLAH TKK	1	0	1	0	0	2		
JUMLAH TOTAL (PNS & TKK)								
								92
JENIS KELAMIN :								
PRIA	14	6	16	7	14	58		92
WANITA	9	4	9	6	7	34		

Lampiran 4
Surat Pernyataan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dini Dwiyani (P)

Nomor Mahasiswa : 022117252

Program Studi : Akuntansi

Menyatakan benar bahwa saya telah menghubungi instansi/ perusahaan yang saya jadikan lokasi penelitian, dan dari pihak perusahaan telah menyatakan kesanggupan untuk menerima dilakukannya riset/ observasi tersebut.

Adapun dari pihak perusahaan yang menerima:

Nama : Nur (P)

Jabatan : Pelaksana Golongan II D

Nama Perusahaan : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)
Kabupaten Bogor

Alamat Perusahaan : Jl. Aman No. 1, Tengah, Cibinong, Bogor, Jawa Barat 16914

Judul Penelitian : Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan
Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada BPKAD
Kabupaten Bogor)

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bogor, 30 Maret 2021

Yang menyatakan

Materai Rp 6.000,-

(Dini Dwiyani)